

BAB IV KEKUASAAN, AKTOR DAN JEJARING POLITIK NEPOTISME DAERAH

Telah dikemukakan, tujuan pertama penelitian ini adalah memaparkan perilaku para aktor utama politik nepotisme daerah, baik individual maupun kolektiva, dalam membangun dan menggunakan jejaring politik. Para aktor utama politik nepotisme daerah dalam penelitian ini, mencakup baik individu politisi maupun organisasi politik yang ada di daerah, maupun individu dan organisasi lain yang memiliki kepentingan terhadap calon kepala daerah.

Dua aktor utama politik nepotisme daerah adalah nepotis dan nepos. Nepotis adalah kepala daerah yang menggunakan kewenangannya selaku pejabat publik untuk meningkatkan popularitas, mendapatkan legalitas, dan meningkatkan elektabilitas anggota keluarganya dalam pemilihan kepala daerah. Nepos adalah calon kepala daerah yang memiliki hubungan keluarga dengan nepotis serta mendapatkan perlakuan istimewa dari nepotis dalam rangka meningkatkan popularitas, mendapatkan legalitas, dan meningkatkan elektabilitas dirinya dalam pemilihan kepala daerah.

Sebagai strategi awal, nepos dan nepotis memanfaatkan baik kekuasaan potensial dan kekuasaan relasional untuk membangun dan menggunakan jejaring politik nepotisme daerah. Banyak pihak, baik individual maupun kolektiva, terlibat dan memberikan kontribusi bagi jalannya praktik politik nepotisme daerah.

Berkenaan dengan tujuan penelitian tersebut, berikut diuraikan secara berturut-turut: (1) Kekuasaan Potensial Aktor Politik Nepotis, (2) Kekuasaan Relasional Aktor Politik Nepos, (3) Aktor, Organisasi Spasial dan Relasi Jejaring Politik, (4) Perilaku Politik Elit, Jejaring Nepotisme, dan Disafeksi Politik Massa, dan (5) Rangkuman Aktor dan Jejaring Politik Nepotisme Daerah.

A. Kekuasaan Potensial Aktor Politik Nepotis

Secara sederhana, kekuasaan senantiasa mengemuka dalam hubungan antara satu orang dengan orang lain, dalam bentuk pengaruh satu orang terhadap orang lain. "Rather, power is an aspect of the actual or potential interaction between two or more social actors. (Actor is a generic term for a unitary social entity whether an individual person or a larger collectivity, such as a corporation or a nation state)" (Knoke, 1994: 1). Artinya, kekuasaan adalah suatu aspek interaksi baik aktual maupun potensial antara dua atau lebih aktor sosial. Sebagai istilah generik, aktor sosial di sini menunjuk pada suatu kesatuan entitas sosial, apakah seorang individu atau suatu kolektiva lebih besar seperti korporasi atau negara-bangsa.

Bertolak dari pengertian tersebut, semakin besar pengaruh dan semakin banyak orang yang dipengaruhi, berarti semakin kuat dan besar pula kekuasaan satu orang tersebut. Berkenaan dengan kuat dan besarnya kekuasaan tersebut, didasarkan pada sejumlah sumber dan legitimasi yang dimiliki oleh seorang aktor politik.

Meskipun secara empirik kekuasaan hanya menampak dalam bentuk relasional, ada cukup bukti dan teori bahwa pada dasarnya para aktor politik memiliki sejumlah sumber kekuasaan, baik yang bersifat pribadi (*personal charisma*) maupun yang bersifat sosial (*social capital*). Untuk itu, sebelum sajian tentang kekuasaan relasional aktor politik nepotisme, terlebih dulu disajikan sumber dan legitimasi kekuasaan aktor politik nepotisme daerah.

Ada banyak sumber dan alasan pembenaran kekuasaan seseorang. Semakin besar dan banyak sumber dan legitimasi kekuasaan, maka semakin besar dan dalam pula pengaruhnya terhadap orang lain. Karena itu, seorang pejabat politik yang memiliki banyak sumber dan legitimasi kekuasaan cenderung semakin sulit untuk dikritik atau dipersalahkan.

1. Sumber dan Legitimasi Politik Kekuasaan

Bagus Permadi, pria kelahiran Kediri 14 Agustus 1947, adalah politisi PDIP yang menjadi Walikota Singapraja dalam dua kali masa jabatan. Masa jabatan pertama (2003-2008) dipilih secara tidak langsung melalui DPRD Kota Singapraja, sedangkan pada periode kedua (2008-2013), Bagus Permadi dipilih secara langsung melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada). Selama dua kali masa jabatan tersebut, Bagus Permadi berpasangan sebagai Wakil Walikota Singapraja dengan Basukarno, seorang politisi Partai Golkar.

Setelah Reformasi 1998, Indonesia melaksanakan Pemilu pada 7 Juni 1999, dan berhasil menempatkan PDIP sebagai partai politik dengan perolehan suara terbesar. Kedudukan dan proporsi perolehan suara dan kursi partai politik tingkat nasional ternyata juga tampak pada sebagian besar DPRD Kota/Kabupaten, termasuk Kota Singapraja.

Bagus Permadi yang ketika itu melepaskan pekerjaannya sebagai dosen IKIP Singapraja untuk berkonsentrasi pada kegiatan politik, terpilih menjadi anggota DPR-RI. Kemenangan PDIP di tingkat nasional juga tercermin dari kemenangannya PDIP di Kota Singapraja, sehingga mengantarkan Sri Sendari, rekan satu partai Bagus Permadi, sebagai Ketua DPRD Kota Singapraja.

Belum habis masa jabatannya sebagai anggota DPR-RI, Bagus Permadi melepaskan jabatannya sebagai legislator DPR-RI untuk mencalonkan diri menjadi Walikota Singapraja, berpasangan dengan Basukarno dari Partai Golkar. Melalui sistem pemilihan tidak langsung oleh DPRD Kota Singapraja, mereka berhasil memenangkan Pilkada tidak langsung, sehingga Bagus Permadi menjadi Walikota Singapraja, sedangkan Basukarno menjadi Wakil Walikota Singapraja (2003-2008).

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singapraja secara tidak langsung tersebut ditentukan oleh 45 anggota DPRD Kota Singapraja. Berkenaan dengan itu, "peta kursi" di DPRD Kota Singapraja menunjukkan bahwa Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) memiliki 17 suara, Fraksi Partai Golkar (F-PG) 7 suara, Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) 8 suara, Fraksi Gabungan (F-Gab) 8 suara

dan Fraksi F-TNI/Polri memiliki 5 suara. Setelah melewati masa pembursaan yang banyak diberitakan di surat kabar lokal, calon Walikota dan Wakil Walikota Singapraja mengerucut menjadi empat pasangan. Mereka adalah pasangan Bagus Permadi-Basukarno (F-PDIP dan F-PG), Mohammad Nur-Poernomo (F-KB). Kemudian Gandhi Yogatama-Dewanti Ruparin Diah dan Suhardi-Agus Sukiranto yang dijagokan F-Gab.

Dilihat dari peta kekuatan awal, sebenarnya sudah sejak awal bisa diprediksi hasil akhirnya. Secara matematis-logis, pasangan Bagus Permadi-Basukarno merupakan pasangan paling tangguh dan unggul. Bagus Permadi didukung 17 suara dari unsur F-PDIP dan Basukarno didukung F-PG yang berjumlah 7 orang. Jika anggota F-PDIP dan F-PG solid, koalisi kedua fraksi ini akan mendapatkan 24 suara. Adapun pasangan Cahya-Poernomo yang dicalonkan F-KB bermodal 8 suara, sehingga tampak sulit menghadapi persainan melawan pasangan Bagus Permadi-Basukarno. Namun demikian, tetap saja ada kekhawatiran, terutama di kalangan pendukung pasangan Bagus Permadi-Basukarno akan terjadi pembangkangan, sehingga Fraksi PDIP merasa perlu untuk mengamankan seluruh anggotanya sebelum pemilihan di DPRD Kota Singapraja. Ketika itu, 17 anggota Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) dan 7 anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) yang menjadi rekan koalisi FPDIP, dikarantina di sebuah hotel di kawasan Jl Jaksa Agung Suprpto, Kota Singapraja. Karantina ini bertujuan untuk menghindari praktik *money politics* dan kemungkinan terjadinya pembelotan sebelum pemilihan Walikota Singapraja 2003-

2008 berlangsung pada hari Kamis, 28 Agustus 2003. Karantina terhadap para anggota Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar ini dilakukan mulai Senin (25 Agustus) hingga saat pemilihan (29 Agustus 2003).

Pemilihan Walikota selanjutnya, yakni untuk masa jabatan 2008-2013, ditandai oleh perubahan sistem, dari pemilihan tidak langsung oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh warga kota yang memiliki hak pilih. Dalam Pilkada langsung ini, ada lima pasangan kepala daerah yang bersaing, yaitu: (1) R. Aries Pujanggoro-Mohan Katelu, (2) Fathol Arifin-Balarama, (3) Bagus Permadi-Basukarno, (4) Hasanudin Abdul Latief-Arief Darmawan, serta (5) Ahmad Subchan-Noor Chozin Askandar. Kelima pasangan bakal calon tersebut berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap, memperebutkan 559.246 pemilih.

Pemilihan kepala daerah langsung yang pertama di Kota Singaperbangsa dan Karawang tersebut akhirnya dimenangkan oleh pasangan Bagus Permadi-Basukarno mendapatkan 44,38 persen suara, sedangkan pasangan Hasanudin Latief-Arif Darmawan (Partai Demokrat) memperoleh 20,55 persen, pasangan Subchan-Nur Chozin Askandar (PKS) mendapat 20,55 persen, pasangan Aries Pujanggoro-Mohan Katelu (Partai Golkar dan PAN) mendapat 8,85%, dan pasangan Fathol Arifin-Balarama (PKB) memperoleh 7,48%. Dengan demikian, pasangan Bagus Permadi-Basukarno kembali memenangkan persaingan politik untuk menduduki jabatan Walikota dan Wakil Walikota untuk kali keduanya.

Berdasarkan hasil pemilihan tidak langsung tersebut, Bagus Permadi dan Basukarno ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Singapraja (2003-2008), dan dilantik pada tanggal 13 September 2003. Pada periode kedua (2008-2013), Bagus Permadi yang tetap berpasangan dengan Bambang dan memenangi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singapraja, dan ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Singapraja berdasarkan SK Mendagri 131.35/706/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Singapraja 2008-2013. Sedangkan Basukarno dilantik berdasarkan SK Mendagri 132.35/707/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Walikota Singapraja 2008-2013, dan dilantik pada tanggal 13 September 2008.

Berdasarkan uraian tersebut, bisa disimpulkan bahwa kekuasaan Bagus Permadi sudah memiliki legitimasi politik. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemilihan secara perwakilan dan atau secara langsung tersebut, Bagus Permadi juga telah disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, bisa disimpulkan bahwa kekuasaan Bagus Permadi sudah memiliki legitimasi legal-formal.

Meskipun seorang pejabat publik bisa saja sudah memiliki legitimasi politik dan legitimasi legal-formal, tidak berarti pejabat publik yang bersangkutan bisa dengan leluasa menggunakan kekuasaannya, atau mempengaruhi orang lain baik secara sukarela maupun terpaksa. Secara empirik, pejabat publik tersebut masih memerlukan sumber-sumber kekuasaan yang lain, agar penggunaan kekuasaannya

berlangsung efektif. Berkenaan dengan legitimasi dan sumber-sumber kekuasaan Bagus Permadi selain legitimasi politik dan legal-formal, berikut diuraikan hasil penelitian lapangan, yang mencakup: (1) sumber dan legitimasi sosiologis, yang mencakup kualifikasi akademik, kompetensi menulis, dan kepiawaian mendalang, dan (2) sumber dan legitimasi kultural yang mencakup gelar kebangsawanan Jawa, dan identifikasi diri dengan Ken Arok.

2. Sumber dan Legitimasi Sosiologis Kekuasaan

a. Jenjang Pendidikan dan Gelar Akademik

Beberapa pejabat politik Indonesia memiliki kecenderungan untuk menambah dan menguatkan sumber-sumber kekuasaan mereka. Ini tidak hanya dilakukan oleh para pejabat politik daerah, tetapi juga seorang presiden seperti yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyelesaikan pendidikan doktor di Institut Pertanian Bogor (2004) dengan disertasi *Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran: Analisis Kebijakan Ekonomi dan Fiskal* (Sumber Data pada lampiran 6: pada lampiran 6 4.1).

Kecenderungan yang sama juga dilakukan oleh Bagus Permadi, yang salah satunya dilakukan dengan mengikuti dan menyelesaikan jenjang pendidikan lebih tinggi. Dengan memiliki gelar akademik lebih tinggi, seorang pejabat politik tidak hanya bisa diidentifikasi sebagai praktisi, tetapi juga akan memiliki cukup status

di hadapan warganya yang memiliki jenjang pendidikan tinggi, sebagaimana di Kota Singapraja.

Pernah suatu ketika Bagus Permadi menjadi dalang wayang kulit dalam rangka Peringatan Hari Pendidikan Nasional (08 Mei 2010), Kota Singapraja sudah dikenal sebagai Kota Pendidikan. Semua warga Kota Singapraja didorong untuk meningkatkan jenjang pendidikan, termasuk para guru, pegawai daerah, serta para pejabat daerah. Dia pun mencontohkan dirinya yang merasa tidak nyaman memimpin kota pendidikan dengan hanya bergelar sarjana (S1). Karena itu, setelah menjabat Walikota Singapraja, Bagus Permadi masih meningkatkan jenjang pendidikannya hingga mendapatkan gelar magister. Berdasarkan penelusuran, Bagus Permadi memutuskan untuk mengikuti perkuliahan program pascasarjana ilmu administrasi publik di sebuah universitas negeri di Kota Singapraja pada tahun akademik 2004.

Wisuda kali ini terkesan istimewa karena Walikota Singapraja, Drs. KRHT Bagus Permadi, MAP, turut ambil bagian dalam prosesi sebagai wisudawan. Setelah mengikuti studi selama 1 tahun 5 bulan di program Magister Administrasi Publik Universitas Maharaja, Bagus Permadi berhasil lulus dengan predikat *cum laudedan* indeks prestasi kumulatif 3,96. Menurut ketua program studi pascasarjana ilmu administrasi publik Prof. Dr. HR Riyadi Soeprapto MS, tesis orang nomor satu di Kota Singapraja ini berjudul “Pelaksanaan e-Government Menuju Good Governance (Studi pada Pemerintah Kota Singapraja)”. Ujian tesis Bagus Permadi berlangsung pada 20 Januari 2006. Pembimbingnya adalah Prof. Dr. HR Riyadi Soeprapto MS dan Drs. Irwan Noor MA, sementara dewan penguji terdiri dari Dr. Soesilo Zauhar MS dan Drs. Heru Ribawanto MS (Sumber Data pada lampiran 6: 4.2).

Cuplikan berita di atas telah memberitakan bahwa dalam waktu satu tahun lebih lima bulan, Bagus Permadi berhasil menyelesaikan ujian Tesis, sehingga pada

08 Februari 2006, Bagus Permadi diwisuda sebagai seorang magister administrasi publik, dengan indeks prestasi 3,96 yang karena itu dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian atau cum laude. Sebagaimana tampak pada kutipan tersebut, akhirnya nama lengkap dan gelarnya adalah Drs. KRHT Bagus Permadi, MAP.

b. Sejumlah Buku dan Karya Tulis

Pemanfaatan peran pendidikan dalam meningkatkan sumber kekuasaan seorang pejabat politik, sebuah buku baik yang ditulis oleh pejabat politik, atau yang ditulis oleh orang lain tentang seorang pejabat politik, juga dianggap bisa meningkatkan sumber kekuasaan, atau sekurang-kurangnya keterkenalan seorang pejabat politik. Sebagaimana dilakukan oleh Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menulis buku *Indonesia Unggul* (2008), dimana buku tersebut diluncurkan setelah gelar Doktor disandang oleh Susilo Bambang Yudhoyono (2004).

Kecenderungan yang sama juga didapati pada Bagus Permadi. Setelah menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ilmu administrasi publik, Bagus Permadi juga mulai menulis beberapa buku. Adapun beberapa buku yang ditulis oleh Bagus Permadi antara lain: *Wasiat Mpu Tantular*, *Merajut Masa Depan Kota Bunga*, *Di Balik Ramalan Joyoboyo*, *Menyambut Tantangan Globalisasi*, *The Rise Of The New Tumapel*, *Mari Menanam dan Merawat*, *Sekolah Seribu Bunga*, *Paradigma & Implementasi Pelayanan Publik*, dan *Membangun Demokrasi di Bumi ARESI* (Sumber Data pada lampiran 6: 4.3).

c. Gelar Pedalangan dan Album Musik Campursari

Meskipun secara kebudayaan, masyarakat Kota Singapraja memiliki tiga sub-budaya, yaitu: budaya Mataraman, budaya Arek, dan budaya Madura, ternyata wilayah ini masih cukup subur bagi berkembangnya kebudayaan atau kesenian Jawa, terutama pagelaran wayang purwo. Sebagaimana pada daerah kebudayaan Jawa lain, seorang dalang wayang purwo tidak hanya dianggap sebagai penghibur yang menyajikan tontonan, tetapi juga seorang pujangga yang memberikan tuntunan. Seorang dalang bisa menjadi semacam "pembenar" bagi *kamukten* seseorang atau sekelompok orang (partai politik) yang disajikan melalui pemilihan lakon-lakon tertentu dengan tuturan-tuturan dan penafsiran tertentu.

Seorang dalang dalam budaya Jawa dipahami pula sebagai seorang *pandhita*, seorang guru atau *begawan* yang memiliki kedalaman ilmu. Karena itu, ketika seseorang yang memiliki *kamukten* baik dalam arti sebagai raja, adipati, bupati atau kepala daerah di jaman sekarang, ternyata juga menjadi dalang, maka dirinya juga seolah-olah menjadi orang yang dalam kehidupannya penuh kearifan dan berperilaku sebagaimana prinsip "*sabda pandhita ratu*". Artinya, selain ucapannya memiliki kesaktian, tindak-tanduknya juga senantiasa sesuai dengan apa yang diucapkan dan dijanjikan.

Terhadap kedudukan dan peran dalang tersebut, tampak jelas bahwa Bagus Permadi sangat memahami betapa strategis kedudukan seorang dalang dalam kebudayaan Jawa, sehingga dia pun belajar secara sungguh-sungguh untuk bisa

menjadi dalang wayang purwo. Untuk itu, Bagus Permadi tidak mengambil pendidikan khusus, semacam sekolah atau akademi jurusan pedalangan, melainkan belajar langsung dari seorang dalang muda bernama Ardhi Purboantono. Ardhi, ketika itu, adalah seorang mahasiswa di sebuah program studi pada Fakultas Sastra dan Seni, Universitas Negeri Singaperaja. Meskipun masih muda, Ardhi tergolong dalang yang cukup baik dan kreatif, karena pernah pula membuat Wayang Sandosa, yaitu wayang sendra tari berbahasa Indonesia, yang mengantarkannya sebagai salah satu pemuda pelopor dan mendapatkan penghargaan dari Menteri Muda Urusan Pemuda.

Dalam rangka mengasah dan menunjukkan kecakapannya dalam mendalang, maka Bagus Permadi tergolong rajin menggelar acara pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Tidak hanya itu, Bagus Permadi juga senantiasa menyanggupi permintaan untuk mendalang di berbagai tempat, walaupun senantiasa dilakukan secara bersama-sama dengan dalang lain. Biasanya, Bagus Permadi mendalang pada bagian awal, yang kemudian dilanjutkan oleh dalang profesional. Tentu saja Bagus Permadi cukup laris mendalang, karena tampaknya Bagus Permadi sendiri tidak pernah meminta bayaran dari kegiatan mendalangnya, sebagaimana ketika dia menulis dan menerbitkan buku yang senantiasa dibagikan secara gratis.

Sebagai bentuk kesenian serba-matra yang memiliki sifat sangat luwes dengan begitu banyak lakon, baik yang bersifat pakem maupun carangan, wayang purwo bisa digunakan oleh siapa pun untuk menampilkan cerita yang sejalan dengan kemauan

baik yang menanggapi maupun yang mendalang. Karena itu, Bagus Permadi pun senantiasa memilih *lakon-lakon* yang secara suasana kebatinan memperkuat legitimasinya sebagai, misalnya raja yang benar dan arif bijaksana, sebagai ksatria pertama yang menerima wahyu kebenaran, kesaktian maupun pencerahan.

Gambaran tentang kegiatan pedalangan Bagus Permadi masih bisa diakses melalui internet (Periksa Lampiran 1, Gambar 4.1). Bisa dilacak misalnya, bahwa Bagus Permadi, yang kalau sedang menjadi dalang memakai nama KRMHT Bagus Permadi Hadinegoro, bersama Ki Ardhi Purboantono pernah menggelar lakon *Bima Suci* dalam Peringatan Hari Pendidikan Nasional (2010), dan menggelar lakon *Wedharing Kali Maha Husada*, yang digelar 1 Juni 2011, di halaman Kantor DPP PDIP: Jl. Lenteng Agung 99, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Kemampuan Bagus Permadi menjadi dalang wayang kulit ternyata cukup mendapat banyak pujian, dan bahkan semacam kekaguman dari para penonton maupun masyarakat Kota Singapraja secara umum.

Wakil Walikota Singapraja, Bapak Basukarno, membuka acara yang seru ini dengan beberapa sekapur sirih.

Yang mencengangkan adalah, ternyata Bapak Walikota Singapraja, Bapak Bagus Permadi jago ndalang! Itu dibuktikan dengan kepiawaiannya memainkan Gareng dan kawan-kawan di depan panggung. "Ada juga ya Walikota yang bisa ndalang".

"Waktu tau Pak Bagus Permadi yang bakal ndalang, Saya jadi bingung kalau Walikota yang ndalang, yang memberi sambutan siapa?" Kata Wakil Walikota Singapraja, Basukarno disambut tawa hadirin (Sumber Data pada lampiran 6: 4.5).

Selain membangun legitimasi kultural kekuasaan melalui kegiatan pedalangan wayang purwo, Bagus Permadi juga sering tampil sebagai penyanyi dengan merilis album campursari, yang lagu-lagunya diciptakan oleh Barep Yoga Sunar. Salah satu lagu yang cukup dikenal oleh penggemar musik dan lagu campursari adalah "Singapraja Awe-awe", yang memang dipopulerkan pertama kali oleh Bagus Permadi. Sampai sekarang, video klip lagu Singapraja Awe-awe masih bisa diunduh dari situs Youtube. Berdasarkan data Youtube, video klip ini ditonton sekurang-kurangnya oleh 1200 orang. Karena video klip yang diunggah lebih dari satu, maka bisa dipastikan bahwa yang menonton dan mengunduh lagu tersebut cukup banyak. Masih berdasarkan sosok Bagus Permadi sebagai pejabat yang berkegiatan seni, juga ada sejumlah tulisan yang mengapresiasi secara khusus karya dan penampilan Bagus Permadi dalam dunia musik campursari.

3. Sumber dan Legitimasi Kultural Kekuasaan

Sebagai orang Jawa, Bagus Permadi memahami dan benar-benar berusaha membangun legitimasi kekuasaannya berdasarkan budaya Jawa. Dalam terminologi Jawa, kekuasaan dikonseptualisasi sebagai *kamukten*, yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Senantiasa digambarkan bahwa siapapun harus tidak hanya berani berjuang untuk mendapatkan *kamukten* secara fisik, melainkan juga secara batin.

a. Gelar Bangsawan Jawa

Seseorang yang memiliki *kamukten* memiliki beberapa ciri tertentu, di antaranya berasal dari *tedhak rembesing madu*, memiliki identifikasi dengan sosok pahlawan tertentu, memiliki sifat kapujanggan, serta memiliki kedalaman ilmu yang luar biasa. Dalam rangka mendapatkan atau mengukuhkan diri sebagai sosok yang memiliki atau berhak atas *kamukten* tersebut, selain bertirakat atau lelaku, Bagus Permadi juga melakukan beberapa upaya, yang di antaranya adalah: mendapatkan dan memakai gelar priyayi atau bangsawan Jawa, mengidentifikasi diri dengan sosok heroik Ken Arok, menulis sejumlah artikel dan buku, serta belajar khusus kecakapan mendalang wayang kulit, dan ikut menjadi pelakon dalam pagelaran wayang orang dan kethoprak.

Memang bagi masyarakat awam tidak terlalu memahami bahwa secara berkala, dan bisa berdasarkan permintaan, Keraton Surakarta banyak memberikan gelar kebangsawanan kepada siapa pun, termasuk yang tidak memiliki hubungan khusus dengan pihak keraton. Karena itu, sangat banyak kepala daerah dan pejabat negara yang mendapatkan gelar kebangsawanan dari Keraton Surakarta. Pada tahun 2013, misalnya, tercatat Keraton Surakarta memberikan gelar bangsawan kepada 300 orang. Gelar yang diberikan seperti Kanjeng Raden Aryo Tumenggung (KRAT), Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Bupati Anom, Mas Ngabehi, hingga gelar Lurah.

Di antara sejumlah ratusan orang yang mendapatkan gelar kebangsawanan Jawa dari Keraton Surakarta adalah Walikota Singapraja, Bagus Permadi. Berdasarkan *kekancingan* yang dikeluarkan oleh Keraton Surakarta, maka nama lengkap beserta gelar untuk Bagus Permadi adalah Kanjeng Raden Aryo Tumenggung (KRAT) Bagus Permadi Kusumo Adinegoro. Tidak hanya itu, Bagus Permadi juga memiliki gelar bangsawan yang berasal dari Keraton Surakarta sehubungan dengan jabatannya, sehingga nama lengkap dengan gelarnya adalah Kanjeng Raden Mas Harya Tumenggung (KRMHT) Bagus Permadi Hadinegoro. Pemberian gelar ini sebenarnya tidak terlalu istimewa, karena Bupati Singapraja, Sujud Pribadi dan selanjutnya juga Kresna Murti juga mendapatkan gelar kebangsawanan, meskipun tidak berasal dari Keraton Surakarta.

Terlepas dari apakah gelar bangsawan tersebut efektif atau tidak dalam meningkatkan legitimasi kultural *kamukten* Bagus Permadi, yang jelas bahwa dengan telah dimilikinya gelar kebangsawanan tersebut, Bagus Permadi menjadi tampak lebih percaya diri untuk tidak saja berbicara tentang politik dan pemerintahan, tetapi juga berbicara tentang berbagai hal yang berhubungan dengan sejarah, kebudayaan, dan nilai-nilai budaya Jawa.

b. Identifikasi Diri dengan Ken Arok

Kendati sudah mendapatkan *kekancingan* dari Keraton Surakarta perihal derajat kebangsawanannya, Bagus Permadi masih merasa perlu untuk memperkuat legitimasi kultural *kamukten*nya berdasarkan identifikasi terhadap tokoh sejarah yang

memang lekat dengan sejarah daerah Singapraja, yaitu Ken Arok. Kekhususan yang perlu dicatat dari sosok Ken Arok adalah bahwa sebenarnya dia berasal dari kalangan rakyat biasa yang karena perjuangan dan kerja kerasnya tidak hanya berhasil menjadi seorang bangsawan tetapi juga menjadi pendiri kerajaan sekaligus raja pertama Singosari.

Memang ada perbedaan cerita dan sebutan untuk Ken Arok, baik menurut versi sejarah lisan, Serat Pararathon, maupun yang lebih belakangan menurut versi novel sejarah karya Pramudya Ananta Toer, "Arok Dedes". Dari beberapa versi tersebut, hanya dalam karya Pramudya tokoh Ken Arok digambarkan sebagai sosok berbudi baik, yang mendapatkan sebutan Garuda Nusantara karena ditetapkan oleh kaum brahmana melalui Mpu Lohgawe untuk memurnikan kembali ajaran Hindu.

Tercatat dalam sejarah dan tampak dari bukti-bukti sejarah, sejumlah raja Jawa telah mencampur-adukkan ajaran Hindu dengan sistem kepercayaan Kejawen. Digambarkan misalnya, bahwa setelah mangkat, raja-raja Kediri akan menjadi dewa sebagaimana dalam patung Dharmawangsa dan Airlangga yang senantiasa digambarkan sebagai Wisnu yang bertangan empat dan menunggangi Garuda Wisnu. Tidak hanya itu, raja-raja Jawa juga telah dianggap mencampur-adukkan ajaran Hindu dengan Budha. Karena itu, kaum brahmana Hindu mempercayakan perjuangan untuk memurnikan kembali ajaran Hindu kepada Mpu Lohgawe yang kemudian mendidik dan memerintahkan Arok sebagai Garuda Nusantara untuk menghancurkan

raja-raja Jawa yang dianggap telah mendewakan diri dan mencemari ajaran murni Hindu.

Melalui kepandaian dan perjuangan bersenjatanya, Ken Arok akhirnya berhasil mengalahkan Tunggul Ametung dan menguasai Tumapel serta mengawini Ken Dedes, bekas isteri Ametung. Dari Tumapel ini pula Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan yang berdaulat bernama Singosari. Dari perkawinannya dengan Ken Dedes, sebenarnya Ken Arok tidak mendapatkan putra, karena Anusapati sebenarnya adalah putra dari Tunggul Ametung. Sedangkan dari perkawinannya dengan Ken Umang, yang tidak lain adalah kekasih Ken Arok semasa masih muda, dia mendapatkan putra Tohjoyo. Saling berganti kemudian anak keturunan Ken Arok menjadi raja di Singosari, hingga generasi Raden Wijaya Kertarajasa yang berhasil dikalahkan oleh Kediri, tetapi kemudian berhasil mengalahkan Kediri dan kemudian mendirikan Majapahit.

Terlepas dari versi mana yang paling benar, jelas bahwa sosok Ken Arok adalah seorang rakyat biasa yang melalui perjuangan dan kepandaiannya berhasil menggapai *kamukten* dengan mendirikan kerajaan dan menjadi raja besar, yang bahkan memiliki keturunan raja-raja di Jawa. Berkenaan itu, melalui keberanian, perjuangan dan kepandaiannya, Bagus Permadi juga berasal dari kalangan rakyat biasa yang berhasil menjadi Walikota Singapraja selama dua periode. Dengan sengaja, sosok Ken Arok ini senantiasa dipilih oleh Bagus Permadi sebagai sosok idola.

Memang benar, bahwa Bagus Permadi telah berjuang sedemikian keras untuk mendapatkan *kamukten* mulai dari sekedar memimpin DPC PDI Pro Megawati yang terpinggirkan oleh penguasa Orde Baru bersama PDI Soerjadi, meninggalkan pekerjaan utamanya sebagai dosen perguruan tinggi negeri, bersaing baik dengan sesama anggota PDIP untuk memimpin, dan berhasil menjadi anggota DPR RI, serta akhirnya menjadi Walikota Singapraja. Boleh jadi, di antara keluarganya, Bagus Permadi adalah satu-satunya anggota keluarganya yang melalui perjuangan kerasnya berhasil menjadi Walikota Singapraja. Tetapi, sebagaimana Ken Arok, boleh jadi pula Bagus Permadi berharap menjadi perintis jalan atau leluhur bagi keluarga besarnya untuk juga menjadi Walikota Singapraja.

Secara empiris dapat disebutkan beberapa upaya yang dilakukan Bagus Permadi untuk mengidentifikasi dirinya sebagaimana capaian hidup Ken Arok seperti yang telah dituliskan di atas. Dua di antaranya adalah: (1) membangun Gedung Olah Raga (GOR) Ken Arok, dan (2) mengubah Julukan Tim Sepak Bola Persesi, dari Bledek Biru menjadi Laskar Ken Arok.

GOR Ken Arok merupakan satu-satunya Gedung Olah Raga bertipe A di Jawa Timur. Gedung Olah Raga yang dibangun dengan dana sekitar Rp 25 (dua puluh lima) milyar ini menempati lahan 44.300 meter, dengan kapasitas lima ribu hingga tujuh ribu limaratus orang. Sebagai GOR tipe A, rancangan GOR Ken Arok memiliki fasilitas ruang dalam (*indoor*), yang mendukung jenis olahraga seperti voli, tinju, basket, aerobik, bulu tangkis, dan tenis meja. Selain itu, juga ada fasilitas

penunjang seperti ruang pijat, pemanasan, loker, ruang ganti atlet dan pelatih, serta fasilitas lainnya. Rancangan fasilitas luar gedung (*outdoor*) mencakup fasilitas untuk olahraga sepakbola, voli, basket dan atletik. Sedangkan rancangan fasilitas luar ruangan lain yang berupa jalan ganda memutar di luar gedung bisa digunakan untuk sirkuit balap sepeda motor *drag race* dan *road race*.

Sesuai dengan tokoh idola yang kepadanya Bagus Permadi mengidentifikasi diri, maka GOR di Kota Singapraja yang ketika itu sedang direncanakan diberi nama GOR Ken Arok oleh Bagus Permadi selaku Walikota Singapraja. Karena kisah yang beredar dan dipahami oleh masyarakat Kota Singapraja, dan bahkan umumnya masyarakat Jawa, bahwa Ken Arok merupakan tokoh sejarah yang dianggap memiliki ciri-ciri preman dan senang melakukan kekerasan, maka rencana pemberian nama GOR Ken Arok pun menuai keberatan dari sejumlah warga masyarakat.

Berbeda pendapat dari masyarakat yang mengajukan keberatan, Bagus Permadi berpendapat bahwa Ken Arok adalah justru tokoh yang patut diteladani perjuangan dan prestasinya. Ken Arok adalah sosok rakyat kecil dari kasta sudra yang memiliki kesediaan belajar dan semangat juang tinggi untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, hingga akhirnya berhasil mendirikan kerajaan dan menjadi Raja Singosari. Semangat memperbaiki nasib dengan berjuang memenangkan setiap persaingan dan pertempuran ini pula yang oleh Bagus Permadi ingin dihayati oleh siapa pun yang berlaga di GOR Ken Arok. Lebih dari itu, Ken Arok adalah jelas-jelas

seorang tokoh sejarah yang sama sekali tidak pernah bisa dilepaskan dari kawasan Singapraja Raya. Ken Arok, Singosari dan Kota Singapraja adalah nama-nama yang saling berkaitan membentuk satu kesatuan.

Sebagai penghayat ajaran Kejawen, Bagus Permadi pun mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan GOR Ken Arok menurut kepercayaannya, termasuk ketika menempatkan patung besar Ken Arok di halaman depan GOR Ken Arok. Mengawali pembangunan patung Ken Arok yang terletak di tengah atrium halaman depan GOR Ken Arok, diadakan ritual *buka bumi*, yaitu membuka tanah dengan cangkul untuk peletakan batu pertama agar pembangunan berjalan lancar, telah disiapkan *umbo rampe* atau perlengkapan upacara menurut kepercayaan Jawa, berupa nasi tumpeng lengkap, *bubur sengkolo*, *cok bakal*, *polo pendem*, sejumlah keris pusaka dan juga dupa (*joshua*).

Patung Ken Arok yang diletakkan di halaman depan GOR itu sendiri, memiliki ukuran cukup besar, dengan bentuk proporsional setinggi lima meter. Patung yang menyerupai sosok Gadjahmada, tetapi dengan raut wajah yang berbeda, digambarkan memiliki badan tegap layaknya seorang pemimpin perang. Penokohnya tidak digambarkan, misalnya, layaknya seorang raja, melainkan seorang pejuang (Periksa Lampiran 1, Gambar 4.2).

Telah disebutkan, nama Ken Arok juga digunakan oleh Bagus Permadi untuk tim sepakbola yang menjadi binaan Pemerintah Kota Singapraja, yaitu Persesi. Selain klub sepakbola Aresi, yang merupakan milik Yayasan Aresi Indonesia, di wilayah

Singapraja Raya memang ada satu lagi klub sepakbola yang ikut dalam kompetisi sepakbola profesional, yaitu Persesi. Persesi semula adalah sebuah klub sepakbola daerah, sebagaimana pada setiap daerah juga memilikinya. Juga seperti klub sepakbola daerah lainnya, Persesi juga mendapatkan pendanaan utama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun demikian, tidak jelas atas prakarsa siapa, Persesi akhirnya menerjuni pertandingan sepakbola profesional. Sebagaimana klub sepakbola profesional, Persesi pun tidak lagi mengandalkan semata-mata dari pemain dari warga Kota Singapraja, melainkan para pemain profesional baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketika itu memang banyak kritikan dari masyarakat, karena dianggap tidak memiliki dasar hukum sama sekali apabila anggaran pemerintah daerah digunakan untuk membayari para pemain sepakbola profesional, yang mencari penghasilan dari bermain sepakbola, baik dari dalam negeri maupun terutama dari luar negeri.

Mempertimbangkan penggunaan tidak semestinya dari anggaran pemerintah daerah tersebut, akhirnya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011, penggunaan APBD untuk sepak bola profesional resmi dilarang. Ketika belum secara efektif diberlakukan larangan tersebut, sangat tampak bahwa Bagus Permadi tetap mendukung dan menyetujui penggunaan APBD untuk pembiayaan sepak bola profesional, melalui Persesi. Kedudukan Walikota Singapraja dalam struktur organisasi Persesi adalah sebagai Pembina.

Menurut sejumlah wartawan, kehendak Bagus Permadi untuk tetap menggunakan dana APBD adalah karena anggaran pembinaan olahraga sepakbola merupakan anggaran yang paling mudah dimainkan. Dengan ungkapan lain, anggaran pembinaan sepakbola termasuk mata anggaran yang paling mudah dikosupsi dan dimanipulasi.

Ketika larangan tersebut mulai efektif, dengan segera Bagus Permadi mengalihkan keanggotaan klub Persesi, dari yang semula ikut ISL, menjadi ikut LPI (IPL). Kesertaan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup Persesi pasca penghapusan anggaran dari APBD. Namun demikian, karena akhirnya IPL juga dibubarkan oleh PSSI, dan Persesi mengalami degradasi sehingga tidak bisa ikut dalam kompetisi Divisi Utama, maka akhirnya Persesi pun dibubarkan sejak Oktober 2013.

Kisah Persesi ini menjadi menarik karena juga digunakan oleh Bagus Permadi untuk mempertegas pencitraan dirinya sebagai Ken Arok baru, yang mendirikan Tumapel Baru. Ini sesuai dengan salah satu bukunya yang berjudul "*The Rise of New Tumapel*". Sebenarnya agak janggal juga kalau Bagus Permadi mengidentikkan dirinya dengan Ken Arok yang memiliki tugas dan melaksanakan tugas dari kaum Brahmana untuk menghancurkan Kediri, karena Bagus Permadi sebenarnya justru kelahiran Kediri.

Bagus Permadi memiliki kepercayaan besar pada *tuah* Ken Arok, sehingga ketika menjadi Pembina Persesi, dengan segera Bagus Permadi mengubah nama

julukan bagi skuad Persesi, dari yang semula dikenal sebagai tim *Bledhek Biru*, akhirnya harus menyandang nama baru, yaitu: Laskar Ken Arok. Seperti pernah dikemukakan oleh Bagus Permadi saat Persesi berhasil memenangkan pertandingan, *menangan* dalam setiap pertempura dan pertarungan adalah salah satu ciri Ken Arok. Karena itu, dia pun berharap, dengan memberikan nama skuad Persesi sebagai Laskar Ken Arok, diharapkan Persesi juga senantiasa menang dalam setiap pertandingan.

Ada satu lagi hal yang menguatkan identifikasi bahwa Bagus Permadi sangat terpengaruh oleh sosok Ken Arok dapat dilihat di pada media center resmi milik Dinas Kominfo Kota Singapraja, di mana media center tersebut memilih menggunakan nama Ken Dedes sebagai media pusat informasi dan komunikasi Publik Kota Singapraja tersebut. Media center Kendedes Kota Singapraja yang merupakan sarana informasi dan komunikasi yang disediakan Pemerintah Kota Singapraja Kepada masyarakat beralamat di perkantoran terpadu, Gedung A Lantai 4. Media center tersebut memang sangat fungsional, karena segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, termasuk apda waktu itu segala sesuatu yang berkaitan dengan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk meningkatkan popularitas dan meningkatkan elektabilitas Wara Srikandi, sekaligus memfasilitasi Bagus Permadi dalam menyelenggarakan komunikasi politiknya. Berikut adalah contoh *lay-out* situs Media Cente Kendedes (Periksa Lampiran 1, Gambar 4.3).

B. Kekuasaan Relasional Aktor Politik Nepos

Wara Srikandi adalah isteri Bagus Permadi. Ketika memulai karir sebagai dosen salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Kota Singapraja, Wara Srikandi masih bergelar Sarjana Pendidikan Ekonomi, yang dia peroleh dari IKIP Singapraja. Bersama Bagus Permadi, kemudian Wara Srikandi melanjutkan pendidikan pascasarjana dan sama-sama memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (MAP) dari Universitas Maharaja.

Berdasarkan penilaian Rektor IBUraja, sebagai pribadi Wara Srikandi dikenal ramah dan baik. Juga dikemukakan, justru karena memiliki kepribadian baik itu, Wara Srikandi termasuk mudah percaya kepada siapa saja. Kecenderungan ini yang kemudian sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat memetik keuntungan dari Wara Srikandi. Berkenaan dengan kecakapannya, Nur Kholis, rektor salah satu perguruan tinggi swasta di Singapraja mengemukakan bahwa kompetensi Wara Srikandi tergolong biasa saja.

Latar belakang pendidikan dan jiwanya Bu Wara memang bukan politikus. Dari segi ilmu politik, juga memang bukan orang yang secara akademis untuk mengerti bagaimana melakukannya. Dari semua sisi, dibanding calon-calon walikota yang lain, kapabilitas Bu Wara bisa digolongkan biasa saja, tidak terkesan tepat menjadi walikota. Orangnyanya memang baik, sangat sosial. Lha kesalahan Bu Wara adalah dia terlalu percaya pada siapa saja. Nggak cocok jadi politikus.

Dibanding calon-calon yang lain, Bu Wara tergolong biasa. Bukan bukan *excellent* yang cocok jadi walikota. Apalagi perempuan, kan ada kendala-kendala baik kultural, biologis dan lainnya?

Tentang kapabilitas politik, meskipun Bu Wara pengurus partai, tetapi pada dasarnya bukan politikus. Yang politikus itu Pak Bagus, sedangkan Bu Wara

hanya mengikuti kegiatan-kegiatan Pak Bagus sebagai politikus karena kebetulan dia menjadi isterinya (Sumber Data pada Lampiran 6: 4.8).

Berdasarkan uraian dan informasi tersebut bisa disimpulkan bahwa Wara Srikandi berbeda dari Bagus Permadi, terutama berkenaan dengan kekuasaan potensial yang dimiliki. Apabila Wara Srikandi kemudian tampak memiliki pengaruh besar terhadap massa, pengaruh besar tersebut sangat bergantung pada relasinya dengan Bagus Permadi. Karena itu, pembahasan tentang pengaruh Wara Srikandi tidak bisa dilepaskan dari berbagai organisasi yang karena relasinya dengan Bagus Permadi dipercayakan kepadanya. Organisasi-organisasi ini, terutama adalah organisasi yang oleh Eldrich (1992) digolongkan sebagai *Non-governmental Organization initiated by Governmental Organization* (NGOGO).

Dalam kaitannya dengan usaha untuk menjadikan isterinya sebagai politisi yang akan mengikuti Pemilu, Bagus Permadi memberikan peluang sangat besar kepada Wara Srikandi. Berbeda dari kebiasaannya ketika menjabat pada periode pertama, misalnya, saat Bagus Permadi menjabat Walikota Singapraja periode kedua, semakin sering isterinya ditampilkan di ruang-ruang publik. Bentuknya tidak hanya berupa pemberian kesempatan untuk mewakili peresmian berbagai proyek atau program pembangunan, tetapi juga menampilkannya dalam bentuk baliho, poster dan spanduk. Karena itu, masyarakat pun sudah mulai memahami bahwa Bagus Permadi sedang mempersiapkan Wara Srikandi untuk bersaing dalam pemilihan kepala daerah dan diharapkan menggantikannya sebagai Walikota Singapraja.

Selain menampilkan isterinya dalam kegiatan dan ruang publik, Bagus Permadi juga ikut ambil bagian dalam menempatkan isterinya sebagai pemimpin berbagai lembaga atau organisasi sosial. Adapun beberapa sarana kelembagaan *Non-governmental Organization initiated by Governmental Organization* yang dimanfaatkan Bagus Permadi untuk mendudukan istrinya (baik kedudukan yang sifatnya *ex-officio* maupun yang bukan) sebagai ketua adalah PKK, Dharmawanita, Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA), dan Bank Sampah Singapraja (BSS).

1. Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Organisasi PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) merupakan organisasi sosial bentukan pemerintah, yang memiliki struktur dari Pusat hingga tingkat RT. Keberadaan organisasi PKK senantiasa melekat pada seluruh jenjang pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Untuk mendukung program dan kegiatan PKK, secara otomatis isteri menteri dalam negeri, gubernur, bupati, walikota, camat, kepala desa, kepala kelurahan, kepala dusun, ketua RW, hingga isteri ketua RT senantiasa menjadi pimpinan organisasi PKK pada jenjang yang bersangkutan.

Secara otomatis isteri menteri dalam negeri adalah Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Nasional, isteri gubernur adalah Ketua TP PKK Provinsi, isteri bupati adalah Ketua TP PKK Kabupaten, isteri walikota adalah Ketua TP PKK Kota, isteri camat adalah Ketua TP PKK Kecamatan, isteri kepala desa adalah ketua TP PKK desa, isteri kepala kelurahan adalah ketua TP PKK Kelurahan, isteri kepala dusun

adalah Ketua TP PKK Dusun, isteri Ketua RW adalah ketua PKK RW, dan isteri ketua RT adalah ketua PKK RT.

Dicermati berdasarkan jenjang dan cakupan wilayahnya, maka organisasi PKK bisa dikategorikan sebagai organisasi sosial bentukan pemerintah yang memiliki jaringan terluas --- dalam arti mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia --- dan memiliki jenjang terlengkap --- dalam arti ada dari tingkat RT hingga tingkat Nasional. Lebih luar biasa lagi, keanggotaan PKK bersifat inklusif dan otomatis, bahwa setiap keluarga, yang memiliki anggota keluarga perempuan, dengan sendirinya menjadi anggota PKK. Karena itu, baik dari perspektif pembangunan maupun politik, PKK merupakan wahana keorganisasian yang sangat potensial, baik untuk kepentingan pembangunan maupun untuk kepentingan perjuangan politik, atau perjuangan untuk mendapatkan, mempertahankan, menggunakan dan mengendalikan kekuasaan.

PKK sendiri sepertinya telah diposisikan sebagai kepanjangan dari pembinaan ketahanan Keluarga yang mempunyai misi kedepan sebagai motor dari gerakan ibu-ibu pendamping suami untuk mencapai kemuliaan keluarga. Tolok ukur dari kemuliaan keluarga adalah terwujudnya keluarga sejahtera lahir dan batin yang kemudian dioperasionalisasikan dengan pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga (fungsi keagamaan, social budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan juga fungsi pembinaan lingkungan).

PKK secara nasional memiliki 10 (sepuluh) program pokok yakni: (1) Penghayatan dan pengamalan Pancasila; (2) Gotong royong; (3) Pangan; (4)

Sandang; (5) Perumahan dan tata laksana rumah tangga; (6) Pendidikan dan ketrampilan; (7) Kesehatan; (8) Pengembangan kehidupan koperasi; (9) Kelestarian lingkungan hidup; (10) Perencanaan sehat. Sepuluh program tersebut ditangani oleh empat kelompok kerja (Pokja).

Pokja Satu membidangi: *Pertama*, Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, diantaranya: pembinaan keluarga sakinah dan kelompok keagamaan; meningkatkan pembinaan anak dan remaja sejak dini dalam bidang mental, moral, agama, budipekerti dan sopan santun dalam keluarga; pembinaan anak dan remaja dalam keluarga serta pemantapan BKR; sosialisasi wawasan kebangsaan, pembauran, bangsa, hak demokrasi, politik dan pengarusutamaan gender melalui kegiatan simulasi bebaran wawasan kebangsaan dan bebaran gender; memberdayakan kesadaran hukum dan meningkatkan pengetahuan keluarga, antara lain : HAM, KHA, PKDRT, trafficking, perlindungan anak dan narkoba; *Kedua*, Gotong Royong, diantaranya: memasyarakatkan kepedulian terhadap lanjut usia; meningkatkan kesadaran hidup bergotong-royong, kesetiakawanan social, ketertiban dan keamanan lingkungan dan tempat-tempat persembahyangan; bantuan sosial dan bencana alam; mengadakan latihan kader bekerjasama dengan Pokja II; menyelenggarakan posyandu lansia bekerjasama dengan Pokja IV; mendorong lanjut usia dalam menjaga kesehatan, hobi dan ketrampilan sesuai kemampuan fisik masing-masing secara baik serta melakukan kegiatan olah raga, keagamaan, rekreasi, membuat kerajinan tangan dan lain-lain.

Kelompok Kerja Dua membidangi: *Pertama*: Pendidikan dan ketrampilan. Diantaranya: mengikuti pelatihan kader tenaga pendidik Pos PAUD; mengikuti pelatihan tenaga TBM (taman bacaan masyarakat) sudut baca; pembinaan pengelola Pos PAUD; monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PAUD; meyelenggarakan kegiatan promosi hasil ketrampilan UP2K – PKK saat lomba-lomba dan pameran hasil UP2K – PKK dan mengikuti program keaksaraan fungsional bekerjasama dengan Dinas Pendidikan; *Kedua*, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Salah satu kegiatan pengembangan kehidupan berkoperasi adalah Pelaksanaan UP2K – PKK yang modalnya diberikan Pemerintah Pusat. Kelompok yang mengelola UP2K – PKK disebut dengan kelompok khusus (POKSUS) UP2K – PKK dan peminjam adalah ibu-ibu yang memiliki usaha yang disebut dengan kelompok pelaksana. Tujuan UP2K – PKK adalah agar ibu-ibu dapat meminjam uang dengan cepat dan mudah serta dengan biaya yang rendah.

Kelompok kerja Tiga membidangi: *Pertama*, pangan, yang menangani: pemanfaatan lahan pekarangan; gerakan ketahanan pangan dengan penganekaragaman pangan keluarga; pembinaan kelompok wanita tani; mengikuti gerakan perempuan tanam danelihara pohon; mengikuti lomba lomba, dan lain sebagainya; *Kedua*, Sandang, yang meliputi: pembinaan penyuluhan dibidang sandang; melaksanakan lomba busana anak-anak TK, SD dan SLTP dalam rangka membudayakan khas daerah; *Ketiga*, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, yang meliputi: pembinaan pengelolaan sampah; pembinaan saat persiapan lomba

tingkat propinsi di kelurahan purnama tentang pemanfaatan tanaman obat keluarga (toga) sebagai apotik hidup setiap kepala keluarga.

Kelompok Kerja Empat membidangi *Pertama*, program kesehatan. Program kesehatan dilaksanakan melalui: RW siaga; Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK); sosialisasi keluarga sadar gizi; Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); pembinaan Posyandu model; monitoring dan evaluasi Pos Pembinaan Terpadu Lanjut Usia (Posbindu Lansia); mengikuti pelaksanaan program keluarga berencana; mengikuti sosialisasi campak; pelatihan bagi kelompok remaja; penyuluhan tentang penyakit *degenerative*; penyuluhan tentang penyakit berbasis lingkungan dan perilaku; penyuluhan tentang lima imunisasi lengkap; penyuluhan tentang bahaya kehamilan, nifas dan bersalin; penyuluhan tentang bahaya narkoba; serta mengikuti pertemuan wilayah Kelompok Kerja Operasional Demam Berdarah (Pokjanal DBD); *Kedua*, Kelestarian Lingkungan Hidup, meliputi: Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tatanan rumah; Mengikuti lomba PHBS; Mengikuti lomba lingkungan bersih dan sehat; Pembuatan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL); Pemanfaatan lahan dan pekarangan dengan menanam tanaman yang bermanfaat dalam rangka penghijauan; Pemanfaatan lingkungan yang asri; dan Penanaman pohon-pohon peneduh; *Ketiga*, Perencanaan sehat, diantaranya adalah: Pelaksanaan kesatuan gerak PKK dan Mengikuti peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas); dan *Keempat*, Penanaman pohon-pohon peneduh, diantaranya mencakup: penyuluhan bagi remaja yang produktif; penyuluhan keluarga berencana; pembentukan kelompok yang

memanfaatkan tabulin; pembentukan kelompok dana sehat; menyarankan penanaman tanaman keras yang bermanfaat; serta membiasakan membuat perencanaan untuk kebutuhan rutin, bulan dan sehari-hari dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran keluarga

Melihat betapa luas dan strategis jangkauan PKK untuk dimanfaatkan sebagai mesin politik dengan jaringan yang cukup mengakar (pembinaan dasa wisma) menjadikan organisasi ini begitu diminati oleh pimpinan daerah. Dengan berorientasi sebagai organisasi pendukung pemerintah melalui beberapa program yang cenderung bersifat fungsional dan langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti pembinaan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kewirausahaan dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang sangat mendukung untuk meningkatkan popularitas dan mungkin juga elektabilitas seseorang.

Keimpulan sementara bahwa sejak awal masa jabatan kedua Bagus Permadi sudah tampak mempersiapkan isterinya untuk maju dalam Pemilukada, tidak hanya bisa ditengarai berdasarkan kebijakan dan perilakunya, tetapi juga dikuatkan oleh hasil wawancara penulis dengan mantan Sekretaris Kota Singapraja, yang mendampingi Bagus Permadi saat menjabat Walikota Singapraja periode pertama dan awal periode kedua, yaitu: Cahya.

Waktu itu Pak Bagus Permadi memang tidak secara eksplisit mengatakan, tapi memang sejak terpilih lagi menjadi walikota, Pak Bagus Permadi mulai memunculkan Bu Bagus Permadi, baik di dalam acara-acara pemerintahan hingga beberapa iklan layanan masyarakat yang ada di baliho-baliho yang

tersebar di seluruh penjuru Kota Singapraja (Sumber Data pada lampiran 6: 4.9)

Memang jalinan kerjasama antara pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Singapraja dengan lembaga-lembaga lain, baik lembaga publik maupun organisasi kemasyarakatan lainnya, sangat mungkin dan sah dilakukan secara hukum. Namun, yang menjadi persoalan adalah apabila kerjasama tersebut diberitakan secara besar-besaran di berbagai media massa dengan memasukkan pesan-pesan yang bertujuan mempopulerkan istri Walikota Singapraja, Wara Srikandi. Pelanggaran yang jelas adalah bahwa upaya mempopulerkan Wara Srikandi dilakukan dengan menggunakan anggaran dan fasilitas publik.

Dalam kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Bagus Permadi telah mempersiapkan istrinya untuk menggantikan kedudukannya sebagai Walikota Singapraja, bahkan sejak awal masa jabatan periode kedua Bagus Permadi. Berikut ini adalah beberapa data dan informasi yang mendukung kesimpulan sementara tersebut.

Tanggal 06 maret 2011, selaku ketua TP PKK Kota Singapraja, Wara Srikandi melaksanakan kegiatan senam tahes dan pengobatan gratis yang digelar rutin setiap hari Minggu bergilir di semua kelurahan di Kota Singapraja. Melalui kegiatan hendak dibangun citra Wara Srikandi sebagai sosok seorang ibu bagi seluruh warga Kota Singapraja. Bunda WS, demikian dengan sengaja Wara Srikandi mempopulerkan diri, dicitrakan sebagai sosok seorang ibu yang peduli pada kesehatan warga Kota

Singapraja. Kegiatan senam sehat dan pengobatan gratis yang mengerahkan para dokter PNS ini biasanya juga disertai dengan hiburan, yang biasanya berupa musik dangdut (Sumber Data 4.10).

Tanggal 8 Juli 2012, Pemerintah Kota Singapraja menyelenggarakan acara Jalan Sehat Lunas PBB di wilayah Kecamatan Klojen, Kota Singapraja untuk kali ketiganya. Kepanitiaan acara ini diketuai oleh Rinawati, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Dispenda Kota Singapraja. Selaku Ketua TP PKK Kota Singapraja, Wara Srikandi mendapat kehormatan menyerahkan hadiah satu unit sepeda motor kepada pemenang. Acara ini diikuti oleh sekitar 74 ribu warga Kota Singapraja. Bila dibandingkan dengan acara yang sama pada tahun sebelumnya, jumlah peserta tersebut tampak jauh lebih besar, karena acara Jalan Sehat Lunas PBB yang dilaksanakan tahun 2011, diikuti oleh 40 ribu orang peserta. Menurut Ketua Panitia, kehormatan untuk menyerahkan hadiah sepeda motor kepada pemenang memang diberikan kepada Wara Srikandi selaku Ketua TP PKK Kota Singapraja, karena PKK dinilai sangat berjasa terhadap keberhasilan upaya Pemerintah Kota Singapraja dalam meningkatkan kesadaran warga Kota Singapraja untuk melunasi PBB tepat waktu.

Keberhasilan PKK dalam meningkatkan penerimaan PBB Kota Singapraja, sebagaimana diakui oleh salah satu panitia, Umayyah sebagai berikut:

Target pendapatan pajak Pemkot Singapraja hingga akhir tahun 2012 ini sebesar Rp 39,4 miliar, dan hingga bulan Juli ini sudah tercapai Rp 17,8 miliar. "Hingga akhir Desember 2012, kami optimis target itu akan tercapai

100 persen. Berdasarkan tahun kemarin, pada bulan November kami sudah mencapai target. Jadi untuk tahun ini, kami juga yakin sebelum Desember juga sudah mencapai target tersebut.
(Sumber Data pada lampiran 6: 4.11).

Pengakuan akan keberhasilan PKK dalam meningkatkan penerimaan PBB Kota Singapraja juga dimanfaatkan untuk meningkatkan popularitas Wara Srikandi selaku Ketua TP PKK Kota Singapraja. Dalam pemberitaan, Wara Srikandi tampak disejajarkan dengan Wakil Walikota Singapraja, Basukarno. Ini dilakukan dengan tidak hanya memberitakan secara tertulis, tetapi juga menampilkan sebuah foto cukup besar yang menampilkan Ketua TP PKK Wara Srikandi bersama Basukarno yang didampingi oleh Kepala Dinas Pendapatan Mardioko pada hari Rabu, 30 Januari 2013 dan bertempat di Balai Kota Singapraja. Ketika itu, sebagaimana disampaikan oleh Mardioko selaku Kepala Dispenda Kota Singapraja, Pemerintah Kota Singapraja telah mencetak SPPT, STTS dan DAKP sebanyak 757 lembar dengan target pajak Rp 43 miliar untuk tahun, (Periksa Lampiran 1, Gambar 4.4)

Tanggal 10 Desember 2012, selaku Ketua TP PKK Kota Singapraja, Wara Srikandi diberitakan menggerakkan PKK untuk mendukung program Tri Bina Cita Kota Singapraja. Program Tri Bina Cita Kota Singapraja sebenarnya merupakan program yang telah dicanangkan untuk Kota Singapraja sejak kepemimpinan Walikota Sugiyono (1973-1983). Pembangunan Kota Singapraja, menurut Tri Bina Cita Kota Singapraja, diarahkan untuk menjadikannya sebagai Kota Pendidikan, Kota Pariwisata dan Kota Industri.

Bentuk program PKK yang disebut sebagai bagian dari upaya menuju Tri Bina Cita Kota Singapraja adalah membuat dan menyelenggarakan rumah belajar. Berkenaan dengan bidang pariwisata, Wara Srikandi juga diberitakan menggali dan mengembangkan berbagai ragam kesenian seperti seni tari, musik, lukis, dan lain sebagainya, serta mengadakan pelatihan secara gratis bagi siapapun yang berminat belajar, yang diselenggarakan di Jalan Pandan No 5 Kota Singapraja. Selanjutnya, agak menyimpang dari konsep Tri Bina Cita, Wara Srikandi juga menggiatkan upaya menjadikan Kota Kota Singapraja sebagai Kota Sehat. Untuk itu, Ketua TP PKK Kota Singapraja menjalin bekerjasama dengan mahasiswa kedokteran di Singapraja dalam rangka melaksanakan Program Sehat Ala Bunda. Program ini bertujuan mengajak masyarakat membiasakan diri mengonsumsi buah dan sayur, yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan, Balai Rukun Warga, serta di tingkat Rukun Tetangga di seluruh wilayah Kota Singapraja.

Pada hari Sabtu, tanggal 3 Maret 2012, Ketua TP PKK menggelar acara bersama Dinas Komunikasi dan Informasi. Bentuk kegiatan bersama ini adalah Pelatihan bagi Guru SD/MI yang bertempat di Telecenter Daragati, Kedungkandang, Kota Singapraja. Sebagaimana dikemukakan oleh Wara Srikandi, melalui program ini, para guru SD/MI dilatih mengoperasikan *Microsoft Office* dan menggunakan internet secara sehat serta aman.

Dalam sebuah pemberitaan *on line* disebutkan bahwa salah seorang peserta yang berprofesi sebagai guru dari MI Tarbiyatul Huda mengatakan bahwa pelatihan

itu sangat bermanfaat baginya untuk mengerjakan tugas sekolah, serta bisa diajarkan kepada anak didiknya. Demikian pula sebagaimana disampaikan peserta lainnya, Imro'Atul.

Tidak hanya gratis, pelatihan ini juga banyak memberikan manfaat bagi saya dan mungkin juga bagi rekan seprofesi demi meningkatkan skill dan kemampuan dalam penggunaan *Microsoft Office*. (Sumber Data pada lampiran 6: 4.13).

Memang tidak hanya Media Center yang digunakan sebagai alat penyebaran berita-berita keberhasilan, kebaikan dan kecemerlangan sosok Wara Srikandi. Namun demikian, penjejukan terhadap sejumlah berita *on line* tersebut, menunjukkan bahwa salah satu mesin virtual popularitas Wara Srikandi adalah Media Center Kota Singapraja. Media Center sendiri, sebenarnya adalah situs internet milik Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Singapraja. Hampir bisa dipastikan bahwa seluruh pemberitaan tentang Wara Srikandi yang secara persentase sangat dominan, senantiasa memberitakan berbagai sisi positif tentang Wara Srikandi.

Belakangan, sebagaimana dituturkan oleh seorang wartawan, Muhammad Taufik, penggunaan sekaligus kegagalan Media Center untuk membangun popularitas Wara Srikandi, telah menimbulkan efek pukul rata terhadap semua media massa. Pada intinya, kegagalan tersebut telah menyebarkan sikap tak percaya masyarakat terhadap media massa (Sumber Data pada lampiran 6: 4.14).

2. Organisasi Dharma Wanita Kota Singapraja (DWKS)

Menurut sejarahnya, Dharma Wanita merupakan organisasi bagi para isteri pegawai negeri sipil yang didirikan oleh Ibu Tien Soeharto pada tahun 1974. Lembaga ini mengalami perubahan nama menjadi Dharma Wanita Persatuan – karena waktu itu terjadi instabilitas di Indonesia pada tahun 1997 – pada tahun 1998. Adapun Visi dari Dharma Wanita Persatuan adalah menjadi organisasi istri pegawai negeri yang kukuh, bersatu, dan mandiri. Sedangkan Dharma Wanita mempunyai misi menjejahterakan anggotanya melalui bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya secara demokratis.

Setiap Anggaran Dasar Dharma Wanita Persatuan, Keanggotaan dari Dharma Wanita Persatuan dapat dibedakan menjadi anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan. Secara umum, keanggotaan Dharma Wanita dimungkinkan karena yang bersangkutan adalah isteri pegawai negeri sipil atau isteri pensiunan pegawai negeri sipil, isteri pegawai Badan Usaha Milik Negera (BUMN), isteri pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), isteri kepala daerah, isteri wakil kepala daerah, juga isteri anggota TNI atau POLRI yang ditugaskan pada instansi pemerintahan sipil. Selain itu ada sejumlah anggota luar biasa, di antaranya isteri menteri, isteri gubernur dan wakil gubernur, isteri bupati dan isteri walikota, isteri wakil bupati dan isteri wakil walikota, isteri pemimpin BUMN dan BUMD yang belum berstatus persero dan berasal dari partai politik, isteri pemimpin BUMN dan BUMD yang sudah berstatus persero, isteri pemimpin BHMN, PND perempuan dan pensiunan

PNS perempuan, serta anggota kehormatan yang berasal dari Istri ketua MPR, istri ketua DPR, istri ketua BPK, istri ketua MA, istri ketua DPD, dan mantan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan.

Berdasarkan asal-usul keanggotaan Dharma Wanita, dapat disimpulkan bahwa organisasi ini merupakan organisasi keanggotaannya bersifat terbatas. Dharma Wanita (Persatuan) adalah organisasi terbatas dan memiliki hubungan dekat baik dengan pejabat publik maupun sumberdaya publik. Karena itu, organisasi ini juga sangat berpotensi untuk digunakan sebagai sarana praktik politik nepotisme.

Mencermati struktur organisasi dan latar belakang keanggotaan yang bersifat eksklusif dan mengikat tersebut, ada kecenderungan bahwa pengaruh pimpinan Dharma Wanita tidak hanya sampai pada para anggotanya, tetapi juga para suami anggota Dharma Wanita. Melalui jalur birokrasi, Walikota Singapraja Bagus Permadi bisa mempengaruhi para pejabat dan pegawai daerah Kota Singapraja secara langsung, sedangkan melalui Dharma Wanita, Wara Srikandi bisa mempengaruhi baik isteri maupun suami mereka, yang tidak lain adalah para pejabat dan pegawai daerah Kota Singapraja secara tidak langsung.

Lazimnya, bila yang menjadi pegawai negeri sipil adalah perempuan, maka secara otomatis pegawai negeri sipil perempuan ini juga akan menjadi anggota Dharma Wanita. Berkenaan dengan pengaruh ketua Dharma Wanita, Wara Srikandi, salah satu anggota Dharma Wanita yang bersatus sebagai pegawai negeri sipil menuturkan:

Ya memang kadang-kadang ada sentilan kepada para isteri pejabat, misalnya isteri kepala dinas, isteri camat, atau isteri lurah, yang diberikan oleh Bu Bagus Permadi. Halus, tetapi arahnya jelas, misalnya agar para isteri ikut menjaga loyalitas suami masing-masing kepada atasannya. Ya tentunya yang dimaksud atasannya adalah Walikota Singapraja, Pak Bagus Permadi. "Ya kita harus saling menjaga, saling tahu sama tahu. Karena siapa suami kita bisa diangkat menjadi kepala". Begitu saja sudah jelas (Sumber Data pada lampiran 6: 4.15).

Dari anggota Dharma Wanita yang berstatus pegawai negeri sipil itu pula, peneliti mendapatkan sejumlah alat kampanye yang menurutnya harus disebarakan tidak hanya untuk diri sendiri dan keluarganya, tetapi juga kepada warga masyarakat di tempat kerja dan tempat tinggal masing-masing. Alat kampanye tersebut antara lain berupa fulpen bergambar Wara Srikandi, kaos bergambar Wara Srikandi, kain batik untuk baju dengan pesan berupa kertas bertulisan dan bergambar.

Dari seluruh data dan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dharma Wanita merupakan organisasi kewanitaan yang bisa dimanfaatkan oleh ketuanya untuk mempengaruhi para anggota dan yang berhubungan dengan anggotanya, agar dalam Pemilihan Kepala Daerah memberikan suara kepada Wara Srikandi. Organisasi juga ini memiliki arti strategis, karena bisa digunakan dan digerakkan mendahului semua bakal calon walikota lain. Jadi, dengan menggunakan Dharma Wanita seorang bakal calon walikota bisa melakukan kampanye lebih awal dibanding bakal calon walikota yang lain.

3. Organisasi Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA)

Meskipun Pemerintah Kota Singapraja menyediakan anggaran untuk pembebasan biaya sekolah – yang peruntukannya sebagai Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) – namun ketersediaan tersebut tidak akan mempengaruhi peran penting GNOTA. Menurut Achmad Taufiq Bambang DHT, Sekretaris komisi D DPRD Kota Singapraja, dengan adanya tambahan dana operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan SPP gratis, bukan berarti peran GNOTA yang sekarang menjadi Gerakan membantu Anak Asuh (GEMMA) ditiadakan, karena kebutuhan siswa bukan hanya SPP, melainkan juga sarana-sarana penunjang lainnya seperti buku paket, buku tulis, seragam dan lain sebagainya. Justru jenis-jenis pengeluaran demikian yang dirasakan berat oleh para orangtua siswa.

Pada tahun 2009 gerakan Orang Nasional Tua Asuh (GNOTA) telah menyalurkan bantuan sebesar Rp. 89.950.000 kepada 654 siswa. Dana yang diberikan tersebut belum mencukupi, karena GNOTA harus mencukupi bantuan terhadap siswa SD hingga SMA yang kurang mampu sejumlah 1.346 siswa, yang membutuhkan anggaran senilai Rp. 185.100.000 pada waktu itu. Bantuan yang telah disalurkan kepada 654 siswa tersebut dapat dirinci sebagai berikut: SD/MI sebanyak 392 siswa (Rp. 125.000 per siswa per tahun), SMP/SITOS sebanyak 196 siswa (Rp. 150.000 per

siswa per tahun) dan SMA sebanyak 66 siswa (Rp. 175.000 per siswa per tahun). Adapun perkembangan GNOTA dari tahun 2003 telah member santunan kepada siswa Kota Singapraja sebanyak 2000 siswa, 2004 sebanyak 1.886; pada tahun 2005 sebanyak 2.078; pada tahun 2006 sebanyak 1.584; pada tahun 2007 sebanyak 1.890; dan pada tahun 2008 sebanyak 1.537; 2009 sebanyak 654 (dari target 2000 siswa).

Pemberitaan harian umum *Persatuan Umat dan Kesatuan Bangsa (Pelita)*, menyebutkan bahwa ada lebih dari 2000 siswa di tingkat SD hingga SMA di Kota Singapraja yang masih menunggu giliran mendapatkan bantuan biaya sekolah dari GEMMA. Dari sekitar 4500 anak usia sekolah kurang mampu, hanya sekitar 2.000 sampai 2.500 yang bisa mendapatkan bantuan dan 2.000 lainnya masih harus menunggu. Sebagaimana diberitakan, dalam satu tahun dana yang dikeluarkan GEMMA Kota Singapraja untuk anak asuh tidak kurang dari Rp. 300.000.000. Jumlah kebutuhan tahunan tersebut acapkali lebih besar dari perolehan bantuan, baik dari berbagai pihak lain, maupun khususnya dari iuran rutin para pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Singapraja. Sebagai ilustrasi dari kegiatan GNOTA/GEMMA tersebut (Periksa Lampiran 1, Gambar 4.5).

Tampak dalam gambar tersebut (Lampiran 1, Gambar 4.5), kegiatan GNOTA, yang belakangan berubah menjadi GEMMA, senantiasa menampilkan sosok ketuanya, yaitu: Wara Srikandi. Karena itu, sosok Wara Srikandi juga sangat dikenal

oleh siswa dan keluarga siswa yang mendapat bantuan biaya pendidikan dari GEMMA. Beberapa orangtua siswa SMP Negeri 23 Kota Singapraja, yang anaknya mendapatkan bantuan dari GEMMA mengemukakan bahwa Bunda WS merupakan sosok ibu yang baik hati dan sangat memperhatikan orang kecil seperti mereka.

Iya Mas, dulu-dulu kami tidak pernah mendapatkan bantuan peralatan sekolah. Semua harus beli sendiri. Ada bantuan hanya untuk uang pembangunan sekolah. Itu pun harus mengajukan dengan membawa surat keterangan dari RT, RW dan Kelurahan. Sejak ada Bunda WS, anak saya Ifa juga mendapat bantuan tas, buku, seragam dan sepatu. Ya mudah-mudahan terus begitu (Sumber Data pada lampiran 6: 4.17).

Terlepas dari ada unsur kesengajaan atau tidak dari Wara Srikandi untuk mempopulerkan dirinya melalui kegiatan GNOTA atau GEMMA, ribuan anak dan keluarganya yang telah menerima bantuan cenderung merasa kenal, dekat dan memiliki pandangan sangat positif terhadap Wara Srikandi. Popularitas ini pula yang pada gilirannya meningkatkan keyakinan dari Wara Srikandi untuk mencalonkan diri sebagai Walikota Singapraja.

4. Organisasi Bank Sampah Singapraja (BSS)

Bank Sampah Singapraja atau biasa disingkat BSS merupakan suatu program yang dirintis sejak tahun 2011 dan bertujuan membangun kesadaran masyarakat untuk turut menjaga lingkungan dengan pendekatan inovatif berbasis ekonomi. BSS merupakan salah satu program unggulan pemerintah Kota Singapraja di masa pemerintahan Bagus Permadi, dengan beberapa pendekatan semisal: beli sembako

bayar dengan sampah, hutang uang dengan sampah, menabung uang dengan menyeter limbah/sampah.

Setelah menerima sampah yang dikumpulkan masyarakat, sampah tersebut akan dipilah berdasarkan sifatnya. Sampah yang basah akan dimasukkan ke dalam komposter dan selanjutnya akan menjadi pupuk kompos kering dan cair. Sedangkan jenis sampah lainnya semacam plastik, kardus, botol, logam dan sampahlainnya yang masih memiliki manfaat untuk digunakan sebagai bahan kerajinan, akan dimanfaatkan sebagai benda-benda kerajinan yang mempunyai kemanfaatan ekonomis bagi masyarakat.

Diantara sekian banyak manfaat yang ditawarkan oleh program BSS, ada hal yang cukup menjadi ganjalan, karena mengingat program tersebut dirintis oleh Bagus Permadi bersama Dinas Kebersihan dan Pertamanan, juga TP PKK, yang karena dalam konteks ini, secara struktur, posisi pembina seharusnya dijabat oleh Walikota Singapraja. Namun dalam kenyataannya, Pembina Bank Sampah Singapraja dijabat oleh Ketua TP PKK Kota Singapraja, Wara Srikandi, yang artinya, meskipun program tersebut dikerjasamakan dengan TP PKK, secara kewenangan dan kronologis, tidak ada keharusan bahwa jabatan Pembina dipegang oleh Ketua TP PKK yang secara hirarki tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan SKPD Kota Singapraja. Program BSS tersebut setelah memiliki dampak ekonomis yang kemudian lebih dipopulerkan dengan nama Sejahtera ala-Bunda.

Sejahtera ala bunda merupakan salah satu dari berbagai slogan untuk mulai memperkenalkan diri, slogan lain diantaranya adalah sehat ala bunda, diet ala bunda, dan lain sebagainya. dari hal tersebut, nampak bahwa BSS kemudian dijadikan sebagai alat politik untuk mempopulerkan dirinya.

C. Aktor, Organisasi Spasial, dan Relasi Jejaring Politik

Bagian ini menyajikan secara bertahap unsur-unsur dan saling keterhubungan antar unsur dalam jejaring politik nepotisme daerah. Ini mencakup: (1) para aktor jejaring politik nepotisme, (2) organisasi spasial jejaring politik nepotisme, dan (3) pola relasi jejaring politik nepotisme,.

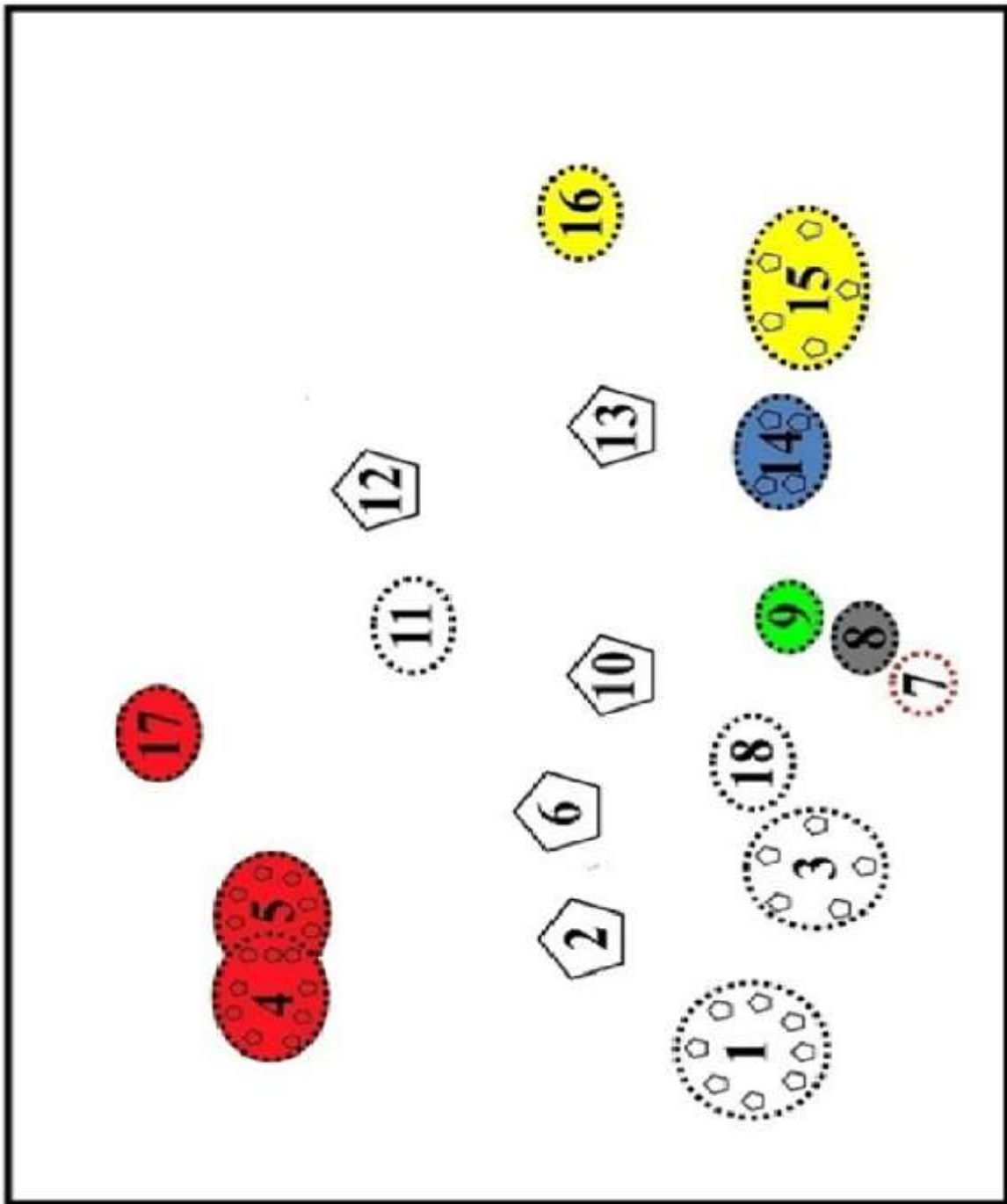
1. Para Aktor Jejaring Politik Nepotisme

Berdasarkan identifikasi dari uraian sebelumnya, dapat dikenali 18 (delapan belas) aktor dalam jejaring politik nepotisme daerah, baik individu, kelompok maupun organisasi. Jejaring sendiri berisi sejumlah aktor yang masing-masing mempunyai kekuasaan potensial dan kekuasaan aktual melalui kekuasaan relasional aktor. Selama menjadi Pejabat Publik, Bagus Permadi telah di samping dianggap sebagai orang mempunyai kekuasaan potensial, juga dikenal sebagai orang yang sangat piawai memanfaatkan semua relasi yang telah ia miliki.

Adapun aktor-aktor yang terlibat dalam jejaring nepotisme politik dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni: pertama, Kelompok organisasi yang terdiri dari Perangkat Daerah, TP PKK, Partai Politik (PDIP, PAN, Partai Golkar, dan PPP),

Komisi Pemilihan Umum, dan Media Massa. Kedua, aktor yang digolongkan individu yakni M. Joyodroto, Bagus Permadi, Wara Srikandi, Raden Kumara, dan Wibisono. Sedangkan kelompok ketiga adalah aktor yang digolongkan Kelompok diantaranya Loyalis Bagus Permadi yang terdiri dari Red Army, Tokoh-tokoh agama, serta Tokoh Masyarakat.

Tampak dalam gambar (Gambar 4.6), simbol segilima mewakili aktor individual, sedangkan lingkaran atau oval mewakili aktor kolektiva. Kolektiva di sini mencakup baik organisasi formal seperti partai politik, maupun kelompok tidak formal yang dipersatukan oleh kesamaan pandangan, misalnya yang memang memiliki sikap loyal sebagai pribadi kepada salah satu aktor dalam jejaring politik nepotisme daerah. Aktor organisasional partai politik dibedakan dari aktor organisasional bukan partai politik berdasarkan warnanya. Konvensi yang digunakan mengikuti warna simbolik yang selama ini digunakan untuk mengenali partai politik tertentu, misalnya merah untuk PDIP, kuning untuk Partai Golkar, biru PAN, dan hijau untuk PPP, sedangkan abu-abu menunjukkan aktor kolektiva dari partai-partai non-parlemen. Warna partai lain, misalnya Partai Demokrat, yang juga berwarna biru, tidak ditemukan dalam model ini, karena secara empirik memang tak terlibat dalam jejaring politik nepotisme daerah.



Gambar 4.6: Para Aktor Jejaring Politik Nepotisme

2. Organisasi Spasial Jejaring Politik Nepotisme

Knoke (1994: 169) menyatakan bahwa pengembangan model jejaring untuk kajian ilmu politik juga memperhitungkan organisasi spasial aktor-aktor kolektif (*spatial organization of collective actors*), yang didasarkan pada derajat ketumpang-tindihan anggota-anggota mereka. Ketumpang-tindihan itu sendiri menunjukkan ukuran seberapa tinggi organisasi yang sama mengambil posisi yang sama berkenaan dengan kejadian atau kegiatan yang sedang dihadapi.

Dalam jejaring politik nepotisme daerah, yang digunakan oleh aktor politik untuk mengurangi ketidak-pastian dan atau kegagalan sebuah tindakan bertujuan berupa kemenangan dalam pemilihan kepala daerah, organisasi spasial jejaring bisa didasarkan pada tiga tujuan bertahap dalam pemenangan pemilihan kepala daerah, yaitu: ranah popularitas, ranah legalitas, dan ranah elektabilitas. Beberapa aktor terlibat pada semua ranah, sedangkan aktor-aktor lain hanya terlibat dalam satu atau dua ranah tujuan tindakan. Sebagaimana tampak dalam gambar (Gambar 4.6), hanya ada dua aktor yang senantiasa ada dalam ketiga organisasi spasial, yaitu: Bagus Permadi sebagai *nepotis*, dan Wara Srikandi, sebagai *nepos*. Ini menunjukkan bahwa keduanya sangat aktif dalam proses pencapaian popularitas, legalitas maupun elektabilitas.

Dalam organisasi sosial politik nepotisme ini, juga tampak jelas bahwa organisasi seperti PKK, Dharma Wanita, GNOTA, Bazis dan BSS, memiliki peran penting dalam tahap pencapaian popularitas dan elektabilitas, tetapi sama sekali tidak

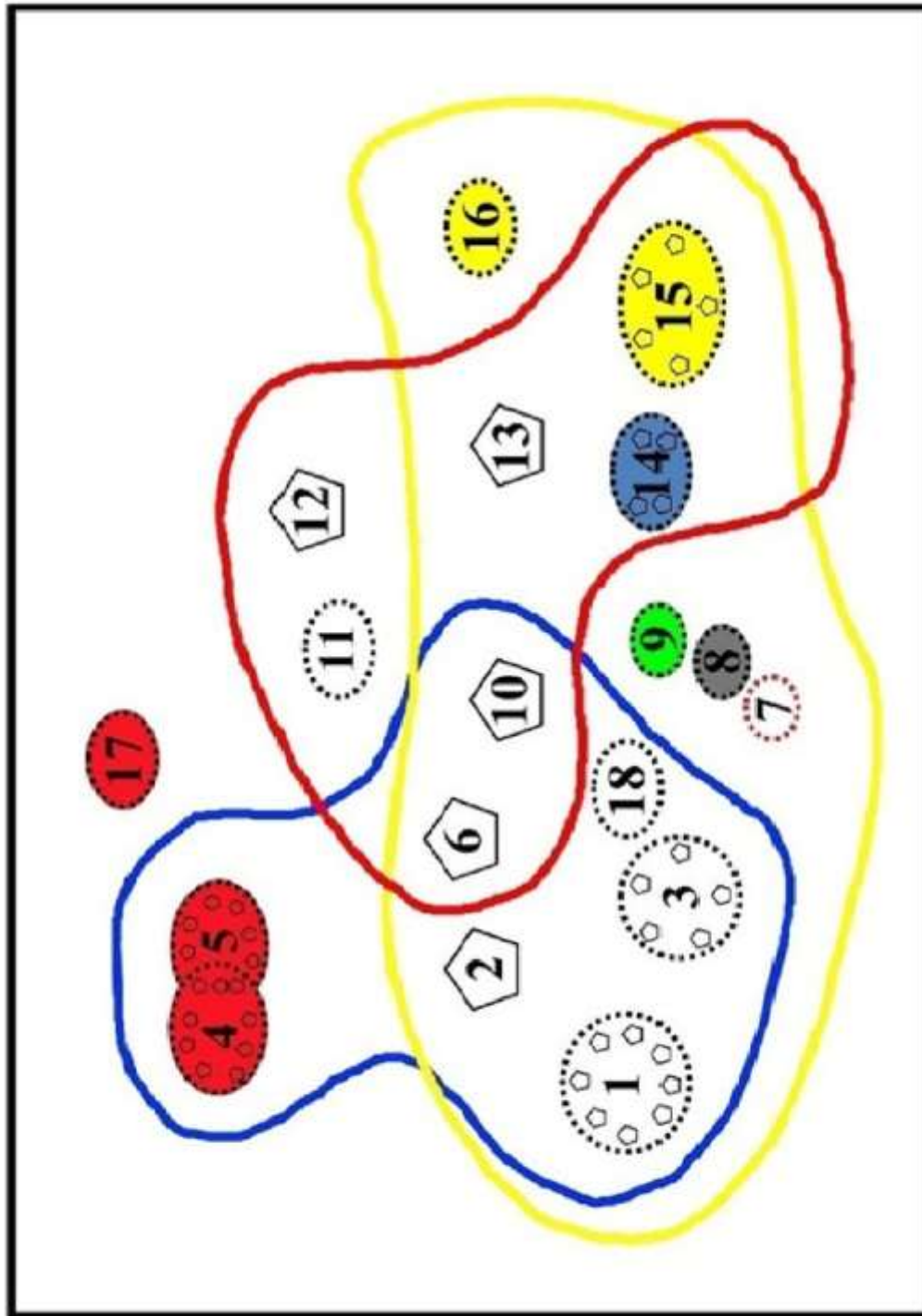
terlibat dalam ranah legalitas. Ranah legalitas didominasi oleh partai politik, dengan peran penting seorang aktor yang berperan sebagai penghubung (*brokerage*), yaitu: Raden Kumara. Peran Raden Kumara sangat signifikan karena menjodohkan antara kubu Bagus Permadi dan Wara Srikandi yang sudah didukung oleh PAN, dengan Wibisono yang sudah didukung oleh Partai Golkar. Tanpa proses penjodohan ini, yang secara rinci diuraikan pada bagian Strategi Pemerolehan Legalitas Pencalonan pada bab selanjutnya, bisa dipastikan Wara Srikandi akan gagal mendapatkan legalitas sebagai calon walikota, yang berpasangan dengan Wibisono.

Berdasarkan data perolehan kursi, PAN memiliki 4 kursi DPRD, sedangkan Partai Golkar memiliki 5 kursi DPRD. Hanya dengan bergabung, maka Wara Srikandi dan Wibisono bisa memenuhi persyaratan legalitas untuk menjadi calon walikota dan wakil walikota. Secara logik proporsional, seharusnya Wibisono layak menjadi calon walikota, sedangkan Wara Srikandi, dengan asumsi benar-benar didukung oleh PAN, layak menjadi calon wakil walikota.

Akan halnya kekuatan partai politik PDIP, sebagaimana tampak dalam gambar organisasi spasial ini, hanya berperan dalam tahap memperoleh popularitas. Dalam ranah legalitas, PDIP sama sekali tidak memiliki peran, karena DPP PDIP justru memberhentikan secara tidak hormat baik Bagus Permadi maupun Wara Srikandi sebagai pengurus sekaligus anggota PDIP. Pada tahapan atau ranah elektabilitas, memang masih ada sebagian kecil anggota PDIP yang tetap loyal kepada Bagus Permadi dengan memberikan dukungan kepada Wara Srikandi - Wibisono. Namun demikian, jumlah anggota PDIP yang tetap loyal ini sangat kecil atau tidak signifikan.

Demikian juga, kekecewaan yang dirasakan oleh kolektiva Pas Mantep, atau pendukung Wibisono, juga cenderung mengorganisasi diri menjadi pihak yang justru melawan Wibisono. Ini berarti bahwa selain gagal mempertahankan pemilih Partai Golkar untuk mendukung Wibisono, keputusan untuk berpasangan dengan Wara Srikandi, juga melempar warga kolektiva Pas Mantep non-Golkar, keluar dari upaya pemanfaatan sepihak oleh pasangan Wara Srikandi dan Wibisono.

Segera setelah diberhentikan secara tidak hormat dari PDIP, Bagus Permadi mencari alternatif bagi Wara Srikandi agar tetap bisa mendapatkan legalitas sebagai calon walikota. Sebelumnya, Bagus Permadi memang memiliki hubungan dekat dan bisa mempengaruhi PAN untuk mendukung Wara Srikandi. Bermodal 4 kursi DPRD yang dimiliki PAN, Bagus Permadi dan Wara Srikandi melakukan pendekatan kepada Partai Demokrat. Namun demikian, ternyata Partai Demokrat tidak bersedia memerikan rekomendasi bagi Wara Srikandi. Karena itu, Bagus Permadi dan Wara Srikandi yang mencari rekan koalisi agar Wara Srikandi berhasil mendapatkan legalitas sebagai calon walikota. Dalam konteks ini pula, kehadiran dan peran Raden Kumara yang memiliki pengaruh besar terhadap perpolitikan daerah menjadi sangat penting. Karena itu, meskipun secara legal-formal, PAN dan Partai Golkar sebagai penentu legalitas Wara Srikandi, secara empirik justru aktor individual Raden Kumara yang menjadi penentu utama legalitas pencalonan pasangan Wara Srikandi dan Wibisono.



Gambar 4.7: Organisasi Spasial Jejaring Politik Nepotisme
Organisasi spasial berikutnya berkenaan dengan pengelompokan para aktor

Organisasi spasial berikutnya berkenaan dengan pengelompokan para aktor politik berdasarkan tujuan tindakan politik, khususnya *nepotis* dan *nepos*, yaitu: meningkatkan elektabilitas pasangan calon *nepos* agar dapat memenangkan pemilihan walikota atau kepala daerah. Organisasi spasial dalam rangka elektabilitas ini, kembali mencakup sejumlah aktor dalam organisasi spasial popularitas, sebagian aktor dalam organisasi spasial legalitas, ditambah aktor lain yang tidak masuk dalam kedua organisasi spasial tersebut, yaitu: aktor kolektiva Partai Persatuan Pembangunan, aktor kolektiva Aliansi Partai Politik Non Parlemen, dan aktor kolektiva yang berasal dari para loyalis Bagus Permadi. Berkenaan dengan bagaimana praktik politik nepotisme daerah berlangsung dalam ketiga organisasi spasial tersebut, akan dibahas pada bab khusus tentang praktik politik nepotisme daerah.

3. Pola Relasi Jejaring Politik Nepotisme

Pusat perhatian kajian jejaring pada dasarnya bukan para aktor, baik individual maupun organisasional, melainkan interaksi yang menghubungkan antar aktor (Knoke, 1994: 234). Dalam interaksi antar aktor tersebut, yang pertama harus diperhatikan adalah arah relasional, selanjutnya bentuk relasional dan muatan relasional. Berkenaan dengan konsep jejaring politik nepotisme dalam rangka pemilihan kepala daerah yang menjadi salah satu pusat perhatian penelitian ini, maka

identifikasi dilakukan dengan terlebih dulu mendeskripsikan matriks representasi (*matrix representations*), yang menggambarkan arah dan besarnya pengaruh satu aktor terhadap aktor lain.

Melalui matriks representasi ini pula, pada gilirannya akan diketahui aktor mana yang memiliki derajat sentralitas maupun aktor mana yang memiliki derajat keperantaraan sangat penting dalam jejaring politik nepotisme daerah. Berdasarkan deskripsi yang ada dalam matriks representasi tersebut, selanjutnya bisa dibuat gambar arah relational (*directed-graph*) jejaring politik nepotisme daerah.

Selanjutnya, sebagaimana dikemukakan oleh Knoke (1994: 171), di balik analisis aktor kolektif ada hubungan struktural antar seperangkat tindakan. Maksudnya, suatu kelompok organisasi yang terbentuk menjadi aliansi temporer dengan satu maksud terbatas (*a group of organizations formed into temporary alliance for a limited purpose*). Dalam penelitian ini, memang tampak bahwa beberapa aktor terlibat dalam jejaring kerja politik nepotisme daerah semata-mata untuk mencapai, misalnya, salah satu saju dari tujuan politik nepotisme daerah, baik dalam ranah popularitas, legalitas maupun elektabilitas. Aliansi temporer untuk maksud terbatas dimaksud sangat tampak pada kehadiran dan pengaruh Raden Kumara yang berhasil memasangkan antara Wara Srikandi dengan Wibisono. Begitu Wara Srikandi dan Wibisono sudah menjadi pasangan calon walikota dan calon wakil

walikota yang memiliki legalitas, Raden Kumara yang dikenal memiliki kekuasaan potensial sangat besar di wilayah Singapraja Raya, dengan sengaja menarik diri dari proses selanjutnya.

Berbagai lembaga NGOGO yang salahsatunya sangat intensif digunakan oleh calon *nepos* adalah TP PKK. Organisasi PKK telah diberdayakan sebagai organisasi yang mendukung popularitas dan elektabilitas calon *nepos*. Melalui berbagai kerjasama, dukungan program serta anggaran, maka semua dinas yang berpotensi mensukseskan popularitas dan elektabilitas calon *nepos* dikerahkan sekaligus dalam membentuk citra calon *nepos* dalam berbagai program yang telah dipersiapkan.

Sebelum dikeluarkannya surat pemecatan Bagus Permadi, Wiji, dan Wara Srikandi, Bagus Permadi mempunyai pengaruh dan dominasi yang cukup signifikan bagi DPC PDIP Kota Singapraja, dimana sebelumnya, Bagus Permadi telah berhasil mempertahankan kemenangan PDIP di tingkat parlemen (pemilihan legislatif 2009) dalam kondisi nasional yang sama sekali tidak begitu menguntungkan bagi PDIP waktu itu. Dominasi dan pengaruh Bagus Permadi begitu terasa ketika Bagus Permadi mensiasati dukungan seluruh PAC se-Kota Singapraja untuk menghambat Sri Sendari dan mendukung Wara Srikandi sebagai calon *nepos* yang didukung oleh seluruh pengurus PAC PDIP Kota Singapraja.

Telah disajikan pada bagian sebelumnya, Bagus Permadi mempunyai kekuasaan potensial yang cukup besar, hal ini ditunjukkan dari keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga loyalis yang tergabung dalam Red Army. Dominasi dan pengaruh Bagus Permadi kepada Asosiasi partai-partai non Parlemen dan PPP tidak terlalu kuat karena hubungan tersebut tidak didasarkan pada hubungan emosional, melainkan hubungan rasional. Dominasi Bagus Permadi terhadap Wara Srikandi merupakan hubungan relasional terkuat yang terjadi dalam jejaring politik. Hal ini karena hubungan tersebut merupakan hubungan antara *nepotis* dan *nepos*.

Ketua KPU dikenal sebagai orang dekat Bagus Permadi, yang mana Hendri dengan sengaja dijadikan sebagai ketua KPU dengan maksud untuk membantu calon *nepos* dalam mengupayakan tahapan legalitas bagi pasangan calon *nepos* sehingga Bagus Permadi mempunyai pengaruh dan dominasi yang cukup kuat terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Singapraja.

Hubungan antara Bagus Permadi dengan Raden Kumara merupakan hubungan yang tidak sebanding, dimana dominasi Raden Kumara pada dasarnya lebih kuat dibanding dominasi Bagus Permadi. Namun demikian, pada waktu itu, Raden Kumara membantu Bagus Permadi di tataran legalitas, yakni dengan memasang Wara Srikandi dengan Wibisono sekaligus mengatur rekomendasi dan

persetujuan dari Partai Golkar Pusat di samping juga mengkondisikan PAN untuk mendukung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Nepos.

Meskipun pernah terjadi ketidak-sepahaman antara Wibisono dengan Bagus Permadi, namun karena pada waktu itu Wibisono hampir kehilangan kesempatan untuk maju sebagai calon kepala daerah, maka tentunya nilai tawar Bagus Permadi menjadi terangkat ketika menawarkan posisi calon wakil kepala daerah bagi istrinya kepada Wibisono. Hal ini dilandasi dengan perolehan suara yang dimiliki Partai Golkar di Kota Singapraja jauh lebih besar ketimbang PAN yang hanya mendapat empat kursi.

Sebagai konsekuensi persetujuan untuk memasang Wibisono sebagai calon wakil walikota, dengan calon walikota Wara Srikandi, maka DPP Partai Golkar memerintahkan Kresna Murti sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Singapanji untuk menjadi ketua tim sukses untuk kemenangan DADI (Bunda Wara Srikandi dan Wibisono). Dalam praktiknya, ternyata keterlibatan Kresna Murti dalam mensukseskan DADI hanya menampak di awal kegiatan kampanye, itu pun melalui media massa (Periksa Lampiran 1, Gambar 4.8).

Tampak dalam matriks representasi (Tabel 4.1) yang kekuatan pengaruhnya menggunakan skala 0-5, pengaruh dominan Bagus Permadi dalam menjalankan semua elemen aktor yang terdapat dalam lingkup jejaring kekuasaannya telah

ditunjukkan dalam ketiga ranah pencalonan Kepala Daerah. Bagus Permadi telah menempatkan M. Joyodroto yang dulunya merupakan Kepala Dinas Pendidikan Nasional yang dikenal mempunyai loyalitas tinggi terhadap pimpinan demi mendapat dan mempertahankan kedudukan dalam pemerintahan sebagai Sekretaris Daerah Kota Singapraja. Hal ini dilakukan Bagus Permadi karena Perangkat Daerah merupakan organisasi publik yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah, yang dalam hal ini, Bagus Permadi selaku Walikota Singapraja mempunyai akses formal untuk menggerakkan seluruh perangkat, khususnya yang berpotensi dalam membantu mewujudkan keinginannya sebagai *nepotis*. Di sisi lain, Sekretaris Daerah selaku Pejabat tertinggi dalam struktur birokrasi Pemerintah sekaligus ketua panitia anggaran juga mempunyai akses yang cukup besar untuk membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan harapan yang ingin diraih, setidaknya sebagai bukti loyalitasnya kepada kepala daerah.

Tampak dalam gambar (4.1), bahwa hubungan yang terjadi dapat berupa hubungan instruksional, hubungan instruksional samar, hubungan timbal balik di samping jenis aktor yang terlibat dapat dibedakan menjadi aktor individual ditandai secara simbolik dengan persegi lima dan aktor kolektiva yang ditandai secara simbolik dengan bentuk gambar lingkaran (bulat dan atau oval).

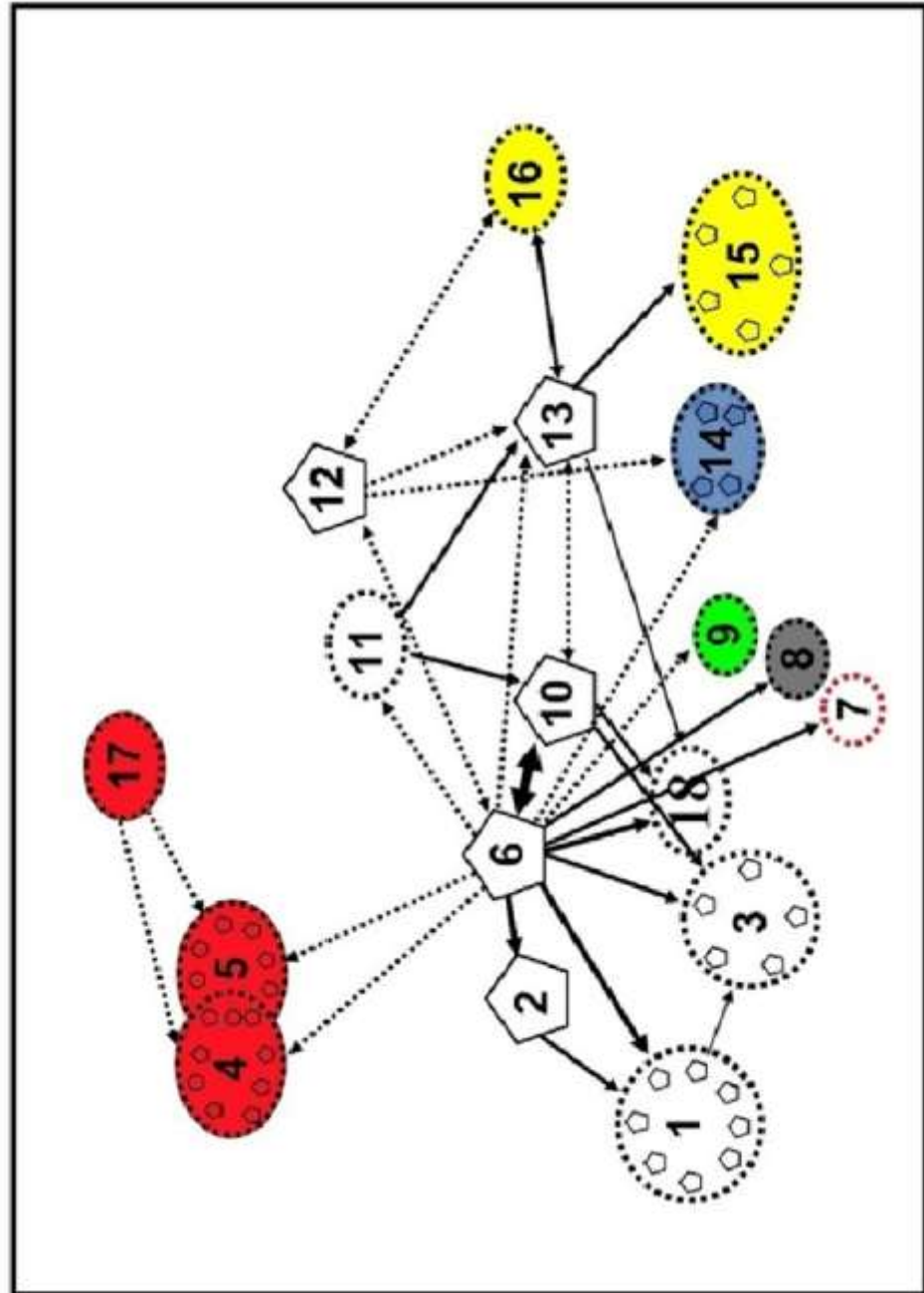
Tabel 4.1: Matriks Representasi Politik Nepotisme Daerah

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Total	
1	-	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2	4	-	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	10
3	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	4	4	3	1	1	-	4	2	2	5	4	3	3	3	2	2	0	4	44	
7	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0	0	4	0	0	2	0	0	0	-	0	0	3	0	0	0	0	3	12	
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-	0	4	0	0	0	0	0	8	
12	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	-	4	4	0	4	0	0	16	
13	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	-	0	4	3	0	3	16	
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	-	0	0	3	
17	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	8	
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	
Total	8	4	12	5	5	9	4	2	2	12	7	3	17	7	6	9	0	10		

Hubungan timbal-balik paling intens terjadi antara *nepotis* dan *nepos* (aktor 6 dan aktor 10). Hubungan intens searah berikutnya berlangsung antara aktor 6 dengan aktor individu 1 dan aktor kolektiva 2, 11, 18. Dikatakan searah karena hubungan yang terjadi lebih bersifat instruksi, baik secara langsung (hubungan struktural organisasi maupun ikatan emosional individu) maupun tidak langsung (seperti pesanan khusus kepada Media massa melalui pemberitaan pada kolom *advertorial*).

Hubungan antara aktor individu 6 dengan aktor kolektiva 7 merupakan hubungan yang bersifat langsung, dan sifat dari hubungan keduanya lebih bertahan lama dibandingkan dengan hubungan dengan kolektiva lainnya, karena hubungan tersebut didasari oleh hutang budi dan sifatnya lebih paternalistik. Hubungan berikutnya adalah hubungan instruksional yang tidak terselesaikan terjadi antara aktor individu 6 dengan aktor kolektiva 4 dan 5. Tidak terselesaikannya hubungan instruksional antara aktor individu 6 dengan aktor kolektiva 4 dan 5 dikarenakan kegagalan aktor individu 6 dalam mendapatkan rekomendasi dan bahkan gagal mendapatkan simpatik dari aktor kolektiva 17, yang kemudian mengakibatkan dipecatnya aktor individu 6 dan 10.

Setelah upaya mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrat gagal, aktor individu 6 menjalin komunikasi dengan aktor individu 12 secara tersamar untuk kemudian bersama-sama mengkondisikan aktor kolektiva 14, dimana kemudian aktor individu 12 juga mengkondisikan aktor individu 13 untuk mendapat rekomendasi berpasangan sebagai wakil dari aktor individu 10. Dalam membuktikan legalitas hubungan aktor individu 10 dengan aktor kolektiva 14, maka dilakukan secara simbolik dengan memakaikan seragam partai sebagai aktor kolektiva 14, yang dilakukan oleh pimpinan pusat partai dimaksud.



Gambar 4.9: Hubungan relasional jejaring nepotisme politik

Hubungan antara aktor individu 10 dengan aktor kolektiva 14 dalam rangka legalitas aktor individu 10 sebagai calon walikota dapat dikategorikan sebagai hubungan aliansi untuk maksud terbatas, karena dilakukan hanya untuk kegiatan pemilihan kepala daerah, dikarenakan memang di samping aktor individu 10 bukan merupakan himpunan dari aktor kolektiva 14, juga karena tidak ada persamaan latar belakang antara aktor individu 10 dengan aktor kolektiva 14. Kesimpulan bahwa hubungan tersebut merupakan aliansi untuk maksud terbatas semakin diperkuat setelah pasangan aktor individu 10 dan aktor individu 13 gagal memenangkan pemilihan kepala daerah. Pada Pemilu Legislatif 2014, aktor individu 10 lebih memilih untuk melepas seragam kolektiva 14, untuk kemudian masuk dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif melalui aktor kolektiva 9.

Sedangkan hubungan aktor individu 6 dengan aktor kolektiva 8 dan hubungan aktor individu 6 dengan aktor kolektiva 9 tetap dibedakan, karena walaupun sama-sama tidak mendapat kursi di DPRD (periode 2009-2014), aktor kolektiva 9 dikenal sebagai partai yang biasanya mendapatkan kursi di DPRD, dan memiliki jumlah pendukung lebih besar dibanding partai-partai non-parlemen yang lain. Hal tersebut dibuktikan, berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2014, aktor kolektiva 9 berhasil kembali memperoleh 3 (tiga) kursi DPRD dari yang sebelumnya tidak mendapatkan kursi sama sekali.

D. Perilaku Politik Elit, Jejaring Nepotisme, dan Disafeksi Politik Massa

Berdasarkan seluruh uraian sebelumnya, bisa diidentifikasi beberapa ciri perilaku politik aktor individu *nepotis* dan *nepos* bersama sejumlah aktor politik lain, baik aktor individu maupun kolektiva yang membentuk jejaring politik nepotisme daerah. Beberapa ciri perilaku politik elit yang paling menonjol adalah sifat koersif, hegemonik, konspiratif dan oligarkhis dari perilaku mereka. Aktor *nepotis*, misalnya, tidak segan-segan menggunakan kekerasan, yang bahkan menimbulkan semacam perasaan traumatik bagi para aktifis yang berupaya melakukan kritik atau perlawanan terhadapnya. Demikian juga, melalui sejumlah strategi, aktor *nepotis* juga berhasil membangun kekuasaan hegemonik terutama terhadap tidak hanya bagian terbesar dari perangkat daerah dan pegawai pemerintah daerah, tetapi juga sejumlah organisasi sosial yang merasa berhutang budi kepada aktor *nepotis* dan *nepos*.

Adanya aliansi temporer untuk maksud terbatas, baik yang dilakukan oleh aktor individu maupun aktor kolektiva, tanpa pernah misalnya meminta pendapat masyarakat atau konstituen partai, menunjukkan ciri lain dari perilaku elit politik daerah, yaitu: konspiratif. Pola perilaku konspiratif ini tidak saja dilakukan oleh aktor *nepotis* dan *nepos*, tetapi juga oleh aktor-aktor lain yang di antaranya adalah aktor individu yang menjadi calon wakil walikota dari aktor *nepos*. Aktor individu calon wakil walikota ini bahkan sama sekali meninggalkan sekelompok besar kolektiva yang telah dengan setia dan sukarela mendukungnya untuk menjadi calon walikota. Tidak ada, misalnya, upaya dari aktor calon wakil walikota untuk meminta

persetujuan dulu kepada perwakilan kolektiva pendukungnya mengenai keputusannya untuk berkoalisi dengan aktor *nepos*. Justru, sebaliknya, aktor calon wakil walikota ini sibuk mencari rekomendasi dan dukungan dari elit politik Pusat dan kemudian elit *brokerage*, yang akhirnya memasangkannya dengan aktor *nepos*.

Berdasarkan uraian tentang sifat konspiratif perilaku politik elit daerah tersebut, sekaligus juga bisa disimpulkan bahwa sifat kekuasaan yang muncul adalah oligarkhis, yaitu sebaran kekuasaan yang memusat pada sekelompok kecil elit politik atau elit yang berpengaruh di daerah. Lebih lanjut, sifat oligarkhis ini juga mewujud dalam perilaku politik nepotisme, yang bertujuan melestarikan kekuasaan pada sekelompok kecil elit politik, yang dikehendaki oleh aktor *nepotis*, aktor *nepos*, dan elit-elit daerah lainnya yang bekepentingan sama, atau bermaksud mengupayakan kepentingan pribadi dan kelompoknya melalui kerjasama dengan aktor *nepotis*.

Bersamaan dengan munculnya gejala perilaku politik elit yang koersif, hegemonik, konspiratif, dan oligarkhis tersebut, juga muncul sejumlah gejala disafeksi politik massa. Disafeksi politik adalah perasaan subjektif berupa ketak-tertarikan, ketak-percayaan, ketak-pedulian, ketak-berdayaan, keterasingan dan sinisme masyarakat terhadap segala sesuatu yang bersifat politik, termasuk para politisi, proses politik, partai politik, dan pranata demokrasi lainnya, termasuk penyelenggara dan pengawas pemilihan kepala daerah. Agar memudahkan dalam penyajian, tiga penanda pertamadisafeksi politik massa, yaitu: ketak-tertarikan, ketak-percayaan, dan ketak-pedulian dilabel ulang sebagai apatisme politik massa,

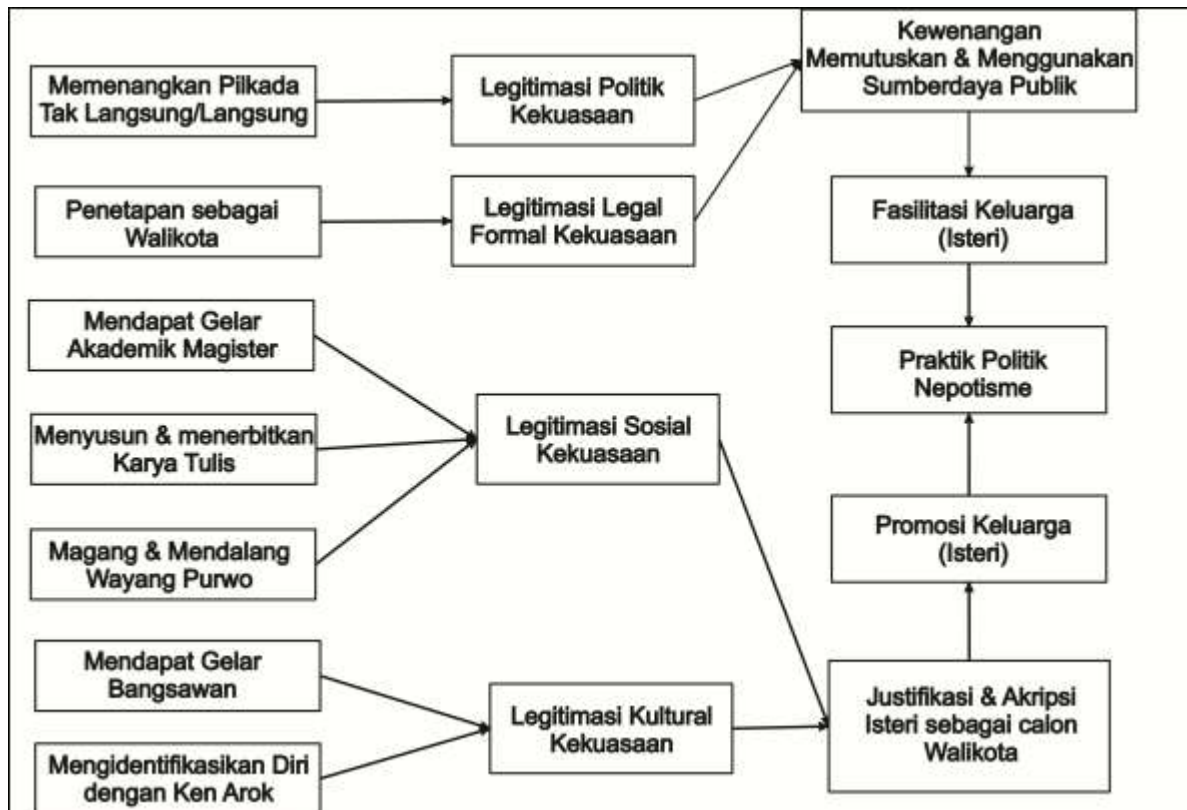
sedangkan tiga penanda berikutnya dari disafeksi politik massa, yaitu: ketakberdayaan, keterasingan dan sinisme masyarakat, dilabel ulang sebagai sinisme politik massa saja.

Secara logis, jejaring politik nepotisme merupakan produk dari perilaku politik elit daerah yang bersifat relasional. Perilaku politik elit daerah dalam jejaring politik nepotisme ini, pada gilirannya akan mempengaruhi sikap dan perilaku politik warga masyarakat, yang dalam penelitian ini menimbulkan disafeksi politik massa. Mengikuti logika tersebut, berikut disajikan secara berurutan: (1) perilaku politik elit daerah, (2) jejaring politik nepotisme daerah, (3) disafeksi politik massa di daerah, dan (4) perilaku elit, jejaring nepotisme, dan disafeksi politik massa.

1. Perilaku Politik Elit Daerah

Ada berbagai cara yang dimanfaatkan seorang pejabat publik untuk mendapatkan legitimasi sosial dan kultural guna menguatkan kekuasaannya tanpa harus menggunakan tindakan represif. Bagus Permadi telah memilih cara, di antaranya: (1) mendapatkan gelar akademik magister, (2) menyusun dan menerbitkan karya tulis, (3) magang dan mendalang wayang purwo, (4) mendapatkan dan memakai gelar bangsawan, dan (5) mengidentifikasi diri dengan Ken Arok.

Kelima upaya tersebut dilakukan oleh Bagus Permadi demi mendapatkan legitimasi sosial dan kultural kekuasaan, yang dalam budaya Jawa dikenal dengan sebutan *kamukten*.



Gambar 4.10: Model Legitimasi Nepotis

Dalam rangka pelestarian dan penguatan kekuasaan, Bagus Permadi juga melakukan upaya-upaya mendapatkan *kamukten* dengan harapan ada kompensasi sosial yang kemudian membuat masyarakat, khususnya masyarakat Jawa yang masih sangat percaya terhadap apa yang dalam bahasa Jawa disebut *tedak rembese madu* atau yang dalam konsep lainnya biasa disebut dengan *status askriptif* yakni identitas yang berasal dari luar individu (masyarakat) dengan mendasarkan pada identitas kolektif dan historis, dimana *status askriptif* ini sangat mempengaruhi bagaimana

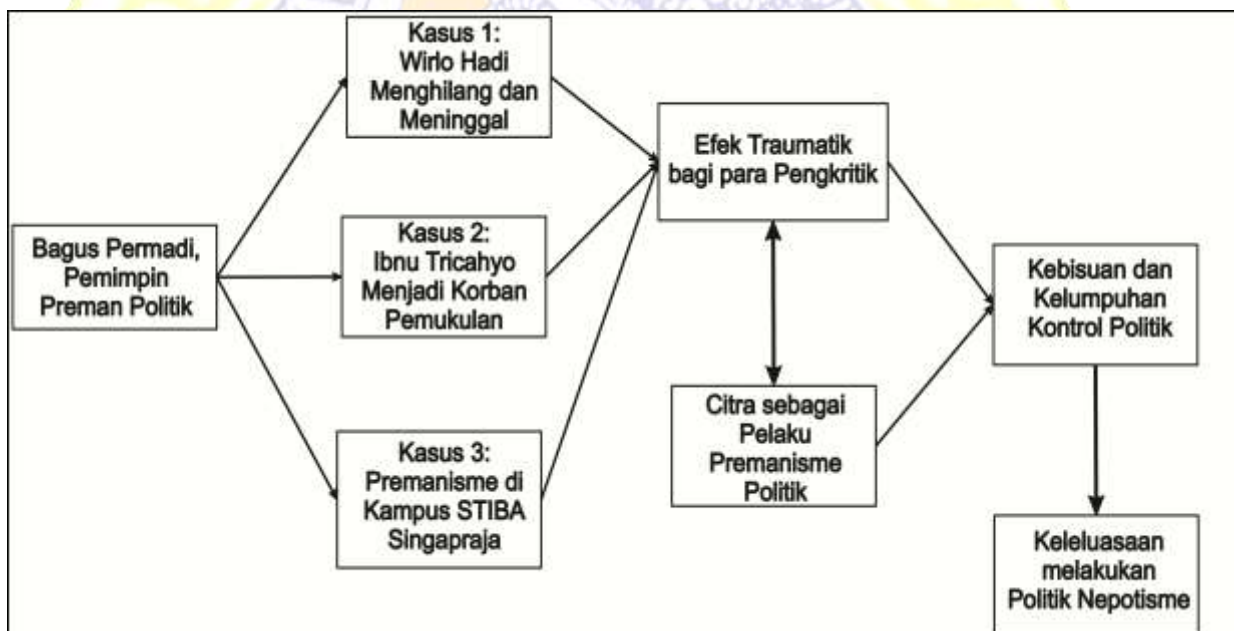
pengakuan dan perlakuan masyarakat (individu-individu diluar dirinya) terhadap seseorang berdasarkan modal identitas yang dilekatkan oleh masyarakat.

Basis kekuasaan berdasarkan status capaian (*achieved status*) juga dilakukan oleh Bagus Permadi dengan mengikuti pendidikan pascasarjana, hingga lulus magister dengan predikat *cum laude*, menyusun dan menerbitkan karya tulis, yang disunting oleh Liga Alam, yang dikenal dekat dengan isterinya, serta belajar secara magang ketrampilan mendalang wayang purwo, serta secara periodik menampilkan kepiawaian mendalangnya di hadapan masyarakat, khususnya Kota Singapraja.

Dengan menerapkan konsep tersebut, maka upaya Bagus Permadi tersebut diharapkan mampu mempengaruhi masyarakat untuk memberlakukan kompensasi sosial dan juga mendukung isterinya saat hendak mencalonkan diri sebagai calon walikota (yang hal ini juga merupakan suatu bentuk klaim kultural atas politik nepotisme).

Dari setidaknya tiga contoh yang disajikan dalam penelitian ini, selama dua periode menjabat, Bagus Permadi telah meninggalkan banyak sekali jejak-jejak traumatik khususnya pada kelompok-kelompok kritis. Secara kronologis, berbagai kekerasan yang sepertinya cenderung digunakan sebagai solusi jitu untuk menyelesaikan segala bentuk konflik dan persaingan tersebut kemudian seolah berakumulasi dan membentuk sebuah kekuatan yang mencekam, dimana dengan mulai menurunnya intensitas kelompok-kelompok kritis, maka secara tidak langsung akan diikuti pula dengan melemahnya kontrol publik.

Ketika muncul keengganan dikalangan kelompok kritis untuk mengamati dan mengontrol penggunaan kekuasaan, maka tidak lagi ditemukannya kontrol publik yang cukup kuat hingga mampu menghindarkan penyelewengan penggunaan kewenangan publik. Kondisi yang demikian ini berpeluang untuk diwujudkan, terutama ketika Bagus Permadi berkeinginan memperpanjang jangka waktu kekuasaannya melalui praktik politik nepotisme, yakni dengan mencalonkan isterinya sebagai calon walikota tentunya tidak akan ada lagi hambatan yang berarti.

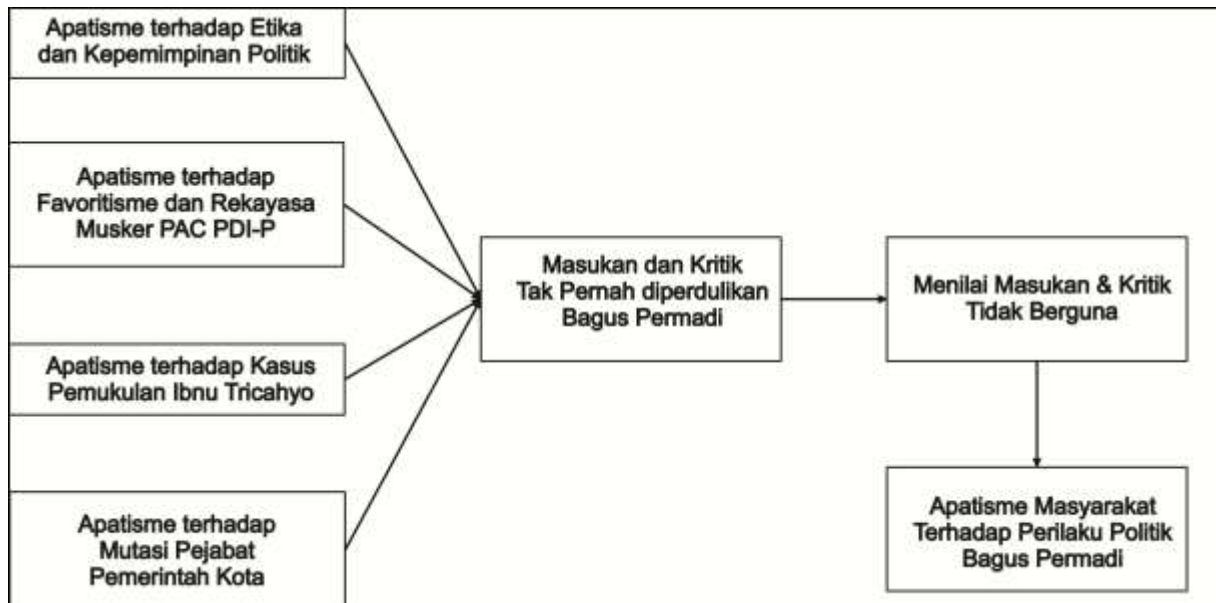


Gambar 4.11: Model Penyebab Kelumpuhan Kontrol terhadap Nepos dan Nepotis

Mengikuti teori belajar sosial, warga masyarakat melakukan, mengikuti, menyimak, dan menyimpulkan apa saja terkait dengan akhir dari masukan dan kritik yang diajukan terhadap Bagus Permadi. Semakin banyak bukti bahwa masukan dan

kritik tidak pernah dipedulikan, maka semakin masyarakat menyimpulkan bahwa masukan terhadap kritik terhadap Bagus Permadi tidak hanya mengandung risiko, tetapi juga tidak ada gunanya. Bagus Permadi bukan hanya anti kritik, tetapi juga cenderung kebal terhadap kritik.

Gunjangan para kader dan masyarakat tentang etika dan kepemimpinan politiknya sama sekali tidak mempengaruhi kebijakan dan perilaku politiknya. Gunjangan dan kritik terhadap favoritisme dan rekayasa Musyawarah kerja PAC PDIP Kota Singapraja juga tidak membuat Bagus Permadi bergeming. Tetap saja mempertahankan jabatan isterinya sebagai Bendahara DPC PDIP Kota Singapraja dan menetapkan isterinya sebagai Calon Walikota Singapraja dari PDIP. Bahkan unjuk rasa yang digelar oleh berbagai komponen masyarakat, dan sivitas akademika Universitas Maharaja atas kasus pemukulan terhadap Ibnu Tricahyo tidak membuat Bagus Permadi terpengaruh. Pengaruh besar Bagus Permadi malah semakin tampak karena berhasil dikukuhkan sebagai magister administrasi publik dengan predikat pujian (*cumlaude*) dari universitas yang sama. Terakhir, meskipun sangat mudah dipahami bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, seorang walikota yang akan mengakhiri jabatannya tidak boleh membuat keputusan strategis, tetap saja Bagus Permadi melakukannya.



Gambar 4.12: Model Mekanisme Masyarakat menjadi Apatis terhadap Nepos dan Nepotis

Dalam berbagai kesempatan, Bagus Permadi justru menunjukkan keberanian sekaligus arogansinya dengan menyatakan tidak takut dipecat, dan bahkan dengan bangga mengibaratkan kalau dirinya adalah pengemudi kendaraan bermotor yang memberi tanda akan belok ke kiri, tetapi sebenarnya justru berbelok kekanan (*riting kiri, belok kanan*).

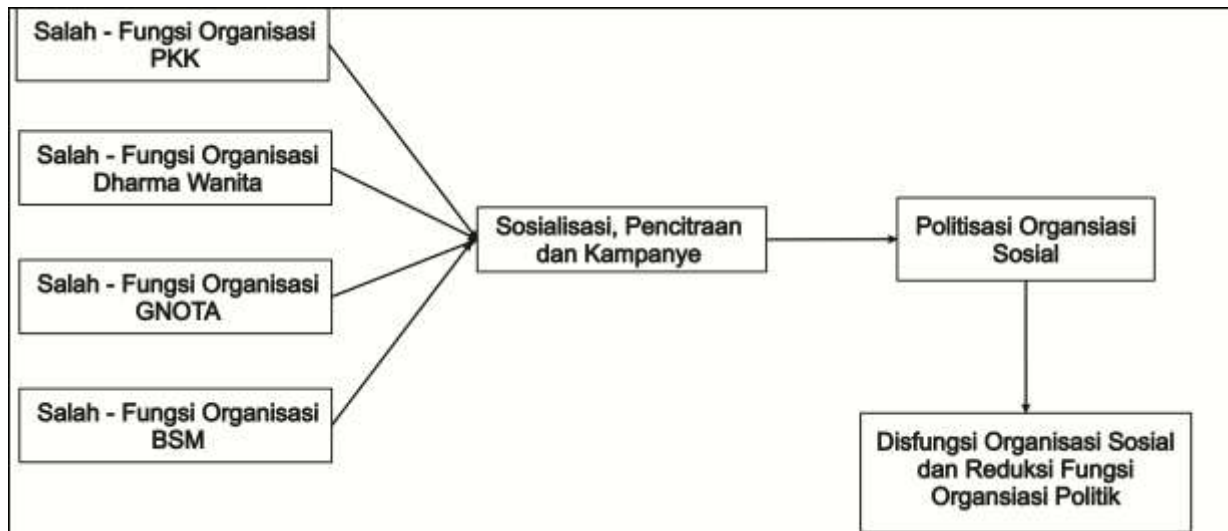
Berdasarkan sejumlah pengalaman tersebut, akhirnya berkembang kesimpulan di kalangan masyarakat bahwa masukan dan kritik apa pun kepada Bagus Permadi tidak akan berhasil mempengaruhi keputusan dan kebijakannya, sehingga mengakibatkan berkembangnya rasa apatisme di kalangan masyarakat terhadap

perilaku pejabat publik, seperti sekretaris kota, kepala dinas, dan lebih-lebih walikota sebagai pejabat politik.

Secara teoretik dikenal sejumlah sebutan masyarakat sesuai dengan ranah kegiatan dan kepedulian utamanya, misalnya: masyarakat ekonomi (*economic society*) dengan ranah kegiatan dan kepedulian utama keuntungan, masyarakat politik (*political society*) dengan ranah kegiatan dan kepedulian utama kekuasaan, dan masyarakat sipil (*civil society*) dengan ranah kegiatan dan kepedulian utama pemberdayaan dan kemerdekaan. Sejumlah organisasi sosial sebagaimana telah dibahas, yaitu PKK, Dharma Wanita, GNOTA, dan BSS jelas bukan merupakan organisasi politik. Secara normatif, organisasi demikian tidak dimaksudkan sebagai piranti untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan sebagaimana organisasi dalam masyarakat politik.

Namun demikian, sebagaimana sejumlah kasus yang telah diuraikan berdasarkan kenyataan lapangan, ternyata organisasi-organisasi sosial yang bahkan dengan sengaja dibentuk sebagai wahana pemberdayaan masyarakat, telah banyak disalah-gunakan (*abused*) sebagaimana layaknya partai politik. Melalui organisasi bentukan pemerintah ini, seorang isteri walikota tidak hanya bisa merekayasa citra politiknya, mensosialisasikan pencalonan dirinya, serta berkampanye untuk mempengaruhi para anggota organisasi agar memilih dirinya dalam Pemilu. Dengan demikian, telah terjadi kesalahan-fungsi (*dysfunction and malfunction*) pada

organisasi sosial dimaksud. Kesalahan-fungsi ini terjadi karena memang ada unsur kesengajaan untuk menyalah-gunakan organisasi sosial sebagai "organisasi politik".



Gambar 4.13: Model Disfungsi NGOGO

Bila sebuah organisasi sosial telah digunakan sebagai wahana untuk pencitraan, untuk sosialisasi, dan untuk kampanye seorang calon pejabat politik, maka bisa pula disimpulkan telah terjadi politisasi terhadap organisasi sosial. Selanjutnya, kalau organisasi sosial telah dipolitisasi sedemikian rupa, sebagai akibatnya adalah ketidak-berfungsian (*unfunction*) pengecilan (*reduction*) fungsi organisasi politik yang sebenarnya. Dalam kerangka sistem politik, bisa disimpulkan pula bahwa politisasi organisasi sosial telah ikut menyumbang pada kehancuran atau kerusakan sistem politik yang seharusnya.

Kemungkinan untuk menyalah-gunakan organisasi sosial bentukan pemerintah untuk kepentingan politik tersebut pada dasarnya memberi kesempatan lebih besar bagi terjadinya praktik politik nepotisme, karena jabatan dalam organisasi sosial bentukan pemerintah, seperti pada PKK, Dharma Wanita, GNOTA dan BSS bersifat *ex officio* bagi isteri kepala daerah. Mengapa? Karena bisa diasumsikan, seandainya seorang isteri walikota tidak secara *ex officio* menjadi pimpinan sejumlah organisasi sosial tersebut, maka peluang untuk bisa menyalahgunakannya demi tujuan politik isteri walikota menjadi relatif tertutup.

2. Jejaring Politik Nepotisme Daerah

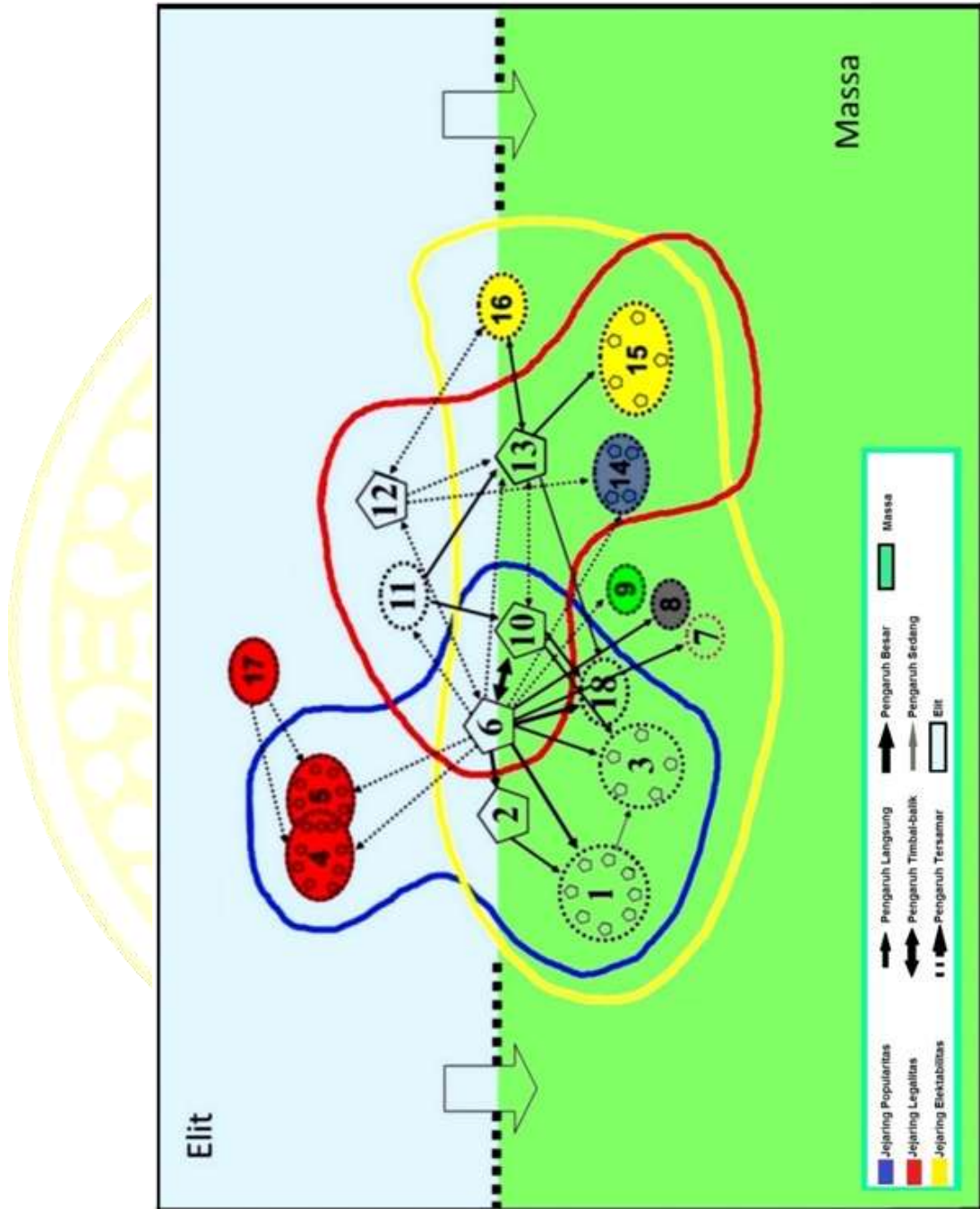
Jejaring korupsi politik adalah seperangkat terbatas hubungan antar pelaku yang di dalamnya mengalir baik informasi maupun pengaruh, yang memungkinkan seseorang yang menguasai informasi dan pengaruh besar melakukan penyalahgunaan kekuasaan legal-formal demi keuntungan dan kekayaan pribadi dan atau orang lain. Bertolak dari definisi kerja ini, maka sebuah model utuh jejaring politik nepotisme daerah harus mencakup seluruh aspek sebagaimana telah dibahas sebelumnya, yaitu: (1) para aktor jejaring politik nepotisme, (2) organisasi spasial jejaring politik nepotisme, dan (3) arah relasional jejaring politik nepotisme.

Mengingat jejaring tersebut berfungsi untuk memperkecil peluang kegagalan pada semua ranah atau tahapan pemenangan pemilihan kepala daerah, maka cara kerja dari jejaring tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yakni kategori jejaring

yang menguatkan *nepos* (pihak yang didukung) dan jejaring yang melemahkan lawan *nepos*. Dua kategori tersebut dimaksudkan untuk empat hal, yakni pertama menghalangi lawan mendapat kesempatan secara legal di dalam bursa pencalonan; kedua kesempatan mendapatkan sekaligus menjaga kesempatan yang telah didapat pihak yang didukungnya; ketiga berupaya menjatuhkan citra rival politik dimata masyarakat; keempat membentuk berbagai opini publik sekaligus memelihara opini yang sudah diyakini tersebut.

Empat hal tersebut merupakan sebuah kegiatan yang diharapkan mampu mempengaruhi masyarakat atau dengan kata lain merupakan sebuah penyebab yang mampu membuat masyarakat mendukung hingga pemberian suara di bilik suara. Dengan demikian, setiap hal yang menjadi penyebab selalu berkaitan dengan akibat, sehingga dari empat penyebab yang kesemuanya diperankan oleh elit, muncul dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah akibat dari semakin banyaknya opinini yang diterima oleh masyarakat, maka masyarakat akan bertindak sesuai dengan apa yang ia dapatkan, misalnya ketika masyarakat menerima informasi baik (citra baik) dari seorang kandidat dan itu dilakukan oleh banyak pihak dan berulang kali, maka ia akan memberikan suaranya kepada aktor dicitrakan baik tersebut, demikian juga sebaliknya. Kemungkinan kedua, semakin banyak berita tentang citra baik seseorang, maka masyarakat semakin menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak alamiah, apalagi ketika masyarakat telah mengetahui bahwa media massa pun tidak selalu memberikan berita yang bebas dari keterpihakan.

Mempertimbangkan bahwa sebuah jejaring politik nepotisme daerah juga bekerja dalam konteks sosial-politik masyarakat, maka juga senantiasa ada sejumlah aktor elit dan massa. Dalam rangka identifikasi konsekuensi logik-empirik bekerjanya jejaring politik nepotisme daerah, dalam model utuh jejaring politik nepotisme daerah ini juga disertakan kawasan dunia atas (elit) dan dunia bawah (massa). Permasalahan yang dihadapi dalam pemodelan yang menyertakan kelompok elit dengan massa ini adalah belum bisanya para aktor individual dipetakan secara tersendiri di bagian atas dari gambar. Kelemahan demikian dipandang tidak terlalu mengganggu, karena tujuan utamanya hanya untuk memperjelas bagaimana jejaring politik nepotisme daerah yang menggambarkan sejumlah aktor politik elit yang saling berinteraksi telah mempengaruhi sikap politik masyarakat, atau sikap masyarakat terhadap politik.



Gambar 4.14: Jejaring Lengkap Politik Nepotisme Daerah

3. *Disafeksi Politik Massa di Daerah*

a. Gejala Apatisme Politik Massa

Beberapa kasus yang diuraikan berikut merupakan sejumlah kejadian berhubungan dengan apatisme politik massa. Ketak-tertarikan, ketak-percayaan, dan ketak-pedulian masyarakat daerah penelitian terhadap politik semakin mengemuka karena beberapa kejadian yang cukup menonjol, yaitu: (1) kasus etika dan kepemimpinan politik aktor *nepotis*, (2) kasus favoritisme dan rekayasa dalam Musker PAC PDIP, (3) kasus advokasi tokoh kritis Ibnu Tricahyo, dan (4) kasus mutasi dan promosi pejabat pemerintah Kota.

1) Kasus Etika dan Kepemimpinan Politik

Masa kejayaan PDIP Kota Singapraja ditandai oleh kemenangan partai berlambang Banteng Moncong Putih ini sebagai partai yang meraih suara terbanyak di Kota Singapraja. Sebagai hasilnya, Bagus Permadi pun terpilih sebagai salah satu anggota DPR RI dari PDIP, dan Sri Sendari sebagai Ketua DPRD Kota Singapraja. Peluang Sri Sendari menjadi Ketua DPRD ada karena PDIP merupakan partai dengan jumlah kursi terbanyak, yaitu: 17 dari 45 kursi DPRD Kota Singapraja.

Beberapa tahun sebelum Pemilu 1999, Bagus Permadi yang menjabat sebagai Ketua DPC PDI versi Megawati Sukarnoputri, memiliki hubungan dekat dengan Bambang GW selaku Sekretaris DPC PDI versi Megawati Sukarnoputri. Bersama-sama para kader PDIP, misalnya Wirlo Hadi (yang kemudian menghilang dan akhirnya meninggal), serta Abdul Hakim (yang sekarang tetap menjadi kader PDIP dan

terpilih menjadi anggota DPRD PDIP pada Pemilu 2014), Bagus Permadi tidak hanya terlibat dalam perjuangan dan persaingan politik, tetapi juga melakukan sejumlah tindak kekerasan bermotif politik.

Dalam kapasitas sebagai Ketua DPC PDIP Kota Singapraja, Bagus Permadi setidaknya mengetahui dan mengizinkan Wirlo Hadi dan sejumlah kader PDIP yang beratribut Banteng Muda melakukan tindak kekerasan terhadap para mahasiswa dan aktivis yang melakukan unjuk-rasa menuntut agar Megawati Sukarnoputri dan Hamzah Haz untuk turun dari jabatan sebagai presiden dan wakil presiden. Dalam kapasitas sebagai Ketua Yayasan STIBA Singapraja, Bagus Permadi setidaknya telah mengetahui dan mengizinkan Abdul Hakim untuk mengintimidasi dan membujuk Presma STIBA Singapraja, Imam Khoiruddin, untuk menghentikan aksinya melawan keputusan Yayasan STIBA Singapraja yang mengangkat Lestari Rahayu menjadi Ketua STIBA Singapraja.

Kemenangan Bagus Permadi dalam Pilkada oleh DPRD Kota Singapraja adalah justru ketika sidang pemilihan dipimpin oleh rekan separtainya, Sri Sendari. Selanjutnya, kekuasaan Bagus Permadi sebagai Walikota Singapraja periode pertama juga berjalan relatif mulus selama kepemimpinan DPRD dipegang oleh Sri Sendari. Mirip dengan Bagus Permadi yang mengundurkan diri dari jabatan selaku anggota DPR RI untuk mencalonkan diri sebagai Walikota Singapraja, Sri Sendari juga agak jauh hari menunjukkan niat yang sama, bermodal status sebagai anggota DPR RI,

berniat mencalonkan diri sebagai Walikota Singapraja, sehingga menjadi pesaing bagi Wara Srikandi.

Dari uraian tersebut tampak bahwa rekan-rekan Bagus Permadi, antara lain Bambang GW, Wirlo Hadi, Abdul Hakim, dan Sri Sendari adalah kawan-kawan seperjuangan Bagus Permadi, yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi kemenangan dia sebagai Walikota Singapraja. Namun demikian, Bambang GW dan Wirlo Hadi dinilai Bagus Permadi cukup membahayakan kedudukannya sebagai Ketua DPC PDIP Kota Singapraja, sehingga Bambang GW diberhentikan secara sepihak, sedangkan Wirlo Hadi yang juga berambisi menjadi Ketua DPC PDIP Kota Singapraja, akhirnya menghilang dan ditemukan meninggal dunia, hingga mayatnya dibawa ke ruang mayat RSSA Kota Singapraja.

Berbeda dari Bambang GW, saat terjadi konflik internal dalam tubuh PDIP Kota Singapraja, Abdul Hakim memilih tetap loyal kepada DPP PDIP, yang kemudian juga ikut mendukung pengamanan rekomendasi DPP PDIP untuk pencalonan Sri Sendari dan Priyatmoko sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Singapraja. Karena loyalitasnya kepada partai tersebut, maka Abdul Hakim berkesempatan mengikuti Pemilu Legislatif 2014, dan akhirnya menjadi salah satu calon anggota legislatif yang berhak duduk di DPRD Kota Singapraja.

Uraian tersebut dengan jelas menggambarkan bahwa Bagus Permadi cenderung menunjukkan perilaku politik yang tidak segan-segan menyingkirkan rekan-rekan seperjuangan demi mengamankan kepetingan dan kedudukannya, baik dalam

kepengurusan partai, maupun dalam jabatannya sebagai kepala daerah. Bagus Permadi adalah tipe pemimpin yang tidak menghendaki pesaing, atau tidak menghendaki adanya "matahari kembar", yang dia nilai membahayakan kedudukannya. Kepada siapa pun yang membahayakan kedudukannya, Bagus Permadi tidak segan-segan untuk menghentikannya, baik melalui mekanisme partai dan kebijakan dia sebagai Ketua DPC PDIP Kota Singapraja, maupun melalui cara-cara lain.

Kalau Bambang GW diberhentikan secara sepihak, maka Wirlo Hadi dilaporkan menghilang dan akhirnya ditemukan meninggal. Juga saat Sri Sendari menghadapi kasus hukum di Pengadilan Negeri Kota Singapraja, mantan Ketua DPRD Kota Singapraja yang mengantarkan kemenangan Bagus Permadi hingga terpilih menjadi Walikota Singapraja ini sama sekali tidak mendapatkan pembelaan dari Bagus Permadi, baik selaku Walikota Singapraja maupun Ketua DPC PDIP Kota Singapraja. Meskipun tidak diungkapkan secara tersurat, berdasarkan informasi dari mantan Sekretaris Kota Singapraja, Cahya, ada kegembiraan tersembunyi bila Sri Sendari menyusul rekan-rekannya sesama anggota DPRD dari partai lain, yaitu: Agus Sukanto dan Achmad Zaenuri, dinyatakan bersalah dan menjadi narapidana kasus korupsi.

Beruntung bagi Sri Sendari, meskipun pihak kejaksaan negeri menyatakan kasasi atas putusan bebasnya, ternyata ada kesalahan prosedur yang menurut Hukum Acara Pidana, kasasinya harus batal demi hukum. Kesalahan prosedur yang dimaksud

berupa keterlambatan pengiriman berkas lengkap untuk kasasi. Karena itu, putusan bebas yang diterima oleh Sri Sendari diterima sebagai memiliki nilai keputusan yang sudah tetap (*inkrach*).

Selain kesaksian dari mantan Sekretaris Kota tentang sikap pribadi Bagus Permadi terhadap nasib Sri Sendari yang tidak menunjukkan keprihatinan sebagai sesama kader PDIP, kecenderungan Bagus Permadi untuk merintangai peluang Sri Sendari mencalonkan diri sebagai Walikota Singapraja juga dikemukakan pada saat Rakercab PDIP Kota Singapraja di Kartini Imperial Building atau gedung TP PKK Kota Singapraja Jalan Tangkuban Perahu, Kamis (29/12/2011), bahwa Calon Walikota Singapraja harus tidak pernah tersandung kasus hukum (seperti Sri Sendari).

Walaupun hanya ada satu calon tunggal untuk Walikota Singapraja, namun PDIP membuka peluang kepada kader lain yang mau mendaftar dan mencalonkan diri menjadi walikota. Siapa saja boleh mendaftar asalkan bisa memenuhi berbagai persyaratan yang telah disepakati partai. Adapun beberapa persyaratan itu yaitu, kualitas SDM, ketokohan di partai dapat dibuktikan, kesejarahannya jelas, tidak ada keterlibatan dengan masalah hukum dan mempunyai anggaran. Apabila bisa memenuhi syarat tersebut, silahkan saja mendaftar ke PDI Perjuangan (Sumber Data pada lampiran 6: 4.19).

Masih berkaitan dengan upaya Bagus Permadi untuk mendiskreditkan Sri Sendari, baik untuk kepentingan mendapatkan rekomendasi DPP PDIP maupun untuk menumbuhkan sikap antipati dari warga Kota Singapraja, jauh hari sebelum masa pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Singapraja dibuka, sudah beredar stiker ukuran besar ratusan angkutan kota yang beroperasi di Kota Singapraja yang

bergambar Wara Srikandi Utama, dengan pesan khusus yang antara lain bertulisan “GAK TAU KASUS”, yang berarti tidak pernah terlibat kasus hukum. Mau tidak mau, stiker ini mengingatkan pada Sri Sendari yang sempat disidangkan di pengadilan negeri, walaupun kemudian diputus bebas.

2) Kasus Favoritisme dan Rekayasa Musker PAC PDIP

Memperhatikan perilaku politik Bagus Permadi, baik ketika berhadapan dengan pesaing-pesaing politik di internal PDIP maupun ketika berhadapan dengan pesaing di luar partainya, sangat terkesan bahwa Bagus Permadi cenderung berperilaku oligarkhis. Dalam memegang tampuk kepemimpinan DPC PDIP Kota Singapraja, Bagus Permadi berhasil menyingkirkan sesama kader PDIP yang berpotensi mengalahkannya. Cara-cara yang digunakan untuk menyingkirkan mereka pun tidak hanya melalui proses demokratis, tetapi juga cara-cara represif. Kader PDIP seperti Bambang GW, Wirlo Hadi, dan Sri Sendari, termasuk orang-orang yang berpotensi mengalahkan Bagus Permadi dalam persaingan menjadi Ketua DPC PDIP, sehingga perlu disingkirkan.

Ciri kedua dari kepemimpinan Bagus Permadi adalah mengangkat dan mempertahankan siapa pun yang dinilai tidak membahayakan posisinya dalam struktur kekuasaan. Tentu saja, orang pertama yang dianggap paling tidak membahayakan posisinya adalah Wara Srikandi, isterinya sendiri, yang kemudian berhasil diatur agar bisa menjabat sebagai Bendahara DPC PDIP Kota Singapraja. Kader lain dari kader PDIP Kota Singapraja yang dia anggap sama sekali tidak

membahayakan posisinya adalah Wijiyanto, sehingga dia upayakan dan berhasil menjadi Sekretaris DPC PDIP Kota Singapraja.

Telah disinggung, akhirnya Wijiyanto diberhentikan dengan tidak hormat dari status keanggotaan dan jabatan sebagai Sekretaris DPC PDIP Kota Singapraja bersama dengan pemberhentian Bagus Permadi sebagai Ketua DPC PDIP Kota Singapraja. Sementara itu, Wara Srikandi diberhentikan dari status keanggotaan dan Bendahara DPC PDIP Kota Singapraja setelah terbukti mendaftarkan diri sebagai Calon Walikota Singapraja dengan dukungan dari partai lain.

Perilaku politik Bagus Permadi yang cenderung menghapuskan sama sekali ancaman terhadap posisinya dalam struktur kekuasaan juga tampak jelas dari hubungannya dengan Basukarno. Ketika untuk kali pertama Bagus Permadi menggandeng Ketua DPD Partai Golkar Kota Singapraja, Basukarno untuk menjadi calon wakil walikota, sangat boleh jadi pertimbangan utamanya adalah untuk menjamin kemenangan dalam Pilkada tak langsung melalui pemungutan suara di DPRD Kota Singapraja.

Sebagai pasangan yang dicalonkan oleh Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Golkar, pasangan Bagus Permadi dan Basukarno dipastikan mendapatkan 17 suara dari F- PDIP dan 7 suara dari F-PG, sehingga berjumlah 24 suara, dari 45 suara yang diperebutkan. Sebagaimana dibahas pada bagian lain, akhirnya pasangan Bagus Permadi dan Basukarno ini berhasil memenangi Pilkada tak langsung, dan menjadi Walikota dan Wakil Walikota Singapraja (2003-2008).

Berdasarkan pengalaman berpasangan pada periode 2003-2008, tampaknya Bagus Permadi tidak melihat Basukarno sebagai ancaman terhadap posisinya sebagai Walikota Singapraja. Karena itu, ketika mencalonkan diri kembali menjadi Walikota Singapraja periode berikutnya, Bagus Permadi tetap mempertahankan Basukarno sebagai Calon Wakil Walikota Singapraja.

Selaku Ketua DPC PDIP Kota Singapraja, Bagus Permadi tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP, dan tentu saja lembar pendaftaran yang dia tandatangani sendiri selaku Ketua DPC PDIP Kota Singapraja. Akan halnya Basukarno, ternyata tidak mendapatkan dukungan dari Partai Golkar, sehingga berposisi menumpang pada pencalonan yang diajukan oleh DPC PDIP Kota Singapraja. Partai Golkar tidak mendukung Basukarno karena kedudukannya tidak lagi menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Singapraja, dan berkoalisi dengan PAN yang mencalonkan R. Aries Pudjangkoro dan Mohan Katelu, sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Singapraja.

Meskipun berdasarkan hasil Pemilu Legislatif dominasi PDIP di Kota Singapraja telah dipatahkan oleh Partai Demokrat, Bagus Permadi yang berpasangan dengan Basukarno yang tidak didukung oleh partainya sendiri, Bagus Permadi dan Basukarno tetap percaya diri karena telah memiliki modal politik cukup besar sebagai pasangan calon petahana (*incumbent*). Ini menunjukkan bahwa ketergantungan Bagus Permadi terhadap organisasi dan pemilih PDIP tidak lagi mutlak. Ketika itu, perolehan suara PDIP Kota Singapraja di masing-masing

kecamatan sebagai berikut: Sukun sebanyak 18.762 suara, Kedung Kandang 15.985 suara, Lowok Waru 11.370, Klojen 7.150 Suara, dan Blimbing 12.118 suara, sehingga total jumlah suara yang dicapai oleh PDIP Kota Singapraja adalah 65.385 suara dari jumlah suara sah total 299.293 suara. Pasangan Bagus Permadi dan Basukarno yakin bahwa kerja dan kualitas pribadi mereka cukup mampu untuk memenangkan Pilkada Langsung Kota Singapraja 2008.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, tampak bahwa Bagus Permadi tidak hanya berhasil menyingkirkan para pesaingnya, tetapi juga berhasil merekrut hanya orang-orang yang menurut penilaiannya akan loyal kepada dirinya, dengan bila perlu mengorbankan keutuhan partai, baik partai politiknya sendiri maupun partai politik lain. Perilaku politik Bagus Permadi tidak saja memecah-belah PDIP Kota Singapraja, tetapi juga berhasil memecah-belah Partai Golkar.

Gaya memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dengan memecah-belah kolektiva Bagus Permadi juga tampak misalnya dari upayanya untuk menghentikan unjuk-rasa yang dilakukan oleh para aktivis STIBA Singapraja. Cara pertama yang bersifat represif dilakukan dengan tidak hanya mengirimkan para preman untuk menduduki dan mengawasi kampus selama 24 jam, menggunakan "jasa" aparat negara untuk mengancam orang per orang dan bahkan mendukung keputusan pimpinan STIBA Singapraja untuk menahan sejumlah aktivis mahasiswa, dan terakhir yang melalui Abdul Hakim, berusaha menyuap Presma STIBA Singapraja,

Imam Khoiruddin dengan sejumlah uang yang cukup besar untuk ukuran seorang mahasiswa.

Contoh kasus lebih jelas dari rekayasa Bagus Permadi untuk memaksakan kehendaknya adalah dengan menguasai kepengurusan PAC PDIP agar dapat secara mutlak mengajukan Wara Srikandi menjadi Calon Walikota Singapraja melalui DPC PDIP Kota Singapraja. Sebagaimana diketahui, dengan kepemimpinan yang tak tergantikan melalui proses demokrasi --- karena pemberhentiannya dilakukan berdasarkan surat keputusan pemecatan --- Bagus Permadi berhasil mendominasi seluruh proses pengambilan keputusan dalam tubuh kepengurusan DPC PDIP Kota Singapraja. Ditopang oleh kedudukannya sebagai Walikota Singapraja selama dua periode, Bagus Permadi pun menjadi kekuatan yang sangat menentukan pada pemilihan pimpinan PAC-PAC PDIP Kota Singapraja. Para pimpinan PAC PDIP ini yang kemudian direkayasa sedemikian rupa oleh Bagus Permadi sehingga secara bulat memilih isterinya sendiri, Wara Srikandi, menjadi bakal calon Walikota Singapraja dari DPC PDIP Kota Singapraja.

Sebagaimana pernah diberitakan, tekad PDI Perjuangan Kota Singapraja untuk mengusung Dra. Hj. Wara Srikandi, M.AP dalam pemilihan Walikota Singapraja tahun 2013 mendatang semakin bulat. Istri waliKota Singapraja tersebut merupakan satu-satunya calon yang diusung oleh semua elemen partai mulai dari anak ranting, ranting, Pimpinan Anak Cabang (PAC) hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Singapraja.

Diusungnya calon tunggal itu sudah melalui mekanisme partai, seperti musyawarah-musyawarah yang digelar di tiap tingkatan partai beberapa waktu lalu. DPC PDI Perjuangan Kota Singapraja hanya memunculkan satu calon, dan calon ini harus didukung semua komponen partai untuk memenangkan pemilihan waliKota Singapraja tahun 2013 mendatang.

Itulah yang disampaikan oleh ketua DPC PDI Perjuangan Kota Singapraja, Drs. Bagus Permadi, M.AP pada acara pembukaan rapat kerja cabang (Rakercab) PDI Perjuangan yang dihelat di Kartini Imperial Building atau gedung TP PKK Kota Singapraja Jalan Tangkuban Perahu, Kamis (29/12). Rakercab ini merupakan agenda tahunan partai yang harus diikuti oleh kader partai.

Dalam sesi pembukaan rakercab itu, PDI Perjuangan Kota Singapraja juga mendatangkan perwakilan partai lain, seperti halnya dari PKS, Partai Hanura, Partai Golkar, anggota DPR RI dari Dapil Singapraja Raya, Sri Sendari, dari DPD PDI Perjuangan Jatim dan juga Bupati Probolinggo.

Ketua DPC PDI perjuangan yang juga Walikota Singapraja itu menyampaikan, selain akan memenangkan pemilihan walikota, pihaknya juga menargetkan agar PDI Perjuangan di Kota Singapraja juga bisa memenangkan pemilihan legislatif serta pemilihan presiden tahun 2014 mendatang. "Mari kita merahkan Kota Singapraja untuk pesta demokrasi mendatang," ujarnya lantang Achmad Syaiful Afandi Jumat, 30 Desember 2011 dalam Hukum, Politik, dan Pemerintahan (Sumber Data pada lampiran 6: 4.20).

Secara umum, baik warga Kota Singapraja maupun kelompok masyarakat kritis, khususnya dari kalangan terdidik, para pemuka agama, para akademisi, aktivis LSM, para aktivis mahasiswa, serta para aktivis partai politik bukan tidak tahu tentang berbagai perilaku tidak etis yang dilakukan oleh Bagus Permadi. Mereka semua mengetahui, sebagaimana mereka menceritakan kembali agar dapat ditulis dalam deskripsi ini. Namun demikian, mereka tidak memiliki gairah atau semangat lagi untuk mempersoalkan secara terbuka berbagai perilaku tidak etis tersebut. Apatisme terhadap keberhasilan kritik yang tertuju kepada Bagus Permadi, ternyata tidak hanya ditimbulkan oleh rasa takut karena mengetahui cara-cara yang sangat mungkin ditempuh oleh Bagus Permadi dan orang-orangnya, tetapi juga karena telah

melihat begitu banyak kritik baik yang keras maupun yang lunak cenderung gagal dalam arti tidak memberikan efek sebagaimana diharapkan.

3) Kasus Advokasi Tokoh Kritis Ibnu Tricahyo

Nama Ibnu Tricahyo tidak asing lagi bagi masyarakat Kota Singapraja, terutama yang senantiasa mengikuti perkembangan sosia, politik dan hukum di Kota Singapraja, baik melalui media cetak maupun elektronik. Ibnu Tricahyo adalah dosen Fakultas Hukum, yang juga Ketua PP Otda Universitas Maharaja Singapraja. Sikapnya yang kritis terhadap kebijakan dan perilaku pejabat publik di Kota Singapraja membuatnya sebagai sumberdata utama bagi para wartawan di Singapraja Raya. Beberapa kritik tajam yang dia utarakan berkenaan dengan rencana pembangunan Singapraja Town Square, rencana pembangunan Alun-alun Junction rencana renovasi Stadion Gajahyana yang diikuti pembangunan mall dan mess atlet di sekitarnya (Sumber Data pada lampiran 6: 4.21).

Karena kritik-kritiknya acapkali didasarkan pada suara masyarakat yang terpinggirkan, maka Ibnu Tricahyo seolah-olah menjadi juru bicara bagi sebagian masyarakat Kota Singapraja, terutama mereka yang terpinggirkan serta kalangan mahasiswa yang juga bersikap kritis. Sesuai disiplin ilmunya, dalam mengevaluasi dan mengajukan kritik terhadap kebijakan Walikota dan Pemerintah Kota Singapraja, Ibnu Tricahyo senantiasa melengkapi dirinya dengan berbagai dokumen kebijakan terkait. Untuk itu, pada tanggal 14 Desember 2005, Ibnu Tricahyo merasa perlu mendatangi Gedung DPRD untuk mendapatkan salinan draf RDRTK. Ternyata,

sebuah insiden pemukulan terhadap dirinya terjadi saat Ibnu Tricahyo berada di depan ruang Fraksi PKS DPRD Kota Singapraja.

Ibnu Tricahyo dipukuli oleh sekelompok orang tak dikenal saat mendatangi DPRD Kota Singapraja, Rabu (14/12/2005) sore kemarin. Saat itu, Ibnu yang didampingi seorang staf perempuan datang untuk mengambil draf RDRTK. Saat sedang menunggu di depan ruangan Fraksi PKS, tiba-tiba Ibnu didatangi sekelompok orang tak dikenal. Kelompok orang tersebut, tanpa ba-bi-bu langsung menghajar Ibnu. Ibnu pun menderita luka di wajah dan hidung, serta pelipisnya berdarah. Teman Ibnu luput dari aksi kekerasan ini. Menurut seorang saksi mata, saat kejadian sebenarnya banyak orang berada di depan ruang Fraksi PKS, termasuk satpam. Tapi kejadiannya begitu cepat sehingga tidak ada yang sempat mencegah. Juga tidak ada yang sempat mengenali pelaku (Sumber Data pada lampiran 6: 4.22)

Menyikapi insiden pemukulan tersebut, sejumlah elemen masyarakat berusaha melakukan advokasi agar kasusnya diselesaikan secara tuntas. Advokasi di sini dimaksudkan sebagai pembelaan baik secara melembaga maupun tidak agar pelaku penganiayaan terhadap tokoh kritis Ibnu Tricahyo diusut dan diadili sebagaimana mestinya. Kasus penganiayaan ketua PP Otoda, Ibnu Tricahyo tersebut, ternyata tidak pernah mendapat tanggapan serius dari Pemerintah Kota Singapraja walaupun keesokannya ratusan orang yang berasal dari sivitas akademika Universitas Maharaja (Unima), yang terdiri dari kalangan dosen, karyawan dan mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Maharaja, Singapraja, dengan mendatangi Balai Kota Singapraja.

Para pengunjuk rasa melakukan protes atas aksi pemukulan terhadap salah seorang dosen FH Unima yang diduga dilakukan preman suruhan Walikota Singapraja Bagus Permadi. Tidak cukup itu, aksi yang lebih terstruktur pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2005 yang diikuti oleh beberapa elemen yaitu sivitas

akademika FH Unima, Intrans, LPKI, Singapraja Corruption Watch (SCW), EM Unima, MUI, Paguyuban Rektor se-Singapraja Raya, BEM FH Jatim, Forum Masyarakat Tanjung (Format) FKA Unima, PP Otda Unima, LBH Singapraja, Singapraja Crisis Center (MCC), YPP, Walhi, KAMMI, HMI Hukum Unima, FPKM dan Fatayah Kota Singapraja (Sumber Data pada lampiran 6: 4.23).

Masih berdasarkan sumberdata yang sama, dalam aksi tersebut, para aktivis menyampaikan tujuh tuntutan,yaitu: (1) Hentikan kekerasan di Kota Singapraja; (2) Usut tuntas semua kasus kekerasan yang terjadi di Kota Singapraja; (3) Deadline waktu 1 minggu untuk ditetapkannya tersangka kasus Ibnu Tricahyo, SH, MH (dosen FH, Unima); (4) Deadline 1 bulan untuk diketahuinya modus, motif dan pelaku intelektual dibalik kasus tersebut; (5) Jaminan keamanan bagi masyarakat unuk menyampaikan aspirasi; (6) Meminta kepada pihak DPRD untuk memberikan pernyataan sikap atas kekerasan yang terjadi di dalam lembaga tersebut karena hal tersebut merupakan penghinaan institusi lembaga DPRD yang terhormat dan yang terakhir, dan (7) Meminta kepada kepolisian untuk segera memeriksa saksi-saksi dari lembaga DPRD.

Setelah menggelar aksi tersebut, tidak ada tanggapan berarti dari pemerintah atas maslaah tersebut. Bahkan sebulan setelah insiden (15 Januari 2006), Kasatreskrim Polresta Singapraja AKP Heru Prasetya SIK menegaskan kalau belum bisa melimpahkan berkas perkara kasus pemukulan di gedung wakil rakyat daerah tersebut ke Kejaksaan Negeri. Semua sudah tahu dan jelas tentang korbannya, tetapi

belum bisa diajukan ke kejaksaan karena belum ada tersangka untuk kasus tersebut. Ternyata, hingga Ibnu Tricahyo meninggal pada tanggal 6 Maret 2013 (Sumber Data pada lampiran 6: 4.24), kasus tersebut tidak pernah ditindak-lanjuti lagi.

4) Kasus Mutasi dan Promosi Pejabat Pemerintah Kota

Mutasi yang lazim dibedakan dari promosi dan demosi, merupakan perpindahan kerja seseorang pegawai dalam suatu organisasi, yang memiliki tingkatan sama dengan tingkat jabatan yang sebelumnya diduduki oleh seseorang. Dengan lebih sederhana, mutasi adalah kegiatan pemindahan personil dari satu tempat ke tempat lain yang masih sederajat. Secara teoretik, mutasi berguna sebagai sebuah cara untuk meningkatkan kinerja seseorang. Selain itu mutasi juga berfungsi untuk menghindari kejenuhan pegawai terhadap rutinitas pekerjaan, baik jenuh terhadap lingkungan kerja, maupun bidang kerja yang ditangani. Mutasi terkadang juga berguna untuk memperkaya pengalaman seorang pegawai sebelum yang bersangkutan mendapatkan promosi. Walaupun sebenarnya merupakan persoalan manajerial biasa, dalam praktik politik daerah, ternyata mutasi, promosi dan demosi juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik pejabat publik, termasuk dalam rangka pemenangan pemulikada.

Setelah terpilih menjadi walikota untuk kedua kalinya (periode 2008-2013), Bagus Permadi pada tanggal 8 oktober 2010 melakukan agenda mutasi di jajaran Kota Singapraja. Mutasi yang dilaksanakan terhadap 212 orang pejabat tersebut, salah satunya menetapkan Plt. Sekretaris Kota Singapraja Singapraja M. Joyodroto, sebagai Sekkota definitif.

"Ir. R. Imam Santoso, M.Si., Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat dipromosikan menjadi Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan, Sri Wahyuningtyas, Sekretrais Dinas Pendidikan Kota Singapraja, diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Singapraja. Posisi ini sebelumnya ditempati Dr. M. Joyodroto SH.M.Si., yang di tetapkan sebagai Sekretris Daerah Kota Singapraja.

Sedangkan seorang lagi, pejabat eselon III yang mendapat promosi adalah Kepala Bagian Pemerintahan Pemkot Singapraja, H. Jalil SH. Jalil merupakan pejabat eselon III yang paling lama menduduki jabatan Kepala Bagian, sejak tanggal 8/10 kemarin Jalil dipercaya oleh Walikota Singapraja untuk menduduki jabatan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial menggantikan Drs. H. Wahyu Santoso M.Si.

Posisi Wahyu Santoso, digeser menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Singapraja, yang ditinggalkan oleh Drs. Burhanudin, M.Si., sedangkan Burhanudin, mengisi posisi Asisten III yang ditinggalkan Drs. H. Imam Buchori MSi, memasuki masa purna tugas per 1 Oktober kemarin.

Sementara Drs. H. Abdul Malik, MPd, seperti yang diperkirakan sebelumnya, ditetapkan sebagai Sekretaris DPRD Kota Singapraja. Sekwan ini telah lama kosong semenjak ditinggalkan oleh Drs. H. Kaolan, M.Si., yang pensiun lima bulan silam (Sumber Data pada lampiran 6: 4.25).

Memang cukup banyak jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah.

Namun demikian, secara struktural karir atau jabatan puncak seorang pegawai daerah adalah menjadi Sekretaris Daerah, karena Sekretaris Daerah pada dasarnya adalah atasan bagi seluruh pegawai negeri sipil daerah. Karena itu, kepanjangan tangan sebenarnya dari kewenangan seorang walikota atau bupati untuk menjangkau atau memerintah semua pejabat dan pegawai daerah adalah Sekretaris Daerah. Seorang Sekretaris Daerah tidak hanya memiliki kewenangan terhadap pegawai daerah, tetapi mengetahui secara rinci semua aset, sumberdaya, hingga aliran dana dalam pemerintahan daerah.

Menurut Ach. Subakir, koordinator pengawas sekolah Kota Singapraja, yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Depdikbud Kota Singapraja, M. Joyodroto memiliki sifat sangat responsif dalam arti mampu menyerap berbagai gagasan dan aspirasi yang dia dengar dari orang lain, serta mampu mengubahnya menjadi sebuah program kerja yang bagus. Persoalannya, saat program kerja tersebut dilaksanakan, sering kali M. Joyodroto justru tidak melaksanakannya secara kooperatif. M. Joyodroto cenderung bekerja dan "bermain" sendiri.

Pak Joyodroto itu responsif tapi tidak konsisten, setelah dipegang informasi awalnya saja, setelah itu nanti gimana *ndak weruh*. Seperti waktu itu Dewan Pendidikan membuat lomba desain gedung perpustakaan. Dewan Pendidikan yang menyiapkan proposal dan segala sesuatunya untuk diajukan ke Pemerintah Pusat. Setelah disetujui Pusat, Anggaran diterima Pemerintah Kota, Dewan Pendidikan tidak pernah diajak lagi, dilaksanakan sendiri oleh Dinas Pendidikan Kota Singapraja. Kejadian seperti itu sudah berkali-kali dia lakukan (Sumber Data pada lampiran 6: 4.26)

Meskipun cenderung bekerja dan bahkan berpolitik sendiri, M. Joyodroto juga dikenal sebagai pejabat daerah yang sangat loyal kepada kepala daerah, siapa pun yang menjadi Walikota Singapraja. Karir M. Joyodroto menanjak sejak jaman Walikota Suyitno, dua periode Bagus Permadi, dan berlanjut hingga M. Anton. Memang ada banyak rumor dan gosip tentang M. Joyodroto, baik selama kepemimpinannya di Dinas Pendidikan Nasional maupun ketika menjadi Sekretaris Daerah. Semua rumor dan gosip yang menyentuh nama M. Joyodroto senantiasa memudar, hingga secara tiba-tiba diberitakan kalau Gubernur Soekarwo

memindahkan M. Joyodroto menjadi staf di Pemerintah Provinsi, dan menempatkan seorang pejabat sementara dari provinsi (Sumber Data pada lampiran 6: 4.27).

Masih ada ciri lain dari sosok M. Joyodroto yang menjadi tangan kanan Bagus Permadi dalam upaya meningkatkan popularitas dan elektabilitas Wara Srikandi. M. Joyodroto merupakan pejabat daerah yang benar-benar memahami dan menerapkan prinsip transaksional dalam berhubungan dengan orang lain. Ini tidak hanya menyangkut kedudukannya sebagai atasan bagi para pejabat daerah lain, baik SKPD maupun Kepala Sekolah, tetapi juga saat harus berhubungan dengan Bagus Permadi selaku Walikota Singapraja. Bila diketahui melakukan kesalahan yang berpotensi mengancam jabatannya, maka M. Joyodroto mau menebus kesalahan tersebut dengan berbagai cara, termasuk dengan merendahkan diri sendiri.

Lha kelebihan ada di situ, dia bisa menjatuhkan diri, merendahkan dirinya sendiri asal tujuannya tercapai, saya bisa mengatakan demikian ini karena saya pernah diajari sendiri, kalau kita ada salah yang itu mengancam kita dari jabatan, ya kita harus ganti itu, kita harus bayar. Itu jawaban dari dirinya, hanya untuk mempertahankan dirinya pada jabatan tertentu (Sumber Data pada lampiran 6: 4.28).

Dengan dedikasi pribadi M. Joyodroto kepada Bagus Permadi sebagaimana tergambar dalam prinsip dan perilakunya sebagai bawahan tersebut, maka M. Joyodroto berhasil meningkatkan jabatannya dari Kepala Dinas Pendidikan menjadi Sekretaris Daerah, dan mempertahankan kedudukan tersebut hingga jabatan walikota dimenangkan oleh M. Anton. Sementara itu, instansi Dinas Pendidikan Kota Singapraja, sesuai dengan prediksi banyak orang dipercayakan kepada Sri

Wahyuningtyas, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Singapraja, dan dilantik pada tanggal 08 oktober 2010.

Sekkota itu kan orang (dinas) pendidikan. Sebelum otonomi daerah, Pak Joyodroto kan pegawai pusat, sebagai Kakandepdikbud. Setelah Otonomi Daerah, dia diangkat sebagai kepala Dinas Pendidikan. Waktu itu saya masih Sekda. Itu jaman Walikotanya Pak Suyitno. Setelah itu yang menjabat di Dinas Pendidikan juga orangnya Pak Joyodroto. Jadi ya Pak Bagus Permadi *wes kari terimo matenge thok* [jadi ya, Pak Bagus Permadi tinggal menerima beresnya saja] (Sumber Data pada lampiran 6: 4.29).

Ada beberapa kasus hukum yang sempat diberitakan di sejumlah media cetak dan elektronik yang melibatkan M. Joyodroto dan atau Sri Wahyuningtyas, baik di lingkungan Dinas Pendidikan maupun Pemerintah Kota Singapraja secara umum. Di antaranya adalah: (1) pemotongan dana pendidikan, (2) penggelapan dan penggelembungan dana, (3) pemaksaan pembelian laptop, (4) berbagai pungutan liar sekolah, (5) pengadaan buku perpustakaan kelurahan, (6) pemaksaan pembelian buku sesuai kurikulum, (7) pembelian seragam sekolah, dan terakhir (8) pengadaan lahan rumah sakit umum daerah (Sumber Data pada lampiran 6: 4.30)

Berdasarkan uraian data tersebut, tampak bahwa meskipun ada sejumlah dugaan kasus pidana korupsi yang melibatkan Kepala Dinas Pendidikan dan atau Sekretaris Daerah, ternyata sama sekali tidak mempengaruhi penilaian Bagus Permadi terhadap M. Joyodroto dan Sri Wahyuningtyas. Kedua pegawai negeri sipil daerah ini malah mendapatkan promosi jabatan, dan bertahan sebagai pejabat daerah. Kejadian demikian yang senantiasa berulang, menjadikan masyarakat semakin apatis terhadap tidak hanya politik daerah di Kota Singapraja, tetapi juga berkenaan dengan

kehendak membangun pemerintah yang bersih dan pemerintahan yang baik (*clean government and good governance*).

b. Gejala Sinisme Politik Massa

Gejala sinisme politik massa, yang mencakup perasaan tak-berdaya, perasaan terasing, dan sikap sinis terhadap politik tercermin dalam sejumlah kejadian yang cukup menonjol, yaitu: (1) kasus politisi PDIP Wirlo Hadi menghilang dan meninggal, (2) kasus penganiayaan tokoh kritis Ibnu Tricahyo, dan (3) kasus premanisme di Kampus STIBA Singapraja.

Terkait dengan kasus-kasus tersebut, ada gejala menarik selama Bagus Permadi menjabat sebagai Walikota Singapraja. Meskipun ketika itu, sejalan dengan gejala umum pasca Reformasi berupa terbukanya peluang bagi siapa pun untuk bebas mengemukakan pendapat dan melakukan kritik, ternyata kritik terhadap kepemimpinan Bagus Permadi dan Basukarno selaku kepala daerah dan wakil kepala daerah relatif tidak begitu menonjol. Kontrol masyarakat terhadap pejabat publik, khususnya walikota, seolah mengalami kelumpuhan, atau bahkan mengalami mati suri, karena telah berkembang rasa trauma dan ketakutan massif. Sejumlah wartawan, misalnya M Ariful Huda dari Koran Kriminal dan Hukum *Memo Aresi*, yang berhasil diwawancarai, mengungkapkan dengan kalimat "relatif kondusif dan terkenal" (Sumber Data pada lampiran 6: 4.31).

Juga dijelaskan bahwa selama kepemimpinan Bagus Permadi, kelompok masyarakat kritis, termasuk mahasiswa, memang berusaha menahan diri tidak

melakukan kritik secara terbuka karena ada cukup banyak cerita bahwa Bagus Permadi termasuk politisi yang tidak segan menggunakan cara intimidasi dan represi terhadap siapa saja yang melakukan kritik secara terbuka. Akibat lebih lanjut dari menyebarnya cerita tentang ketidak-seganan Bagus Permadi menggunakan cara-cara intimidasi dan represi adalah berkembangnya rasa traumatik dan kejerian (rasa takut) bagi kelompok kritis untuk mengemukakan pendapat secara terbuka. Berikut adalah sejumlah cerita yang berkembang di kalangan kelompok kritis yang menjadikan mereka merasa kuatir dan takut untuk melakukan kritik terhadap kepemimpinan Bagus Permadi.

1) Kasus Politisi PDIP, Wirlo Hadi Menghilang dan Meninggal

Selain Bagus Permadi dan Sri Sendari, ada beberapa nama politisi PDIP yang cukup dikenal di Kota Singapraja, yaitu: Bambang GW, Wirlo Hadi, Priyatmoko, Widjiyanto, dan Abdul Hakim. Bambang GW adalah Sekretaris DPC PDI Kota Singapraja versi Promega ketika itu, yang bersama-sama Bagus Permadi selaku Ketua DPC PDI Kota Singapraja memimpin massa PDI Promega mengambil alih kantor DPC PDI yang semula dikuasai oleh PDI versi Suryadi. Selanjutnya, ternyata ada perbedaan pendapat atau lebih tepatnya persaingan antara Bagus Permadi dan Bambang GW, sehingga tanpa keputusan DPP PDI, kedudukan Bambang GW sebagai Sekretaris DPC PDI Promega dinonaktifkan oleh Bagus Permadi. Karena itu pula, pada perkembangan berikutnya, Bambang GW bergabung dan menjadi ketua DPC PNBK Kota Singapraja. Ada kabar bahwa politisi Kota Singapraja ini pernah

terlibat pertikaian dengan Bagus Permadi, dan sempat diintimidasi oleh para pendukung Bagus Permadi.

Hingga saat Bagus Permadi dipecat oleh DPP PDIP, Bambang GW sempat memberikan komentarnya melalui situs koran lokal. Bambang GW, mempersoakan sebuah advertorial yang tampak membela Bagus Permadi dan Widjiyanto.

Komentar mas harsono sangat tidak obyektif krn klu benar-benar memahami seharah beridirinya PDI Perjuangan sejak awal aku sangat terlibat aktif dengan berbagai resikonya tapi ketika aku digeser oleh saudara BagusPermadi saat itu kenapa anda tak ada komentar sama sekali??? aku pikir DPP PDI Perjuangan telah mengambil sikap dengan berbagai pertimbangan dan itu adalah keputusan organisasi tertinggi partai coba bandingkan dengan kondisi saat aku tiba-tiba dinonaktifkan tidak adan selebar surat keputusan apapun dari DPP PDI Perjuangan. Bicara sejarah haruslah kita lebih obyektif dan realistis jangan subyektif begitu!!! (Sumber Data pada lampiran 6: 4.32)

Kisah lebih memprihatinkan yang banyak beredar di kalangan masyarakat Kota Singapraja adalah akhir dari pertikaian antara Bagus Permadi dengan Wirlo Hadi. Sama dengan Bambang GW, Wirlo Hadi sebelumnya juga dikenal dengan Bagus Permadi. Politisi bertumbuh ramping dengan rambut agak gondrong ini, suatu ketika juga pernah bergabung dengan puluhan kelompok pemuda beratribut Banteng Muda Indonesia dan melakukan penyerangan terhadap mahasiswa anggota Badan Eksekutif Mahasiswa beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur, yang saat berunjuk rasa menuntut Megawati Sukarnoputri-Hamzah Haz turun dari jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Ketika itu, Wirlo Hadi adalah salah dari 17 anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Singapraja. Wirlo Hadi, meskipun pernah dekat dengan Bagus Permadi, dikenal cukup kritis dan berani bersaing dengan Bagus Permadi

untuk jabatan Ketua DPC PDIP Kota Singapraja. Sejumlah keputusan dan kebijakan Bagus Permadi pernah ditolak dan dikritik secara terbuka.

Setelah kejadian Wirlo Hadi mengkritik Bagus Permadi, tiba-tiba saja kader PDIP yang masih menjabat sebagai anggota FPDIP DPRD Kota Singapraja ini menghilang terhitung sejak 22 April 2003. Lebih dari satu tahun Wirlo Hadi membolos dan tidak menjalankan fungsinya sebagai anggota DPRD Kota Singapraja. Ada banyak spekulasi mengenai penyebab menghilangnya Wirlo Hadi. Selain diperkirakan takut menghadapi ancaman dari Bagus Permadi, juga terberitakan dalam koran setempat, bahwa Wirlo Hadi sedang memperdalam ilmu kesaktian di luar daerah. Kabar simpang-siur tersebut, akhirnya memperoleh kepastian setelah pada 17 Maret 2004, setelah tanpa sengaja tetangga korban mendapati foto korban meninggal dunia di kamar mayat RSUD Syaiful Anwar Singapraja.

Memang ada kehendak keras dari isteri Wirlo Hadi, agar kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Namun demikian, data di Kepolisian Resor Kota Singapraja menyebutkan Wirlo Hadi, anggota F-PPDIP DPRD Kota Singapraja yang sempat menghilang satu tahun, meninggal 22 April 2003 di Terminal Bus Landungsari. Kapolresta Singapraja Ajun Komisaris Polisi Hakul Rahman mengatakan telah menerima keterangan ahli forensik yang menyebutkan korban meninggal secara wajar.

Bila berdasarkan pengakuan pribadi, Bambang GW jelas diberhentikan dari jabatannya sebagai Sekretaris DPC PDIP Kota Singapraja secara sepihak oleh Bagus

Permadi, maka informasi berkenaan dengan penyebab hilang atau menghilangnya Wirlo Hadi masih diliputi oleh ketidak-jelasan. Namun demikian, isu yang berkembang dan cenderung dipercaya oleh sebagian warga masyarakat adalah bahwa Wirlo Hadi pernah bertikai dan diintimidasi oleh Bagus Permadi, dan menguatkan pendapat sebagian warga masyarakat bahwa Bagus Permadi adalah politisi yang tidak segan-segan menggunakan ancaman dan kekerasan untuk mencapai tujuan atau memenangkan persaingan.

2) Kasus Penganiayaan Tokoh Kritis, Ibnu Tricahyo

Ibnu Tricahyo, kelahiran Singapraja 12 Februari 1955, adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Maharaja. Pria berpendidikan doktor hukum ini, dikenal sebagai tokoh intelektual yang senantiasa kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah, termasuk Walikota Singapraja Bagus Permadi. Selain kesibukannya sebagai dosen, Ibnu Tricahyo juga menjabat sebagai Ketua PP Otoda, Universitas Maharaja, hingga terakhir menjadi anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Sejumlah kebijakan yang ditentang oleh almarhum di antaranya pembangunan Singapraja Town Square (Sitos), pengalihan lahan resapan dan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan Akademi Penyuluh Pertanian (APP) Tanjung yang dialihfungsikan menjadi perumahan mewah. Selain itu juga kebijakan Alun-alun Junction (AAJ), pembangunan Singapraja Olympic Garden (SOG) serta kebijakan pemerintah lainnya yang mengabaikan aspek hukum demi kepentingan sekelompok orang di pemerintahan atau pengusaha.

Menurut penuturan Cahya, mantan Sekretaris Kota Singapraja, yang mendampingi Bagus Permadi, hingga mengundurkan diri dan menjadi Widya Iswara, salah satu kecerdikan Bagus Permadi adalah mengatur agar sebuah proyek pembangunan yang dikehendaki menjadi pilihan yang tak bisa dihindari. Cahya mencontohkan, bahwa sejak semula dia mengetahui bahwa target Bagus Permadi adalah membangun SITOS. Namun demikian, Bagus Permadi tidak secara langsung menyampaikan gagasannya untuk membangun SITOS, melainkan membangun Alun-alun Junction (AAJ).

Ketika itu, di depan para anggota DPRD Kota Singapraja, Bagus Permadi menyampaikan gagasan untuk membangun AAJ yang tidak lain adalah mal bawah tanah. Menurut kesaksian Cahya yang ketika itu masih menjabat sebagai Sekretaris Kota Singapraja, apa yang dilakukan oleh Bagus Permadi sebenarnya merupakan tujuan antara, semacam strategi untuk menggiring pendapat khalayak sesuai dengan maksud sebenarnya, yaitu: membangun SITOS. Persetujuan untuk membangun SITOS itu sendiri sebenarnya merupakan konsekuensi dari penolakan pembangunan AAJ, terutama oleh komunitas Islam dan NU, karena lokasinya yang terletak persis di depan Masjid Jami' Kota Singapraja.

Ketika NU menolak, maka dengan cerdik Bagus Permadi mengajukan pertanyaan seharusnya dimana kalau tidak di bawah alun-alun. Jawaban pun akhirnya tergiring mengarah ke lokasi SITOS sekarang, yaitu Jl. Veteran yang sebenarnya merupakan lingkungan pendidikan dan kawasan resapan hijau. Tentu saja, rencana

yang sudah dipastikan oleh Bagus Permadi ini mendapatkan kritik dan penolakan, tidak hanya dari kalangan pendidikan dan mahasiswa, tetapi juga dari penggajian lingkungan Kota Singapraja. Dalam konteks ini, Ibu Tricahyo merupakan salah satu eksponen perguruan tinggi yang giat menggalang gerakan penolakan.

Pada dasarnya banyak kejadian berupa intimidasi dan ancaman diterima oleh Ibnu Tricahyo dan kawan-kawan. Namun demikian, salah satu kejadian paling penting dicatat berkenaan dengan akibat dari sikap kritis Ibnu Tricahyo adalah ketika yang bersangkutan adalah terjadinya kasus pemukulan di ruang publik, yaitu di Gedung DPRD Kota Singapraja. Ketika itu (Rabu, 14/12/2005), Ibnu Tricahyo mendatangi DPRD Kota Singapraja dengan didampingi seorang staf perempuan untuk mengambil draf RDRTK. Saat sedang menunggu di depan ruangan Fraksi PKS, tiba-tiba Ibnu didatangi sekelompok orang tak dikenal, yang tanpa penyebab jelas tiba-tiba memukuli Ibu Tricahyo. Akibatnya, Ibnu Tricahyo pun menderita luka di wajah dan hidung, serta pelipisnya berdarah. Boleh jadi karena perempuan, rekan yang mendampingi Ibnu luput dari aksi kekerasan ini. Menurut seorang saksi mata, saat kejadian sebenarnya banyak orang berada di depan ruang Fraksi PKS, termasuk Satpam. Tapi kejadiannya begitu cepat sehingga tidak ada yang sempat mencegah. Juga tidak ada yang sempat mengenali pelaku penganiayaan.

Kejadian pemukulan terhadap Ibu Tricahyo di ruang publik tersebut sempat menimbulkan reaksi keras dari para mahasiswa dan sivitas akademika lain. Ratusan mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Maharaja (Unima), Singapraja, Jawa

Timur, mendatangi Balai Kota Singapraja. Mereka memprotes aksi pemukulan terhadap salah seorang dosen FH Unima yang diduga dilakukan preman suruhan Walikota Singapraja Bagus Permadi.

Massa menuduh Walikota Singapraja berada di balik aksi kekerasan terhadap Ketua Pusat Pengembangan (PP) Otonomi Daerah (Otda) FH Unima Ibnu Tricahyo SH. Sebab selama ini Ibnu dikenal vokal dalam mengkritik kebijakan Pemerintah Kota Singapraja. Ibnu, antara lain, pernah memprotes kebijakan Pemkot Singapraja dalam pembangunan Singapraja Town Square (SITOS). Pembangunan SITOS dinilai tidak sesuai dengan Rencana Detail Ruang Tata Kota (RDRTK) karena berdiri di area pendidikan. Walau diprotes, pembangunan SITOS tetap berlanjut. Ibnu dan kawan-kawan juga memprotes pembangunan Alun-alun Junction, juga karena menyalani RDRTK. Ibnu juga memprotes rencana renovasi Stadion Gajahyana yang diikuti pembangunan mall dan mess atlet di sekitarnya. Ketika itu, (15/12/2005), massa melakukan aksi duduk di jalan di depan Balai Kota Singapraja, Jalan Tugu. Sementara sebagian dosen dan mahasiswa sedang melakukan dialog dengan Asisten I Walikota Sukirno. Kejadian tersebut berlanjut karena kemudian civitas akademika Universitas Maharaja menggelar aksi yang menuntut agar gedung DPRD sebagai Gedung Publik harus steril dari kegiatan *premanisme*, jaminan keamanan bagi siapa saja untuk informasi, data dan menyampaikan aspirasi.

Selang beberapa hari, aksi civitas akademika tersebut direspon secara aktif oleh beberapa elemen yang hadir waktu itu, diantaranya adalah Forum Rektor, Forum

Komunikasi Umat Agama Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia Cabang Singapraja, PP Otoda FH Unima, perwakilan dari Solidaritas Persaudaraan Rakyat Singapraja, perwakilan dosen dan mahasiswa PTN/PTS se-Singapraja serta LBH. Pertemuan yang dipimpin Ketua Paguyuban Rektor Singapraja Prof. Imam Syafii (Rektor UM) didampingi Rektor Unima Prof. Bambang Guritno selaku tuan rumah, dan dihadiri pula oleh Ibnu Tricahyo. Pertemuan ini bertujuan mencari solusi apa yang harus dilakukan.

Ketika akhirnya SITOS tetap dibangun dan diresmikan, Demo dengan kekuatan massa sebanyak dua ratus orang yang kemudian memblokir pertigaan Jalan Veteran. Ban-ban bekas pun dibakar di tengah jalan. Walhasil, aksi mahasiswa ini menimbulkan kemacetan sepanjang 2 kilometer. Adanya aksi tersebut kemudian mendapat perlawanan dari aksi kontra yang mendukung dibukanya SITOS sebagai peluang akan lapangan pekerjaan dengan kekuatan massa sebanyak 300 warga mengatasnamakan Forum Peduli Masyarakat Kota Singapraja.

Dari uraian ringkas terhadap akibat-akibat yang diterima oleh para pengkritik yang menolak proyek-proyek yang dilaksanakan di bawah kepemimpinan Walikota Bagus Permadi tersebut, semakin tampak bahwa Bagus Permadi adalah sosok politisi yang bisa menggunakan cara intimidasi, represi, dan bahkan agresi untuk memuluskan tujuannya. Pemberitaan dan cerita-cerita yang berkembang semakin meneror para aktivis dan kelompok masyarakat kritis di Kota Singapraja. Ada perasaan takut yang menjalar dalam diri pribadi para aktivis, karena yang dihadapi

bukan sekedar politisi, melainkan --- meminjam istilah M Ariful Huda --- seorang politisi preman.

Tidak mengherankan kalau sejumlah mega proyek yang diajukan oleh Bagus Permadi berjalan mulus tanpa perlawanan berarti, meskipun sebenarnya menyalahi peruntukan kawasan. Salah satunya adalah pembangunan Singapraja Olympic Garden (SOG), yang meskipun mempunyai potensi permasalahan yang tidak kalah dengan SITOS, pelaksanaannya sangat jauh berbeda karena lebih kondusif. Ketika pembangunan SOG ini diajukan, memang banyak warga Kota Singapraja yang berharap bahwa Stadion Gajayana dibangun satu paket dengan SOG sehingga berkelayakan untuk pertandingan internasional. Namun demikian, ternyata yang dibangun hanya SOG dan sebuah hotel yang karena keberadaannya, masyarakat harus rela mengalami kemacetan karena perubahan arus demi kedua bangunan tersebut.

Berkenaan dengan sejumlah proyek pembangunan ini, seorang warga Kota Singapraja yang hanya berani menulis di sebuah blog internet mengemukakan:

Masih banyak sih yang harusnya jadi masalah karena kelucuan dan kengawuran mbah Bagus Permadi.

Singapraja Town Square (SITOS). Sebenarnya itu lho tanahnya siapa? mbok ya jangan asal caplok suuuu. . . Lagian disitu lho kawasan pendidikan, liat tuh jadinya banyak Mahasiswa asal luar Singapraja yang punya alasan kuat kuliah di Singapraja karena ada Mall gede --"

Singapraja Olympic Garden (SOG). Mega proyek pembangunan di sekitaran stadion Gajayana. Awalnya sih masyarakat berpikir kalo stadion Gajayana bakal diperbesar kaya Gelora Bung Karno di Jakarta, tapi ternyata yang gede malah mall sama hotel plus diskotik. Ajang konak lagi deh yang dibangun --" Fly Over Mergosono sama Arjosari masih sesuai dengan kebutuhan. Gak majalah. . . .

Block Office Jl. Mayjend Sungkono bisa jadi nilai plus, tapi sayang pelayanan publiknya masih tetep jancukan --"

Jembatan Jl. Mayjend Sungkono nih yang paling parah. Sudah pembebasan tanah, sudah pasang tulangan buat kaki penyangga jembatan, eh malah gak diterusin. . Masa duitnya *diembat* lagi mbah? mbok yo ojo kebacut. . .

Masih ada lagi seh beberapa kelucuan proyek di masa rezim Bagus *Suparcuk*, tapi males ngetik sama mikirnya :p (Sumber Data pada lampiran 6: 4.32).

Selain berbagai kasus tersebut, masih terdapat satu lagi kasus nyata yang melibatkan para preman yang disuruh oleh Bagus Permadi yang akan disajikan berikut ini.

3) Kasus Premanisme di Kampus STIBA Singapraja

STIBA Singapraja adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang menempati kampus di kawasan Perumahan Sawojajar Kota Singapraja. Lahan kampus STIBA Singapraja merupakan aset milik Pemerintah Kota Singapraja, yang digunakan oleh Yayasan STIBA Singapraja dengan status sewa. Pada mulanya, ABA Singapraja adalah perguruan tinggi swasta yang sama sekali tidak melibatkan pejabat pemerintah. Namun demikian, ketika ABRI mendominasi pemerintahan daerah di Indonesia, seorang walikota yang berasal dari TNI mengambil alih Yayasan STIBA Singapraja, yang dalam pengelolaannya diserahkan kepada TNI aktif yang mendapat penugasan sebagai Kepala Kantor Sosial Politik Pemerintah Kota Singapraja bernama Waluyo Santosa.

Selepas menjadi Kakansospol, Waluyo Santosa diangkat menjadi Direktur PDAM Kota Singapraja hingga dua periode. Pada masa kepengawasan dijabat oleh Cahya, sebenarnya Waluyo Santosa berupaya mengubah status PDAM menjadi

persero, agar tetap bisa menjabat sebagai direktur. Namun demikian, dengan mengacu pada landasan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, Cahya menolak untuk mengubah bentuk badan usaha, sehingga Waluyo Santosa harus berhenti sebagai direktur PDAM.

Dengan kedudukannya sebagai direktur PDAM, Waluyo Santosa menjadi semacam penguasa tunggal di Yayasan STIBA Singapraja. Apa pun keputusan dan kebijakan Yayasan dan akademik STIBA Singapraja bergantung sepenuhnya kepada Waluyo Santosa. Selepas menjadi direktur PDAM, Waluyo Santosa berkehendak untuk secara lebih sungguh-sungguh mengelola STIBA Singapraja, termasuk misalnya dengan meminta khusus dibangun ruang kantor Yayasan STIBA Singapraja yang setidaknya setara dengan ruang kantornya semasa menjabat sebagai Direktur PDAM.

Bersamaan dengan kehendak untuk berkantor di Yayasan, STIBA Singapraja sedang dalam proses suksesi kepemimpinan yang semula memiliki susunan kepemimpinan: (1) Eko Ediyono, selaku Ketua, (2) Nur Salam, selaku Pembantu Ketua I, (3) Eny Anjarwati, selaku Pembantu Ketua II, dan (4) Tiksno Widyatmoko, selaku Pembantu Ketua III. Untuk itu, selaku Pembina merangkap Ketua Yayasan STIBA Singapraja, Waluyo Santosa menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Ad Hoc Pemilihan Pimpinan STIBA Singapraja, dengan tugas melakukan penjangkaran dan pemilihan calon Ketua STIBA Singapraja untuk direkomendasikan kepada Ketua Yayasan STIBA Singapraja.

Setelah melaksanakan sejumlah tahapan atau proses penjaringan dari tiga komponen pemilih, yaitu: (1) dosen dan karyawan tetap, (2) dosen luar biasa, dan (3) mahasiswa, diperoleh tiga nama dengan urutan perolehan dukungan: (1) Eko Ediyono, (2) Sakban Rosidi, dan (3) Lestari Rahayu, untuk diserahkan kepada Yayasan STIBA Singapraja.

Sebenarnya, dengan alasan tidak sejalan dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah untuk seorang dosen adalah S2, maka Lestari Rahayu, telah ditolak oleh kalangan aktivis mahasiswa. Bagaimana pun STIBA Singapraja sebelumnya dipimpin oleh Ketua berkualifikasi doktor, selanjutnya master, dan dianggap merupakan penurunan apabila dipimpin oleh seorang ketua berkualifikasi sarjana (S1). Karena itu, sejak pencalonan sebenarnya calon tersebut sudah berusaha ditolak. Namun demikian, karena pihak Yayasan menetapkan bahwa jenjang pendidikan yang dipersyaratkan adalah Sarjana, maka panitia ad hoc tetap memprosesnya dalam proses penjaringan dan pemilihan.

Keputusan mengejutkan dilakukan oleh Waluyo Santosa ternyata sangat mengejutkan, karena justru Lestari Rahayu, yang ditetapkan sebagai Ketua STIBA Singapraja. Karena itu, sebagai reaksinya para mahasiswa bergolak untuk menolak pemberlakuan keputusan tersebut. Pergolakan mahasiswa STIBA Singapraja ternyata diredam dengan memperpanjang jabatan Eko Ediyono selama satu tahun. Memang selama satu tahun masa perpanjangan tersebut, aktivis mahasiswa relatif tidak

melakukan perlawanan. Namun demikian, ketika kepemimpinan diserahkan kepada Lestari Rahayu, mahasiswa kembali menolak dengan keras (Periksa Lampiran 1, Gambar 4.15).

Sebuah catatan yang diambil dari situs SCTV, memberikan unjuk rasa tersebut sebagai berikut:

Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STIBA), Singapraja, Jawa Timur, terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Syaiful Anwar, Singapraja, Rabu (13/10). Izmir Rizaldi harus mendapat perawatan medis karena kondisinya terus menurun setelah tiga hari melakukan mogok makan. Selain itu, mahasiswa semester tujuh Jurusan Sastra Inggris-Jerman itu mengalami dehidrasi yang cukup parah.

Sementara keempat mahasiswa lainnya tetap melanjutkan aksinya meski berada dalam kondisi yang mulai melemah. Aksi tersebut adalah bentuk protes atas pengangkatan Lestari Rahayu sebagai Ketua STIBA oleh yayasan. Padahal, Lestari dikalahkan Eko Ediyono saat pemilihan langsung pada 3 Juni silam. Mogok makan kelima mahasiswa itu mendapat dukungan dari sejumlah mahasiswa lain yang menggelar orasi di halaman kampus yang terletak di Jalan Terusan Danau Sentani Nomor 97, Sawojajar, Singapraja (Sumber Data pada lampiran 6: 4.35).

Aksi yang terus berlangsung tersebut kemudian memotivasi ketua Yayasan STIBA Singapraja kemudian mengambil langkah taktis, yakni dengan menyerahkan kedudukan ketua Yayasan STIBA Singapraja kepada Bagus Permadi dengan harapan pergolakan yang terjadi antara mahasiswa dan civitas akademika dengan yayasan dapat terselesaikan.

Kejadian tersebut begitu singkat, sebagaimana disampaikan oleh Imam Khoirudin yang ketika itu menjabat sebagai Presiden Mahasiswa (Presma) sekaligus koordinator aksi waktu itu sebagai berikut:

Cerita yang lain di sana, setelah kita demonstrasi, jadi *pes ilang wes*. STIBA itu *wes* dikuasai *temen-temen*, jadi kampus itu ditutup. Pertamanya lima hari, terus tambah lagi hingga sampai empat bulanan itu. Akhirnya di tengah-tengah demonstrasi ini, Pak Santoso ini memberikan kedudukan Yayasan ini kepada Pak Bagus Permadi. Akhirnya setelah kabar itu didengar, pagi itu kita dengar, sorenya langsung preman-preman itu datang. Preman itu adalah anak buahnya Pak Bagus Permadi, karena mereka datang dalam keadaan mabuk dan *ngobrak ngabrik* tempat kumpul mahasiswa. Lucunya, selama itu Pak Bagus Permadi tidak pernah ada di STIBA. Kebiasaan menyelesaikan permasalahan dengan kekerasan, diperkenalkan sejak itu oleh Pak Bagus Permadi. STIBA jadi menggunakan kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah (Sumber Data pada lampiran 6: 4.36)

Gerakan mahasiswa yang kemudian didesak oleh gerakan taktis Bagus Permadi dengan menyebar preman dikampus STIBA Singapraja berimbas pada lumpuhnya kekuatan massa pendukung aksi. Adapun aktivitas dari preman tersebut di samping minum minuman beralkohol selama di kampus juga mengintimidasi para mahasiswa dan tenaga pendidik maupun pengajar yang terlihat mendukung aksi mahasiswa tersebut. Bahkan selang beberapa waktu setelahnya, secara informal, muncul beberapa oknum (selain preman) yang juga turut andil dalam mengintimidasi koordinator aksi/pergerakan, sebagaimana disampaikan oleh Imam Khoiruddin dalam FGD "Konflik Aktivistis STIBA Singapraja dengan Bagus Permadi" sebagai berikut:

Ketika preman itu masuk, ngobrak-ngabrik semuanya, dan itu pun, jujur saja itu ada polisi, bukan hanya polisi, itu intel tentara. Waktu itu saya duduk-duduk, saya dipanggil. mas, mas Imam ya (tanyanya), oh inggih pak (jawab saya). (dia melanjutkan) saya dinas di Bangurejo lho, mas Imam ini kan rumahnya di Plaosan to, RT sekian, Ibunya gini, kerjanya gini. *Sampean* jangan macam-macam lho. saya bisa melakukan sesuatu lho. dihentikan saja katanya. (kemudian saya bertanya) lho bapak dari mana?, (dia menjawab) saya dari Kodim mana gitu waktu itu saya lupa. Saya jawab, kalau bapak minta saya untuk berhenti, ya bapak yang berhenti dari sini, bapak pulang saja. ngapain bapak ngurusi kami, *wong* tentara itu bukan urusannya di

kampus. dan saat itu memang saya pribadi dengan *temen-temen* tidak ada rasa takut sama sekali, apa yang mau ditakuti? Tapi itu hanya oknum mas, karena juga ada tentara yang datang, saat preman-preman datang itu datang, untuk meleraikan dan seakan memang melindungi, jadi ini bukan tentaranya mas, tapi oknum mungkin (Sumber Data pada lampiran 6: 4.37).

Pernyataan Imam Khoiruddin tersebut dikuatkan oleh pernyataan Agus Setyo Budi yang pada waktu itu berperan sebagai koordinator lapangan (Korlap) aksi. Agus Setyo Budi mengakui bahwa intimidasi tersebut ternyata sangat efektif dalam melumpuhkan kekuatan pergerakan mereka, berikut cuplikan dari pernyataan Agus Setyo Budi:

Kehadiran preman-preman itu memang berpengaruh terhadap demo mahasiswa, setelah ada preman-preman masuk, massa itu mulai berkurang. Lha orang-orang (preman-preman) di kampus mabuk siang-malam. Tahu aktivis di mushola, sholat Jumat, di warung-warung dan di mana saja mereka datang. Sebenarnya tidak hanya aktivis, semuanya termasuk karyawan, Satpam, dan lain sebagainya yang memang tidak pro mereka, bahkan yang netral juga, diikuti, diintimidasi dengan mata yang merah gitu. Mereka didatangi, ditanya, "*kamu tukang demo ya?*", "*Jangan macam-macam kamu!*" dan lain sebagainya. Sering sekali akan terjadi kontak fisik, tapi *ndak* sampai terjadi, kalau kita tidak tahan diri pasti sudah terjadi kekerasan fisik, karena mereka tidak hanya memancing, tetapi mengancam (Sumber Data pada lampiran 6: 4.38).

Untuk mendapatkan kejelasan siapa yang menggerakkan preman dengan aktivitas utama adalah menabur ketakutan dan ketidaknyamanan di lingkungan kampus, maka Agus Setyo Budi yang ketika itu berperan sebagai Koordinator Lapangan menceritakan bahwa ketika dia dan beberapa rekan seperjuangannya di panggil menghadap ke balai kota, agus sempat menanyakan kepada Bagus Permadi

secara langsung tentang eksistensi preman-preman yang berkeliaran disekitar kampus STIBA Singapraja, sebagaimana disampaikan sebagai berikut:

Sempat mahasiswa diundang, ada sekitar 6 aktivis saat itu. Jadi waktu di dalam ruangnya Pak Bagus Permadi, kita diundang, waktu di sana saya tanya ke Pak Bagus Permadi langsung, "Itu preman-preman siapa pak?" Waktu pertama saya tanya itu, dia diam saja. Karena pada waktu itu preman-preman yang tiba-tiba muncul di kampus dalam kondisi mabuk itu sempat mengaku orang suruhannya Pak Bagus Permadi. Terus saya tanya lagi dua kali, "Mohon maaf pak, itu preman-preman kok bisa dikampus itu suruhannya siapa?" "Itu suruhan saya!", kata dia sambil langsung berdiri. Ya waktu itu kita kemudian ya diam. Lalu dia melanjutkan, "Karena saya memang sengaja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan" (Sumber Data pada lampiran 6: 4.39).

Imam Khoiruddin kemudian menambahkan ketika itu upaya meredakan dan membubarkan aksi tidak hanya dilakukan dari sisi intimidasi, melainkan juga dilakukan dengan membujuk lawan konflik. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Imam Khoiruddin, dimana ketika itu ia diundang oleh makan siang oleh Abdul Hakim yang berasal dari kelompok Bagus Permadi. Abdul Hakim sendiri dengan mengatasnamakan senior Imam Khoiruddin dan lain sebagainya mencoba membujuk Imam Khoiruddin untuk menghentikan aksinya bahkan dengan iming-iming imbalan, demikian cuplikan kesaksiannya:

Jujur kalau ada orang yang menawari saya uang ya ada pak, nilainya itu lebih dari 25 juga Mas, saya waktu itu dipanggil untuk menghentikan itu, saya tidak kenal tetapi dia mengaku sebagai senior saya dan yang saya tahu, dia mempunyai hubungan dengan Pak Bagus Permadi, tapi dia dari kampus lain. Dia bilang *wes ta dek, sampean* berhenti saja, dikasih makan kenyang saya waktu itu di warung di Blimbing itu. Tidak cuma satu orang tapi enam orang itu. *Sampean* berhenti saja itu, saya lalu bilang, "Apa *sampean* pikir setelah saya diberi makan terus saya luluh. Yang berhenti itu *sampean* mas. Yang

baru datang itu sampean, saya itu sejak lahir itu di STIBA, gerakan ini gerakan saya, urat nadi saya, darah saya, kalau saya berhenti adik-adik dan teman-teman saya itu mau dikemanakan muka saya kalau saya berhenti. Dia mengatakan, "*Wes lah, sampean njaluk piro*, ini saya kasih, gitu". Terus saya bilang, "Sampai saya mati saya tidak akan pernah berpaling berjuang untuk kampus saya. Salah satu koordinator lapangan dari operasi mereka, atau operasi walikota saat itu ya dia itu. Datang langsung, siapa itu Dit, yang preman, bukan intelektual, itu datang dan bilang ke saya: "*Wes tho awakmu mandek o le, awakmu iki wes cukup wes gerakan iku* (sudahlah, kamu hentikan saja nak, gerakanmu ini cukup sudah). Saya jawab, "Cukup apanya *Lik, sampean* pikir saya ini berpanggung ria di STIBA, saya ini betul-betul berjuang, ada saja pokoknya, banyak kejadian semacam itu, wong sehari aja kita bisa rapat sampai 3 kali sehari". (Sumber Data pada lampiran 6: 4.40).

Setelah kegiatan bujuk rayu tersebut gagal diupayakan, maka kegiatan intimidasi dilakukan dengan lebih gencar, bahkan para preman ini memantau semua warga kampus STIBA Singapraja yang ditengarai mencurigakan dan tidak segan-segan mengikuti sambil mengancam mereka dikantin dan masjid sekalipun. Disinilah keteguhan prinsip diuji, karena ternyata upaya untuk melemahkan kekuatan aktivis mulai nampak dan di kondisi akhir setelah ternyata didapati 17 orang harus di-*drop out* dari STIBA Singapraja. Sanksi yang diterima oleh 17 mahasiswa tidak hanya di-*drop out*, melainkan juga di-*blacklist* dengan mengirim surat ke seluruh perguruan tinggi yang kemudian menurut kesaksian koordinator aksi hingga di teruskan ke Kedutaan Besar seluruh dunia sehingga semua orang yang ada di daftar tersebut dilarang untuk bepergian ke Luar Negeri, berikut cuplikan kesaksiannya:

Dan yang keren itu waktu saya di Bangkok, saya kan tidak punya *sangu* lebih waktu itu, saya tidak bisa pulang disana, akhirnya saya satu bulan lebih itu, akhirnya dari pihak kedutaan, karena saya tidur disana, dihubungi lah STIBA, kebetulan yang mengangkat bu Lestari sendiri, wah dihabisi saya. Akhirnya saya malah ditangkap karena berdasarkan informasi dari bu Lestari, saya di

tuduh sebagai kriminal. Saat saya diminta menceritakan duduk permasalahannya, saya tidak mau mengatakan selain kepada duta besar, awalnya maksud saya itu tidak dipertemukan, setelah berdebat lama, dipertemukanlah saya sama duta besar itu, kalau tidak salah namanya pak Ibrahim Yusuf waktu itu orang Aceh. Sebelum saya dipanggil menghadap Duta Besar Ibrahim Yusuf, 17 nama mahasiswa bermasalah di STIBA itu sudah disebar ke seluruh kedutaan besar di seluruh dunia, sehingga kita tidak punya hak untuk keluar negeri selama 2 tahun. Setelah saya jelaskan ke Duta Besar, akhirnya beliau mengerti, dan bahkan saya diberi kesempatan bermain-main di Bangkok sampai sekitar 15 hari, dikasih makan dan lain sebagainya, lalu saya dipulangkan naik pesawat, sampai saya tiba di tanah air". (Sumber Data pada lampiran 6: 4.41).

Di akhir wawancara, para aktivis tersebut menyimpulkan bahwa dalam memenangkan konflik dan menyelesaikan permasalahan, Bagus Permadi selalu menghalalkan segala cara termasuk premanisme, dan STIBA Singapraja yang tadinya tidak mempunyai kebiasaan menerapkan cara-cara premanisme, semenjak saat itu selalu memilih cara tersebut karena dianggap mempunyai tingkat keefektivan yang tinggi.

E. Rangkuman Kekuasaan, Aktor dan Jejaring Politik Nepotisme Daerah

Berdasarkan ranah tujuan tindakan aktor individu *nepotis* dan *nepos*, terdapat tiga organisasi spasial dalam jejaring politik nepotisme daerah, yaitu: organisasi spasial popularitas, organisasi spasial legalitas, dan organisasi spasial elektabilitas. Dalam ketiga organisasi spasial tersebut, aktor utamanya, yang ditandai oleh derajat sentralitasnya dalam jejaring, adalah aktor individu *nepotis* atau walikota yang masih menjabat, dan selanjutnya aktor individu *nepos* yang tidak lain adalah isteri walikota yang masih menjabat.

Dalam organisasi spasial popularitas, kontribusi terbesar diberikan oleh aktor individu M. Joyodroto selaku Sekretaris Kota, yang membawahi sejumlah SKPD, berupa Dinas-dinas daerah, Kantor-kantor Daerah, Badan-badan Daerah, dan lain-lain yang merupakan bagian dari aktor kolektiva perangkat daerah. Hampir semua SKPD berpotensi dimobilisasi oleh aktor individu M. Joyodroto untuk membantu popularitas isteri walikota yang masih menjabat sebagai aktor *nepos*. Kontribusi aktor individu M. Joyodroto sendiri tidak dapat dipisahkan dari hubungan transaksional yang berlangsung antara walikota dan isteri walikota. Ketika konstelasi politik belum banyak berubah, sebenarnya justru M. Joyodroto ini yang direncanakan akan mendampingi isteri walikota, untuk maju sebagai calon wakil walikota.

Kontribusi terbesar kedua diberikan oleh aktor kolektiva NGOGO, dengan anggota paling dominan TP PKK Kota, Kecamatan, hingga Kelurahan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, organisasi PKK telah dengan efektif bisa digunakan oleh isteri walikota untuk mempopulerkan dirinya, baik melalui berbagai program di seluruh wilayah kota, melalui kerjasama dengan aktor kolektiva perangkat daerah, maupun melalui bantuan dan kontribusi transaksional dengan aktor kolektiva media massa.

Selain sejumlah aktor tersebut, dalam ranah popularitas, isteri walikota juga sangat terbantu oleh kedudukannya sebagai bendahara DPC PDIP Kota, yang sekaligus isteri Ketua DPC PDIP Kota. Dengan memanfaatkan kedudukan ini pula, aktor *nepotis* dan aktor *nepos* berhasil merekayasa keputusan semua PAC PDIP untuk

menetapkannya sebagai calon tunggal walikota dari DPC PDIP Kota Singapraja. Walaupun akhirnya isteri walikota ini gagal mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP, tidak diragukan lagi bahwa nama isteri walikota ini sudah sangat terkenal di kalangan anggota PDIP Kota.

Dalam organisasi spasial legalitas, kontribusi terbesar diberikan oleh aktor individu Raden Kumara, yang berhasil mempengaruhi aktor individu Wibisono dan aktor kolektiva DPRD Partai Golkar untuk menjadi calon wakil walikota mendampingi aktor individu isteri walikota sebagai calon walikota. Ini merupakan kontribusi terbesar dalam organisasi spasial legalitas karena kursi Partai Golkar di DPRD sebanyak 5 kursi. Kontribusi terbesar kedua, diberikan oleh aktor kolektiva Partai Amanat Nasional (PAN), yang tidak mencalonkan anggota partainya sendiri, tetapi justru memberikan dukungan sepenuhnya kepada isteri walikota sebagai calon walikota. Sementara itu, peran KPU berlangsung sebagaimana mestinya, dengan sedikit kemudahan karena dikabarkan bahwa berkas pendaftaran pasangan calon Wara Srikandi dan Wibisono terkesan dilakukan dalam situasi serba mendesak, berupa tulisan tangan untuk nama calon wakil walikota.

Dalam organisasi spasial elektabilitas, semua aktor dalam organisasi spasial popularitas, kecuali PDIP secara organisatoris, tetap memberikan kontribusinya bagi pasangan Wara Srikandi dan Wibisono. Kontribusi terpenting, yang memberikan Wara Srikandi memiliki nilai tawar tinggi, berasal dari PAN yang memiliki 4 kursi DPRD kota. Kontribusi tambahan diberikan oleh aktor kolektiva Partai Golkar kota,

aktor kolektiva PPP, partai-partai non-parlemen, para loyalis Bagus Permadi dan Wara Srikandi, serta aktor Kresna Murti dan secara tidak langsung aktor kolektiva Partai Golkar Kabupaten.

Memperhatikan jejaring politik nepotisme yang digunakan oleh para aktor, khususnya Bagus Permadi (walikota), Wara Srikandi (isteri walikota), M. Joyodroto (Sekretaris Kota), Balarama (Bendahara DPD PAN kota), Lesmono (Ketua DPD PAN kota), Raden Kumara (pengusaha berpengaruh), dan Wibisono (Ketua DPD Partai Golkar kota), sangat tampak bahwa perilaku politik elit dalam jejaring politik nepotisme daerah ini berciri koersif, hegemonik, konspiratif dan oligarkhis.

Fenomena perilaku politik elit daerah dalam jejaring yang berciri koersif, hegemonik, konspiratif dan oligarkhis tersebut secara beriringan diikuti oleh disafeksi politik masyarakat, yang dicirikan oleh ketak-tertarikan, ketak-percayaan, dan ketak-pedulian masyarakat daerah penelitian terhadap segala hal yang berkaitan dengan perpolitikan daerah, serta perasaan tak-berdaya menghadapi perilaku politik elit, perasaan terasing dan sikap sinis terhadap segala hal yang berkaitan dengan politik daerah.

Sebegitu jauh, memang tidak bisa serta merta disimpulkan bahwa disafeksi politik massa timbul karena perilaku politik elit dalam jejaring nepotisme politik daerah. Namun demikian, berdasarkan prinsip-prinsip penarikan kesimpulan secara induktif, sebagaimana dirumuskan oleh Mill, khususnya metode persamaan (*method of agreement*) dan metode variasi seiring (*method of concomitant variation*), patut

diduga bahwa disafeksi politik massa yang dalam penelitian ini tampak bersifat sementara (*temporary*) disebabkan oleh perilaku politik elit dalam jejaring nepotisme politik daerah.

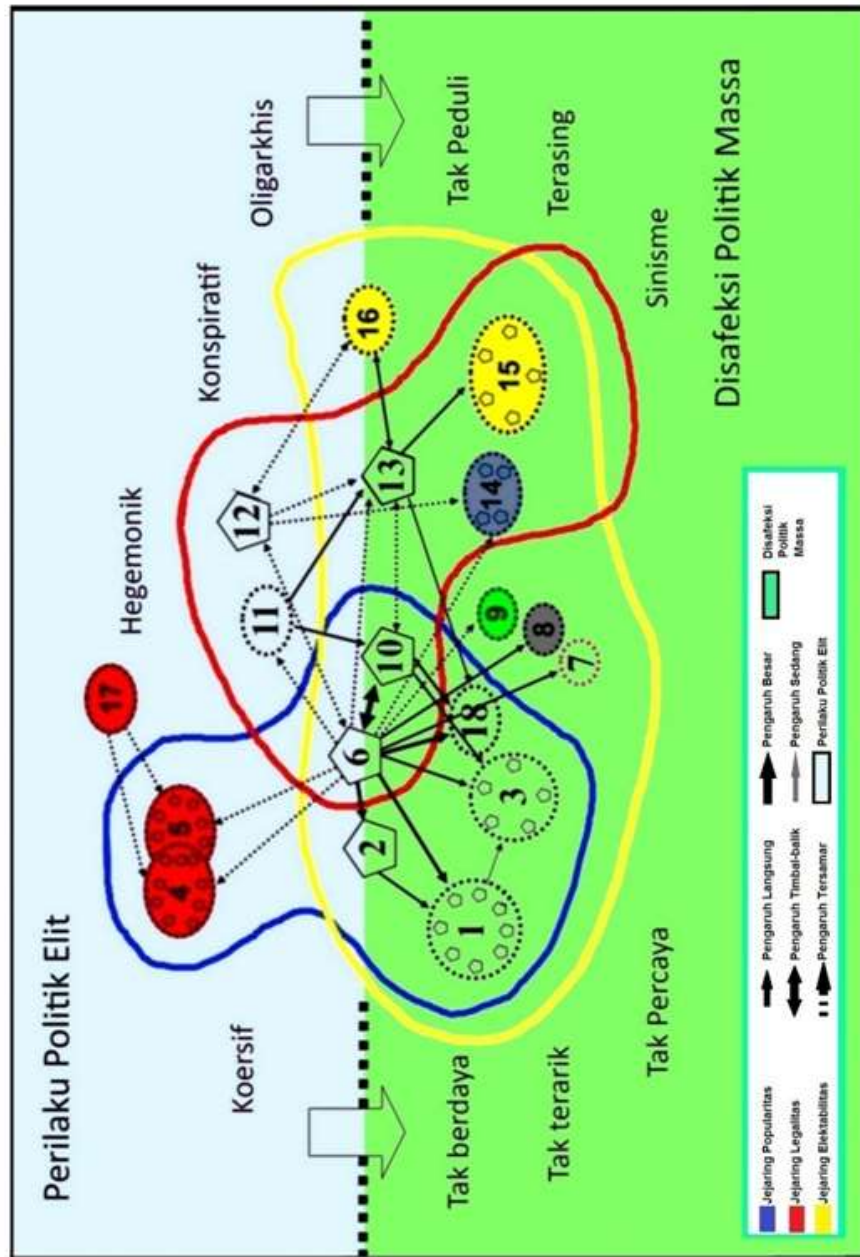
Menurut metode persamaan, bila ada dua atau lebih kejadian yang sedang diteliti memiliki satu faktor yang sama, dimana faktor yang sama tersebut ditemukan pada semua kejadian, maka kejadian tersebut merupakan penyebab (atau akibat) dari gejala yang diteliti. Menurut metode variasi seiring (*method of concomitant variation*), apa pun fenomena yang bervariasi secara seiring dengan cara tertentu, maka antara kedua fenomena tersebut terjalin hubungan faktual sebab akibat (Rosidi, 2002: 59).

Secara empirik fenomena perilaku politik elit daerah dalam jejaring yang berciri koersif, hegemonik, konspiratif dan oligarkhis dalam penelitian ini secara beriringan diikuti oleh disafeksi politik masyarakat. Karena itu, dengan mengacu pada metode persamaan dan metode variasi seiring, diduga kuat bahwa jejaring politik nepotisme daerah yang di dalamnya para elit politik daerah berperilaku koersif, hegemonik, konspiratif dan oligarkhis telah menyumbang bagi terjadinya ketak-tertarikan, ketak-percayaan, dan ketak-pedulian, perasaan tak-berdaya menghadapi perilaku politik elit, perasaan terasing dan sikap sinis masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan dengan politik daerah. Dengan kata lain, jejaring politik nepotisme daerah yang koersif, hegemonik, konspiratif dan oligarkhis telah mengakibatkan gejala disafeksi politik temporer.

Sifat temporer dari gejala disafeksi politik massa tersebut dapat diidentifikasi terutama setelah masa jabatan aktor utama politik nepotisme daerah berakhir, sehingga memungkinkan warga masyarakat untuk melakukan perlawanan, tidak hanya bersifat simbolik sebagaimana perlawanan rakyat dalam jejaring politik yang bersifat koersif, hegemonik, konspiratif dan oligarkhis, melainkan perlawanan nyata melalui penolakan untuk memilih siapa pun calon yang dikehendaki oleh aktor utama politik nepotisme daerah. Perlawanan melalui penolakan memberikan suara untuk calon kepala daerah hasil politik nepotisme ini pula yang akan dibahas lebih lanjut dan dikonsepskan sebagai perlawanan elektoral.

Secara keseluruhan, model utuh jejaring politik nepotisme daerah dalam kaitannya dengan perilaku politik elit dan disafeksi politik massa, bisa disajikan dalam bentuk gambar (Gambar 4.16). Sebagaimana tampak dalam gambar, para elit politik daerah dipetakan pada bagian atas jejaring, sedangkan sikap dan perilaku politik massa dipetakan pada bagian bawah jejaring.

Garis putus-putus dalam gambar jejaring, yang memisahkan antara kawasan perilaku politik elit dengan sikap dan perilaku politik massa, merepresentasikan bahwa secara empirik sebenarnya para elit politik daerah pun juga merupakan bagian dari massa. Apa yang membedakan di antara keduanya adalah dimiliki atau tidaknya sumber-sumber potensial kekuasaan,serta dapat atau tidaknya sumber-sumber kekuasaan tersebut digunakan secara aktual dalam jejaring politik daerah.



Gambar 4.16: Perilaku Politik Elit, Jejaring Politik Nepotisme dan Disafeksi Politik Massa

Bagaimana para aktor dalam jejaring politik nepotisme daerah menggunakan sumber-sumber kekuasaan potensial sehingga menjadi kekuasaan aktual, yang berarti menjadi kekuasaan relasional dalam ketiga ranah tujuan berupa ranah popularitas, ranah legalitas, dan ranah elektabilitas, akan menjadi pusat perhatian pada sajian berikutnya.

